



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA SAMA  
DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH BAGI  
PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)  
DAN PENGAWAS PLKB (PPLKB) DI DKI JAKARTA  
DAN BOGOR TAHUN 2000**

Oleh:  
**SANTI DEWIKI**  
**NPM. 709901139Y**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TAHUN 2002**



UNIVERSITAS TERBUKA

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN  
Tesis, Juli 2002**

**Santi Dewiki**

**Analisis Implementasi Kebijakan Kerja Sama Di Bidang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh Bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pengawas PLKB (PPLKB) Di DKI Jakarta dan Bogor Tahun 2000**

xvii + 126 halaman, 3 tabel, 4 bagan, 8 lampiran

Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.

Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PPLKB) sejalan dengan kebijakan Menteri Aparatur Negara RI. (Menpan RI) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.

Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Komponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik.

Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBjj) dapat

digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT.

Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsi/kabupaten/kota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hasil koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah.

Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan.

Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan..

Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

Daftar Bacaan. 39 (1982 – 2001)

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN  
Tesis, July 2002**

**Santi Dewiki**

**The analysis of the implementation of policy on providing higher learning at a distance cooperation in for family planning advisors and their supervisors in Jakarta and Bogor in the year 2000.**

xvii + 126 pages, 2 tables, 4 schemas, 8 appendixes.

The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position.

The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT).

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs.

The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage of a development team that consists of the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedures which UT is supposed to give.

The component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in

provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions.

The recruitments of the participants is not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education.

I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed.

Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discuss other matters so that there will be misinformation (especially on routines).

References: 39 (1982 – 2001)



UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DI  
BIDANG PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH BAGI  
PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)  
DAN PENGAWAS PLKB DI DKI JAKARTA DAN BOGOR  
TAHUN 2000**

Tesis ini diajukan sebagai  
salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
**MAGISTER KESEHATAN**

Oleh:

**SANTI DEWIKI  
NPM. 709901139Y**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TAHUN 2002**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Tesis ini telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Depok, 24.. Juli 2002,

Pembimbing,



(dr. Mieke Savitri, Mkes)

UNIVERSITAS TERBUKA

**PANITIA SIDANG UJIAN TESIS MAGISTER  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

Depok, 24 Juli 2002

Ketua,

(dr. Mieke Savitri Mkes)

Anggota

(Drg. Wahyu Sulistadi, MARS)

(Dra. Rina Anggorodi, M.Si.)

(Dra. Ida Daswati, MPd)

(Dra. Tri Darmayanti, MA)

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Penulis : Santi Dewiki
2. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1961
3. Riwayat Pendidikan :
  - SD BUNDA HATI KUDUS, Jakarta, lulus tahun 1973
  - SMP BUNDA HATI KUDUS, Jakarta, lulus tahun 1976
  - SMA Negeri XI, Jakarta, lulus tahun 1980
  - Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1986
  - Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 1999 - 2002
4. Riwayat Pekerjaan :
  - 1986 – 1988 : Staf Kesehatan Hewan, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta;
  - 1989 - 2002 : Staf Pengajar FMIPA Jurusan Biologi, Program Studi PTPL UT, Jakarta, 1996 Universitas Terbuka, Jakarta;
  - 1989 – 2002 : Staf Pengajar dpk di FISIP, Jurusan Ilmu Komunikasi UT, Jakarta;
  - 1996 – 2002 : Sekretaris Jurusan MKU FISIP UT, Jakarta;



UNIVERSITAS TERBUKA

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Kerja Sama Di Bidang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh Bagi Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pengawas PLKB (PPLKB) Di DKI Jakarta dan Kota Bogor Tahun 2000” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia.

Dalam menyusun tesis ini, penulis memperoleh dukungan baik moril maupun materi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu dr. Mieke Savitri, Mkes., selaku pembimbing akademik yang dalam kesibukannya telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
2. Ibu DR. Kusharisupeni, dr, MSc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana FKM UI, seluruh staf pengajar dan sekretariat yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini;
3. Bapak DR. Tamrin Amal Tomagola (mantan Dekan FISIP UT) yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah;
4. Bapak drs. Zainul Ittihad Amin, M.Si;, selaku Dekan FISIP UT yang terus menerus mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini;

5. Kepala Pusdiklat BKKBN, Kepala Perencanaan BKKBN Pusat, Kepala Balai Diklat DKI Jakarta dan Bogor beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian di BKKBN;
6. Ibu Dra. Tri Darmayanti, MA. Pembantu Dekan III, FISIP UT, yang telah dan selalu memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studi;
7. Kepada Ibunda (almh.) dan Ayahanda (alm.) tercinta, yang semasa hidup senantiasa memberikan doa restu dan dorongan agar penulis terus menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan;
8. Kepada suamiku tercinta yang dengan penuh pengertian dan kesabaran menemani dan membantu penulis mengerjakan tesis; Putri-putriku tersayang Rizqy Febrina Sunarti, Balqis Khairunnisa, dan Aisyah Mayasaphira Nabilah, doa restu, dukungan, dan pengorbanan kalian selama Bunda mengikuti pendidikan adalah inspirasi dan pengobar semangat dalam langkah kehidupan ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini juga memiliki keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan apa yang disajikan dalam tesis ini, sekecil apapun bisa bermanfaat bagi kajian akademis maupun kajian praktis.

Cidodol, Juli 2002  
Penulis  
SD



UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR BAGAN .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	Ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	5
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Kebijakan .....	9
B. Pengertian Analisis Kebijakan .....	10
C. Pengertian Analisis Implementasi Kebijakan .....	11
D. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan .....	14
E. Pengertian Kerja sama Antarinstansi .....	18
F. Pendekatan sistem .....	19
1. Ciri-ciri sistem .....	20
2. Unsur sistem .....	21

G. Sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) .....	23
1. Akademik .....	26
2. Administrasi .....	32
3. Pelayanan Mahasiswa .....	33
 H. Tenaga Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana .....	34
I. Manajemen .....	41
J. Organisasi .....	44
1. Pengertian Organisasi .....	44
2. Azas-azas Organisasi .....	47
 K. Koordinasi .....	49
1. Pengertian Koordinasi .....	49
2. Prinsip-prinsip Koordinasi .....	51
3. Jalur Koordinasi .....	52
4. Ciri-ciri Koordinasi .....	54
5. Syarat-syarat Koordinasi .....	55
6. Fungsi Koordinasi .....	55
7. Koordinasi yang Efektif .....	56
 L. Persepsi .....	61
1. Pengertian Persepsi .....	61
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi .....	63
 BAB III. KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH .....	66
A. Kerangka Pikir .....	67
B. Definisi Istilah .....	69

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN .....	71
A. Desain penelitian .....	71
B. Lokasi Penelitian .....	71
C. Informan .....	71
D. Instrumen Penelitian .....	72
E. Teknik Pengumpulan Data .....	72
F. Jenis Data Yang Dikumpulkan .....	73
G. Pengolahan Data .....	75
H. Analisis Data .....	75
BAB V. HASIL PENELITIAN .....	77
A. Kerangka Penyajian .....	77
B. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	77
C. Karakteristik Informan .....	79
D. Hasil Wawancara Mendalam .....	81
BAB VI. PEMBAHASAN PENELITIAN .....	93
A. Kerangka Penyajian .....	93
B. Keterbatasan Dalam Penelitian .....	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	94
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN .....	119
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	

## **DAFTAR BAGAN**

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Hubungan antarkomponen kebijakan	13
Bagan 2.2 Kerangka berpikir dalam mengoperasikan isu-isu kebijakan pendidikan	14
Bagan 2.3 Hubungan antar unsur-unsur sistem	22
Bagan 2.4 Aktivitas mengajar dan belajar pada sistem pendidikan jarak jauh	25

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Distribusi jenis pengetahuan pendukung untuk jenis tugas PLKB dan PPLKB BKKBN	39
Tabel 5.1 Karakteristik informan penelitian implementasi kebijakan program kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh antara BKKBN dan Universitas Terbuka	80
Tabel 6.1 Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program kerja sama BKKBN – UT (Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan)	101
Tabel 6.2 Distribusi peserta didik program kerja sama BKKBN - UT	106

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Nomor Lampiran :

1. Pedoman wawancara mendalam Kabid. Penyelenggaraan diklat pegawai BKKBN Pusat, Kasi Perencanaan program BKKBN Pusat, Ka. Pusdiklat BKKBN dan Dekan FISIP UT
2. Pedoman wawancara mendalam Kajur Ilmu Komunikasi FISIP UT, satgas UT Pusat, satgas BKKBN Pusat, dan satgas BKKBN Kabupaten Bogor
3. Pedoman wawancara mendalam satgas BKKBN DKI Jakarta, UPBJJ UT Jakarta dan UPBJJ Bogor
4. Pedoman Diskusi Kelompok Terarah nahasiswa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan Universitas Terbuka
5. Matriks wawancara mendalam Kabid. Penyelenggaraan diklat pegawai BKKBN Pusat, Kasi Perencanaan program BKKBN Pusat, Ka. Pusdiklat BKKBN dan Dekan FISIP UT
6. Matriks wawancara mendalam Kajur Ilmu Komunikasi FISIP UT, satgas UT Pusat, satgas BKKBN Pusat, dan satgas BKKBN Kabupaten Bogor
7. Matriks wawancara mendalam satgas BKKBN DKI Jakarta, UPBJJ UT Jakarta dan UPBJJ Bogor
8. Matriks Diskusi Kelompok Terarah nahasiswa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

1

Dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan berpikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT), menyelenggarakan program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan bagi para Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pengawas PLKB (PPLKB) yang masih berlatar belakang pendidikan SLTA di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat mempersiapkan mereka memasuki tahap II GKBN yakni tahap untuk mempromosikan Ibu Sehat Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri dalam rangka membangun keluarga kecil sejahtera, dan kini Keluarga Berkualitas 2015<sup>1)</sup>.

Usaha tersebut memerlukan disiplin keilmuan tersendiri yang harus dimiliki oleh PLKB dan PPLKB. Paket keilmuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka berpromosi itu antara lain, Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Masyarakat, Komunikasi, Demografi, Statistika, Sosiologi dan Psikologi.

Oleh karena itu, terbentuklah naskah kerja sama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 - BKKBN No. 287/HK-104/H3/91 tentang Pengembangan Tenaga Pegawai BKKBN yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1991.

---

<sup>1)</sup> Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun dana yang dikeluarkan untuk program kerja sama ini diperoleh dari bantuan bank dunia. BKKBN memilih UT, karena dimungkinkannya: 1) Para peserta didik tetap dapat melaksanakan pekerjaannya seperti biasa, tanpa harus pergi ke kampus (sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh); 2) Bahan belajar berupa modul (bahan ajar yang disusun dan dicetak per unit dan saling berhubungan satu sama lain) dikirimkan ke peserta yang bersangkutan dan diharapkan mereka dapat menyelesaikan studinya sampai berhasil baik dalam ujian; 3) Pengalaman dan taraf kedewasaan para PLKB dan PPLKB yang terpilih dianggap cukup mampu untuk belajar mandiri. Selain itu, mereka juga mendapat dorongan oleh adanya sistem jenjang jabatan fungsional Penyuluhan KB dengan keputusan Menpan nomor 107/MENPAN/1988 (pada waktu itu) tentang jabatan fungsional penyuluhan KB guna meningkatkan profesiannya secara relatif terbuka, melalui jenjang jabatan fungsional yang menekankan profesionalisme.

Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu untuk belajar mandiri, artinya mampu mengontrol atau mengendalikan proses belajar, misalnya mengidentifikasi dan menggunakan sumber-sumber belajar atau menentukan usaha dan waktu yang digunakan untuk belajar, serta berinisiatif untuk memutuskan apakah mereka membutuhkan orang lain atau tidak dalam proses belajarnya (Darmayanti, 1997).

Landasan untuk menunjukkan keberhasilan program KB Nasional di era baru adalah penekanan pada peningkatan pemberdayaan keluarga kecil dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak reproduksi, kesetaraan jender, hak-hak azazi manusia, peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan

individu serta pemberdayaan perempuan untuk membangun kemandirian dan ketahanan keluarga. PJJ bukan hanya sekedar transfer IPTEK melalui pendekatan edukatif, tetapi juga untuk semua hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, strategi baru atau arahan-arahan dari pimpinan yang harus cepat dan serentak sampai di lapangan.

Sebagai suatu sistem pendidikan, sistem PJJ adalah suatu program belajar yang terencana yang dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan pengajar, memerlukan teknik khusus, baik untuk perancangan dan penyampaian bahan belajar, berkomunikasi dengan menggunakan media elektronik dan teknologi lainnya, serta mengorganisasikan dan melakukan administrasi pengajarannya. Seperti sistem pendidikan tatap muka, sistem PJJ memiliki tiga subsistem utama yakni subsistem masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Setiap subsistem terdiri dari komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan.

Untuk tahap pertama, BKKBN memprogramkan pemberian beasiswa untuk 3.000 PLKB dan PPLKB dari 25.000 orang yang direncanakan. Dari 3.000 orang tersebut, 1.500 orang mulai pendidikan pada masa registrasi 92.2 (tahun 1992 semester 2) dan 1.500 orang berikutnya mulai pendidikan pada registrasi 93.2 (naskah kerja sama No. 6746/PT45.5/T/91 – No. 287/HK-104/H3/91, 30 Oktober 1991).

Berdasarkan data dan pengamatan sampai dengan akhir tahun 2000, dari 3.000 peserta program tersebut, baru sebanyak  $\pm$  1.650 orang yang telah menyelesaikan studinya. Jadi, masih ada 1.350 orang lagi yang belum lulus.

Padahal, untuk mengambil Program Studi D-3 ini, mereka telah kuliah antara 7 sampai dengan 8 tahun (14 – 16 semester) dari delapan semester yang seharusnya (Bagian Akademik FISIP UT, 2000).

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, baik bagi UT sebagai pengelola maupun bagi BKKBN sebagai pemberi beasiswa, dan kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap kelangsungan pemberian bantuan dari bank dunia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh para mahasiswa kerja sama UT – BKKBN (Sriati, 1999), kondisi di atas dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Kurangnya motivasi dari para peserta program;
- b. Para pelaksana kebijakan kurang paham tentang konsep program kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ);
- c. Pelaksanaan program kerja sama di bidang PTJJ, kurang didukung sarana dan prasarana;
- d. Kurangnya kesadaran para pembuat kebijakan dan peserta program kerja sama di bidang PTJJ, bahwa pendidikan tersebut menuntut proses perubahan baik pola pikir maupun pola tindak (cara belajar);
- e. Belum terkonsolidasinya mekanisme pengelolaan program kerja sama yang disebut Satgas baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dari pihak BKKBN dan UT (Satgas UT Pusat dan UPBJJ UT)

Banyak program kerja sama antara UT dengan instansi lain, tetapi peneliti memilih program kerja sama di bidang PTJJ antara UT dengan BKKBN, antara lain karena:

- a. Jumlah PLKB dan PPLKB yang disekolahkan tidak memenuhi target, yakni hanya berjumlah 3.000 orang, dari 25.000 orang yang direncanakan;
- b. Lambatnya kelulusan mahasiswa program tersebut;
- c. Program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan akan diperuntukan untuk umum, setelah enam belas (16) semester (sejak tahun 1992 – 2001), hanya diperuntukan bagi PLKB dan PPLKB yang direncanakan akan dimulai tahun 2003.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih mahasiswa yang berada di DKI Jakarta dan Bogor, karena dari 87 mahasiswa (Angkatan I dan II) di DKI Jakarta yang lulus baru 53 orang ( $\pm 60,9\%$ ) sedangkan di Bogor, dari 12 mahasiswa (Angkatan I dan II) yang lulus 10 orang ( $\pm 83,3\%$ ).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pernyataan di atas, maka perlu digali informasi tentang pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang PTJJ antara UT dengan BKKBN, sehingga rumusan masalah penelitian adalah belum dilakukannya analisis implementasi kebijakan kerja sama antara UT dan BKKBN.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerja sama di bidang pendidikan tinggi dan jarak jauh antara UT dengan BKKBN terhadap kelulusan mahasiswa program kerja sama tersebut?

### D. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Diperolehnya hasil analisis implementasi kebijakan kerja sama UT dengan BKKBN di bidang PTJJ.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya informasi hasil analisis *input* (komponen masukan) implementasi kebijakan kerja sama UT dengan BKKBN di bidang PTJJ terhadap persepsi tujuan kerja sama tersebut, sektor terkait dan uraian tugas masing-masing sektor;
- b. Diperolehnya informasi hasil analisis *process* (komponen proses) implementasi kebijakan kerja sama UT dengan BKKBN di bidang PTJJ terhadap koordinasi pelaksanaan program.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. *Manfaat Teori*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, data dan kepustakaan mengenai analisis implementasi kebijakan program kerja sama, khususnya di bidang pendidikan tinggi jarak jauh. Dalam hal ini diwakili oleh Universitas Terbuka yang bekerja sama dengan BKKBN.

### 2. *Manfaat Aplikatif*

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan program kerja sama di bidang PTJJ dengan instansi lain (mitra kerja) dan diharapkan apabila suatu kebijakan program kerja sama di bidang PTJJ dilaksanakan dengan baik, akan berdampak positif terhadap kelulusan mahasiswa suatu program kerja sama tersebut.

### 3. *Manfaat bagi Instansi Lain*

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi lain yang akan menyelenggarakan sistem PTJJ dalam merumuskan kebijakan kerja sama dengan mitra kerjanya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BKKBN atau Mitra Kerja UT lainnya, dalam menentukan kebijakan tugas belajar para pegawainya.

#### **4. Manfaat bagi Peneliti**

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pengalaman berharga terutama dalam hal menambah wawasan dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan program kerja sama di bidang PTJJ;
- b. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perumusan kebijakan program kerja sama UT dengan instansi lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di bidang analisis implementasi kebijakan kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh bagi tenaga penyuluh keluarga berencana yang tertuang dalam Naskah Kerjasama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 – BKKBN No. 287/HK-104/H3/91 tertanggal 30 Oktober 1991 serta pelengkap perangkat hukum lainnya seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya (juklak dan juknis).

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kantor BKKBN Pusat, Balai Diklat BKKBN DKI Jakarta dan Kodya Bogor, serta juga dilakukan di Universitas Terbuka dan UPB JJ UT setempat pada tahun 2001.



UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kebijakan**

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *policy*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga, 2001) mengartikan kebijakan sebagai:

1. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (di pemerintahan, organisasi, dan sebagainya);
2. pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Ada beberapa pakar yang mendefinisikan kebijakan dalam Islamy (1994) seperti Lasswell dan Kaplan, Mac Rae dan Wilde, dan lain-lain sebagai berikut:

“Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah”. (Lasswell dan Kaplan)

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”(Friedrich).

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu.” (Anderson).

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih yang berarti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.” (Mac Rae dan Wilde).

Para pakar tersebut menekankan bahwa kebijakan itu berisi suatu program yang berorientasi pada tujuan tertentu yang berasal dari seseorang, sekelompok atau dari pemerintah. Dalam kebijakan itu sudah terkandung kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi banyak orang.

Islamy (1994) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

### B. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik (Partowidagdo, 1999). Sedangkan menurut E.S. Quede yang dikutip oleh William N. Dunn dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah:

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen

tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.....dstnya.

Analisis kebijakan mempunyai tujuan yang bersifat penandaan (*designative*) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif.

### C. Pengertian Analisis Implementasi Kebijakan

Setelah suatu kebijakan dibuat sesuai dengan rekomendasi, maka kebijakan tersebut diimplementasikan/dilaksanakan oleh pengambil kebijakan (*policy maker*) secara leluasa, kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini dapat dinilai atau dievaluasi. Hasil penilaian digunakan untuk mengritik proses implementasi maupun isi kebijakan.

Hasil Evaluasi ini mungkin juga akan menghasilkan cara pandang terhadap masalah kebijakan yang berbeda dengan cara pengenalan masalah pada awal pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hasil evaluasi seringkali mendorong analis/peneliti untuk mengusulkan kebijakan yang sama sekali baru terhadap situasi problematika lama.

Analisis implementasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif dengan konsekuensi lebih melakukan retrospeksi daripada prospektif.

Analisis implementasi berusaha mengenali, sejauhmana efek yang semula direncanakan untuk dicapai oleh kebijakan telah terealisasi dan dampak apa yang ditimbulkan olehnya, baik dampak yang terduga maupun dampak yang tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sering diartikan sebagai evaluasi dampak kebijakan maupun sebagai alat untuk memahami proses politik di sekitar implementasi kebijakan.

Tujuan analisis sebenarnya, antara lain (Wibawa, 1994):

1. memberikan informasi hasil evaluasi kepada para pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung atau dijalankan;
2. menunjukkan faktor-faktor yang dapat dimanipulasi atau diubah agar memperoleh pencapaian hasil secara lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi baru.

Ada dua pendekatan dalam melakukan analisis implementasi yakni pendekatan kepatuhan dan pendekatan apa yang terjadi.

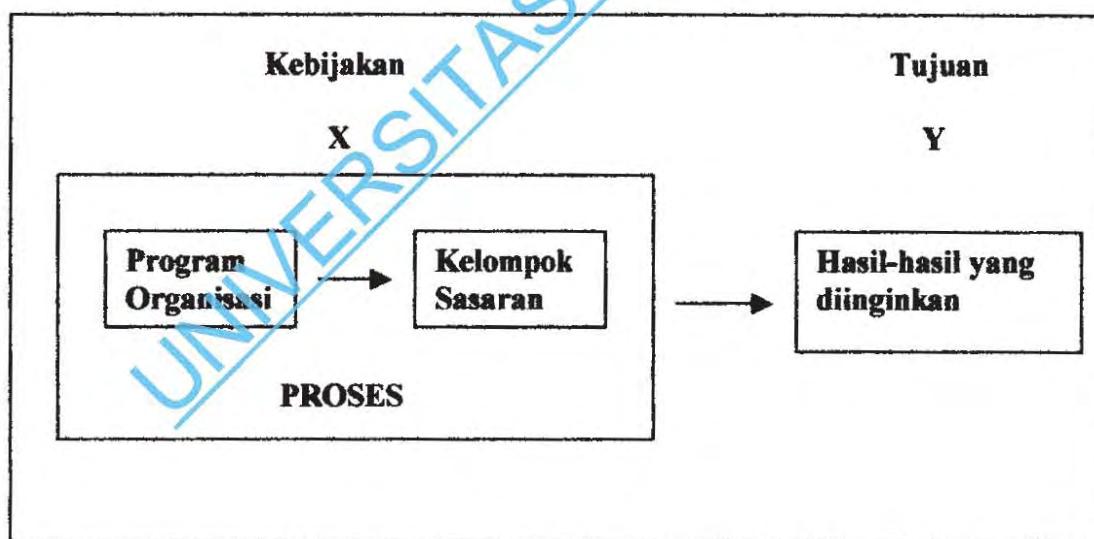
Pendekatan kepatuhan, adalah pendekatan dengan anggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut.

Pendekatan apa yang terjadi (*what happening*) adalah pendekatan yang memotret pelaksanaan suatu kebijakan atau program dari segala hal. Pendekatan ini mendasari diri pada asumsi bahwa implementasi kebijakan

melibatkan dan dipengaruhi oleh segala variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung di dalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji daripada mempersoalkan kesesuaian implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.

Ripley dalam Wibawa Samodra (1994 : 97 – 98), menyatakan bahwa variabel pengubah (*dependent variabel*) Y adalah tujuan kebijakan yang diinginkan, sedangkan variabel bebas (*independent variabel*) X adalah isi kebijakan yang berisi perangkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, komponen-komponen kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 2.1.  
Hubungan antarkomponen kebijakan**

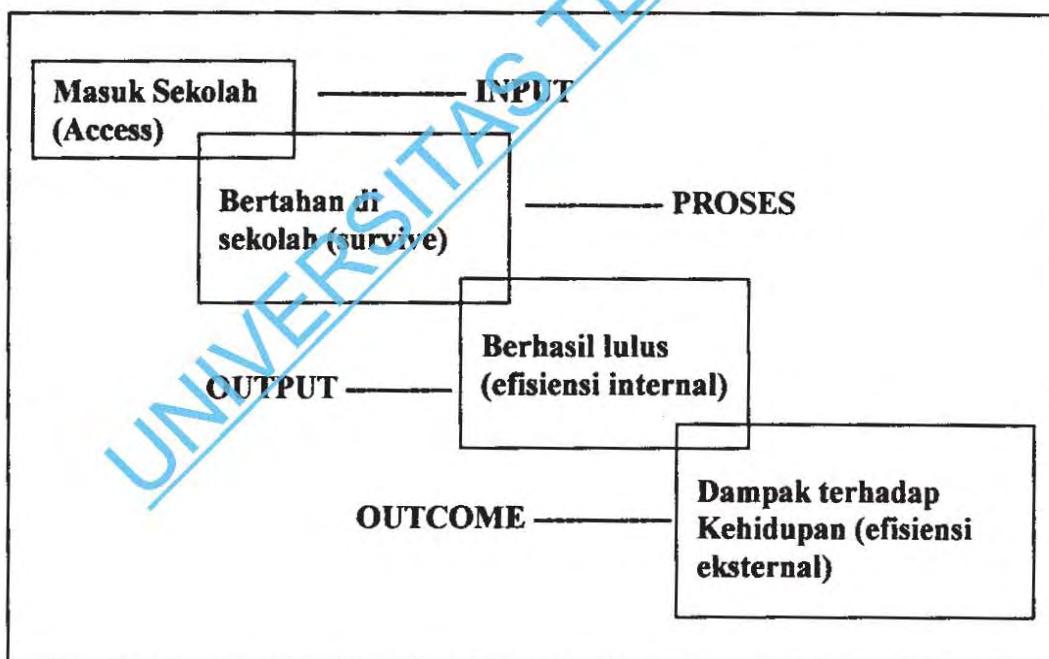


Sumber Wibawa Samodra 1994 : 98

#### D. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dalam dimensi substansi pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam empat kategori yang integral, yakni: 1) kesempatan masuk lembaga pendidikan (*educational access issue*); 2) bertahan untuk tetap ada di dalam lembaga pendidikan (*educational survival issue*); 3) efisiensi internal (*educational output issue*) dan 4) dampak pendidikan atau efisiensi eksternal (*educational outcome issue*) (Suryadi Ace dan Tilaar, 1994:10).

**Bagan 2.2**  
**Kerangka Berpikir dalam Mengoperasikan Isu-isu Kebijakan Pendidikan**



Sumber: Suryadi Ace dan H.A.R. Tilaar, 1994 : 10

Karabel dan Halsey dalam Suryadi Ace dan H.A.R. Tilaar, (1994:17)

berpendapat bahwa:

Upaya manusia untuk memperoleh pemahaman tentang kehidupan dunia melalui ilmu-ilmu sosial telah berlangsung sejak lebih dari seabad yang lalu, tetapi upaya ilmu-ilmu sosial untuk melakukan perubahan dunia melalui penerapan hasil-hasil penelitian, pendidikan secara sistematis di dalam proses pembuatan kebijaksanaan negara merupakan hal yang relatif baru.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam profesionalisasi ilmu-ilmu sosial yang berjalan secara alamiah, terlahirlah beberapa perspektif yang berkembang dari cara berpikir yang berbeda dalam analisis kebijakan pendidikan, misalnya saja timbul *Teori Fungsionalisme*, *Teori Human Capital* dan *Teori Empiris*.

### **I. Teori Fungsionalisme**

Teori ini memfokuskan pada hal pendayagunaan sumber daya manusia intelektual secara efektif sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kekuatan suatu negara.

Salah seorang perintis pertama Teori Fungsionalisme yang cukup terkenal di Amerika Serikat ialah Burton Clark (1962). Clark dalam Suryadi (1994), mengungkapkan bahwa perluasan pendidikan di sekolah tidak selamanya merupakan suatu ciri demokratisasi. Pendidikan di sekolah dapat diperluas dan dibuat secara lebih merata, tetapi apa yang diterima oleh peserta didik tidak seluruhnya sama. Sebagian murid menerima pendidikan umum

dan yang lainnya menerima pendidikan kejuruan. Yang menjadi pusat perhatian para fungsionalis pada waktu itu (Talcot Parson, 1959; Burton Clark 1960; Turner 1960; dan Turow 1961) dalam Suryadi 1994, ialah peranan lembaga-lembaga pendidikan sebagai fungsi seleksi dalam suatu mobilitas sosial yang sangat berguna dalam analisis hubungan antara pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain.

## **2. *Teori Human Capital***

Teori ini merupakan suatu aliran pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya (seperti teknologi, mesin, tanah, uang, dan sebagainya) yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa.

Teori *Human Capital* dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi sumber daya manusia di antaranya pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pengalaman kerja, kesehatan dan gizi, transmigrasi, dan sebagainya.

Theodore Schultz, 1961 dan Denison, 1962 dalam Suryadi dan Tilaar, 1994, memperlihatkan bahwa pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan ini telah mempengaruhi timbulnya sejumlah penelitian mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia mewakili tujuan masyarakat terhadap konsumsi (*consumption*), investasi (*investment*) maupun keadilan (*equity*). Oleh karena: 1) pendidikan adalah suatu bentuk konsumsi yang dapat memenuhi kepuasan seseorang untuk menikmati perolehan pengetahuan dan keterampilan; 2) pendidikan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan tenaga kerja lulusan pendidikan; 3) pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

### **3. Teori Empiris**

Fokus teori ini ialah kombinasi antara metodologi dan substansi, khususnya dalam mendiagnosis masalah pemerataan pendidikan. Dasar pemikirannya ialah metodologi dalam penelitian pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan substansinya. Para pakar di bidang ini antara lain Blau and Duncan, James Coleman dan Christhoper Jenks.

Kemunculan Teori Empiris metodologis dalam cabang sosiologi pendidikan juga merupakan jawaban dari perkembangan analisis sosiologis dalam bidang pendidikan yang sebelumnya tidak memiliki dasar konsepsi yang jelas (Karabel & Hasley, 1979 dalam Suryadi Ace dan H.A.R Tilaar, 1994 : 27).

Dalam penelitian ini, kiranya *Teori Human Capital* dapat dijadikan landasan berpikir, karena pendidikan adalah suatu bentuk konsumsi yang dapat memenuhi kepuasan seseorang untuk menikmati perolehan pengetahuan dan keterampilan, dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan tenaga kerja lulusan pendidikan, dan dapat pula memberikan pengaruh terhadap pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

#### E. Pengertian Kerja Sama Antarinstansi

Menurut *Webster's Desk Dictionary of the English Language, cooperate* (v.i): *to work together or especially willingly, for a common purpose; to work jointly with others to some end.* Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia (edisi ketiga, 2001), kerja sama adalah kegiatan atau usaha bersama baik secara perorangan maupun lembaga untuk mencapai tujuan bersama.

Suatu proses kerja sama antarinstansi guna mencapai tujuan bersama, biasanya dibuat suatu kebijakan-kebijakan khusus, misalnya kebijakan khusus dalam pelaksanaan program.

Sesuai dengan program BKKBN yang ingin meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, maka instansi tersebut bekerja sama dengan instansi penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh yakni Universitas Terbuka (UT) dengan alasan para peserta didik tetap tinggal di rumahnya masing-masing, tanpa

harus datang ke kampus, sehingga mereka juga masih dapat melaksanakan pekerjaannya.

Kerja sama tersebut tertuang di dalam naskah kerja sama antara UT dengan BKKBN No. 6746/PT45.5/T/1991 – No. 287/HK-104/H3/1991, tertanggal 30 Oktober 1991 tentang Pengembangan Tenaga Pegawai BKKBN. Naskah tersebut diperkuat oleh Surat Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan pada Universitas Terbuka dengan nomor 4339a/PT45.5/T/1992 – 187/HK-104/HK3/1992, 15 Juli 1992. Dalam naskah-naskah kerja sama tersebut tercantum jumlah peserta sistem pembiayaan dari BKKBN kepada peserta hanya sampai delapan semester, sistem pendidikan yang berupa D-3 Komunikasi Penyuluhan sebanyak 120 sks, di antaranya terdapat praktik, sistem pengadaan dan pelayanan bahan ajar, tutorial serta sistem pelayanan administrasi lainnya.

#### F. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem memberikan kemungkinan para manajer atau pimpinan untuk melihat suatu organisasi secara keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas. Oleh sebab itu, pengertian sistem antara lain yaitu: gabungan dari elemen-elemen yang saling berhubungan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan.

Azwar (1996) dalam “Pengantar Administrasi Kesehatan”, berpendapat bahwa sistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sistem sebagai suatu wujud dan sistem sebagai metoda.

Sistem sebagai suatu wujud, jika elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu wujud yang wujudnya dapat dideskripsikan secara jelas. Sistem disebut sebagai metoda, jika elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Misalnya, untuk pengawasan dan pengendalian yang bagian-bagiannya adalah berbagai peraturan atau suatu peraturan yang membentuk suatu sistem.

Pemahaman sistem sebagai suatu metoda, berperan besar dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suatu sistem tersebut.

### 1. Ciri-ciri sistem

Sistem memiliki empat ciri pokok , yakni (Azwar,1996):

- a. Dalam sistem terdapat elemen atau bagian yang satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi, yang semuanya membentuk satu kesatuan, artinya semua berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan;
- b. Fungsi yang diperankan oleh masing-masing elemen yang membentuk satu kesatuan tersebut adalah dalam rangka mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan;

- c. Dalam melaksanakan fungsi ini, semuanya bekerja sama secara bebas, namun terkait, dalam arti terdapat mekanisme pengendalian yang mengarahkannya agar tetap berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
- d. Sekalipun sistem merupakan satu kesatuan yang terpadu, bukan berarti ia tertutup terhadap lingkungan.

Konsep sistem ini muncul sebagai reaksi terhadap teori administrasi klasik yang terlalu menekankan pentingnya pembagian tugas (*job description*) dalam melaksanakan suatu program. Menyadari bahwa suatu organisasi pada dasarnya dibentuk oleh kelompok manusia yang berinteraksi, maka muncullah Teori Hubungan Manusia serta Teori Perilaku yang merupakan dasar dari Teori Sistem.

## 2. Unsur sistem

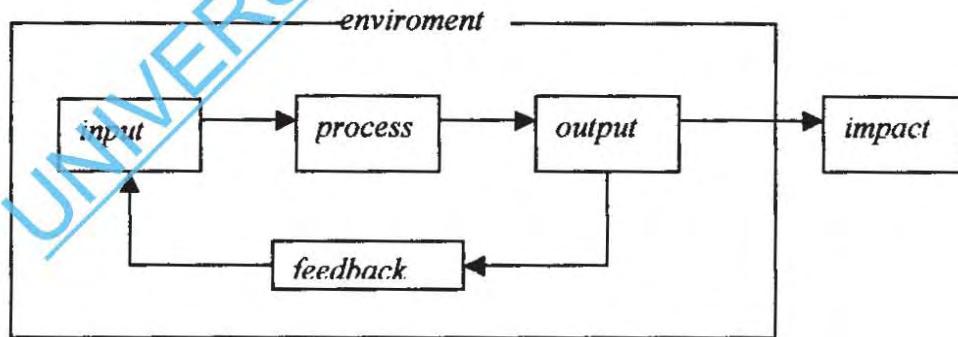
Elemen-elemen atau bagian-bagian yang membentuk sistem, jika disederhanakan dapat dikelompokan dalam enam unsur saja yakni:

- a. Masukan (*Input*), adalah kumpulan elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk berfungsinya sistem tersebut;
- b. Proses (*Process*), adalah kumpulan elemen yang terdapat dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan;

- c. Keluaran (*Output*), adalah kumpulan elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem;
- d. Umpan balik (*Feed back*), adalah kumpulan elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem itu sendiri.
- e. Dampak (*Impact*), adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistem.
- f. Lingkungan (*Enviroment*), adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem.

Keenam unsur tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi yang secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Bagan 2.3**  
**Hubungan antarunsur - unsur sistem**



Sumber: Azwar, 1996

## G. Sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ)

Sistem pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dan sistem pendidikan secara jarak jauh. Konsep pendidikan terbuka atau dalam bahasa Inggris *open education* atau juga *open learning*, pada dasarnya merupakan suatu tujuan atau cita-cita kebijaksanaan mengenai pengelolaan suatu sistem pendidikan (Belawati, 2000:1)

Konsep ini menekankan pentingnya keluwsan sistem, terutama dalam meniadakan kendala tempat, waktu dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik siswa seperti keadaan ekonomi (Bates, 1995 dalam Belawati, 2000). Karakteristik penting lainnya dari pendidikan terbuka ialah proses pembelajaran yang terpusat pada diri siswa (*learner oriented*) daripada pengajar (*teacher oriented*). Keputusan-keputusan tentang pembelajaran sepenuhnya ditentukan oleh siswa.

Sistem pendidikan terbuka pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan atau meminimalkan keterbatasan mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan.

Jadi, pengertian “terbuka” di sini berarti: (a) terbuka bagi semua yang ingin mengikuti pendidikan dengan persyaratan ijazah, minimal setara dengan sekolah menengah atas; (b) terbuka bagi mereka yang bertempat tinggal di mana pun untuk belajar di mana pun tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya; (c) terbuka bagi mereka dari tingkat ekonomi apa pun, karena mereka dapat kuliah sambil bekerja; (d) terbuka dalam arti bebas meregistrasi sepanjang tahun;

(e) terbuka dalam arti mahasiswa dapat bebas memilih matakuliah yang ditawarkan dalam kurikulum setiap semester; (f) terbuka dalam arti mahasiswa bebas memilih kecepatan mengikuti program studi; (g) terbuka dalam arti tanpa dinding kelas, sehingga mereka dapat belajar di mana saja dan kapan saja.

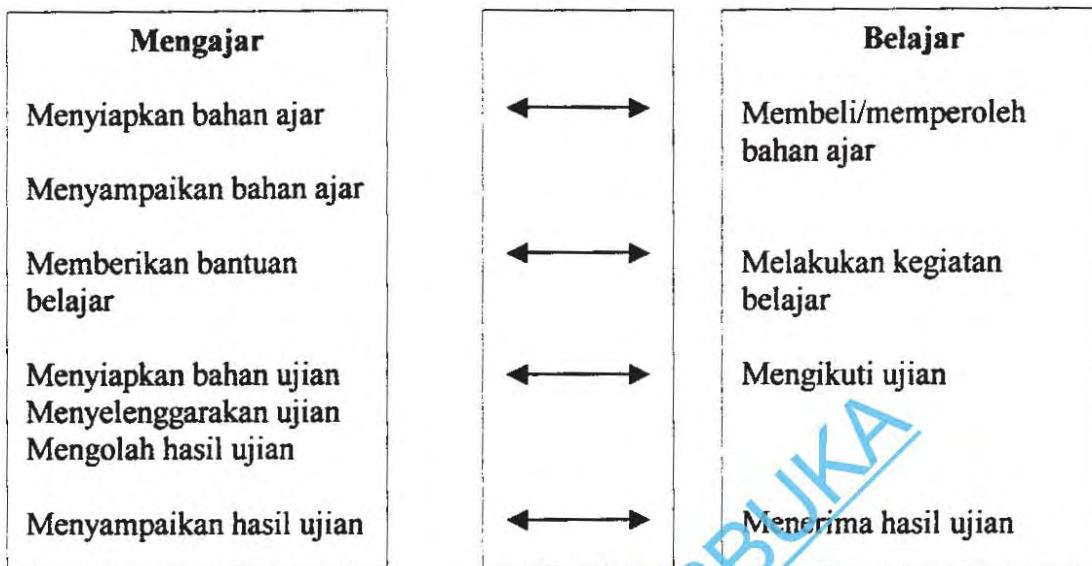
Sedangkan pendidikan jarak jauh (*distance education* atau *distance learning*) lebih merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencapai sistem pendidikan yang terbuka.

Pendidikan jarak jauh dicirikan dengan keterpisahan guru dengan murid karena faktor jarak dan waktu. Oleh sebab itu, pendidikan jarak jauh menggunakan perantaraan media untuk menyampaikan pesan-pesan (materi) pendidikannya, seperti: buku, radio, televisi, internet, tutor, dan komputer.(Bates, 1995 dalam Belawati 2000).

Sistem PTJJ sebenarnya mempunyai aktivitas utama yang tidak berbeda dengan sistem pendidikan tatap muka, yakni terdiri dari aktivitas mengajar (*teaching act*) dan aktivitas belajar (*learning act*). Namun karena adanya keterpisahan pelaksanaan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar pada sistem PTJJ harus dikelola secara berbeda dari pelaksanaan kegiatan pada sistem pendidikan konvensional.

Belawati, 2000, menjelaskan perbedaan mengajar – belajar dalam bagan 2.4 sebagai berikut:

**Bagan 2.4**  
**Aktivitas Mengajar dan Belajar pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh**



*Komunikasi/Interaksi*

Dikatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perbedaan sistem pendidikan tatap muka dan jarak jauh terletak pada komponen-komponen serta kegiatan yang dilakukan setiap subsistemnya.

Jadi, secara umum, pengelolaan PTJJ meliputi kegiatan akademik, administrasi, dan pelayanan mahasiswa.

## 1. Akademik

Kegiatan akademik pada PTJJ meliputi, penyusunan kurikulum, pengadaan bahan ajar, tutorial, pengadaan bahan ujian dan evaluasi hasil belajar.

### a. *Kurikulum*

Kurikulum Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan Universitas Terbuka disusun berdasarkan standar perintah (Kurikulum Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional). Pada kerja sama antara UT – BKBN, disesuaikan dengan permintaan mitra UT.

### b. *Pengadaan bahan ajar*

Pengadaan bahan ajar yang baru, meliputi penulisan dan pencetakan bahan ajar berdasarkan kurikulum suatu program studi. Bahan ajar ini ditulis oleh para pakar di bidang ilmunya, bisa berasal dari staf pengajar di UT ataupun di luar UT.

Penulisan bahan ajar melalui tahapan sebagai berikut: a) penulisan analisis instruksional (AI) yang disempurnakan melalui diskusi dengan pakar ilmu pendidikan - terutama pakar di bidang AI-; b) penulisan Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) - juga disempurnakan melalui diskusi dengan pakar ilmu pendidikan dan pakar di bidang ilmunya; c) penulisan Bahan Materi Pokok (BMP) yang terdiri dari beberapa modul,

kegiatan belajar, latihan, rangkuman, tes formatif dan umpan balik termasuk kunci jawaban latihan dan tes formatif.

Pengadaan kurikulum dan bahan ajar dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka dan diberikan masukan oleh mitra kerja tentang matakuliah-matakuliah yang relevan dengan mitra kerja UT, dalam penelitian ini dengan BKKBN.

*c. Tutorial*

Sistem PTJJ merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kepada kemandirian (bukan kependidikan) mahasiswa. Namun demikian, sistem ini juga mensyaratkan adanya interaksi dua arah (Holmberg, 1983 dalam Belawati, 2000:30), baik antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, antara mahasiswa dengan bahan ajar maupun (dan terutama) antara mahasiswa dengan dosen yang dalam hal ini diwakili oleh tutor.

Tutorial merupakan layanan akademik yang secara langsung mengacu pada materi matakuliah tertentu. Tutorial tidak sama dengan kuliah tatap muka, karena tujuannya adalah penjabaran konsep-konsep esensial yang sulit dipahami dalam proses belajar sendiri serta untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa tentang hasil belajarnya. Oleh karena tutorial mengacu pada materi ajar, maka tutorial harus dilakukan oleh tutor yang ahli di bidang ilmu atau keterampilan yang sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan.

Tutor adalah ahli materi ajar tertentu yang berperan membantu mahasiswa dalam melakukan interaksi dengan bahan ajar. Proses ini dilakukan dalam kegiatan yang disebut tutorial (Moore & Kearsley, 1996).

Di UT, kegiatan tutorial merupakan suatu kegiatan yang sifatnya “sukarela”. Artinya, mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti tutorial yang ditawarkan dan tidak semua matakuliah yang ditutorialikan. Intensitas kegiatan tutorial bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung kepada permintaan mahasiswa dan ketersediaan sumber daya.

Pada hakikatnya, tutorial tidak ada, jika kemandirian tidak ada. Jika mahasiswa tidak belajar di rumah dan datang ke suatu kegiatan tutorial dengan kepala kosong, maka yang terjadi adalah perkuliahan biasa bukan tutorial.

Tutorial adalah pemicu sekaligus pemicu proses belajar mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengamati, berpikir, bersikap dan berbuat dalam menghadapi suatu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil suatu proses belajar.

Jadi, tujuan tutorial adalah menyiapkan mahasiswa agar mampu belajar mandiri sehingga dapat membantu proses belajar mengajar, meningkatkan daya pemahaman, memperluas visi dan memupuk kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan tutorial, tutor mempunyai

peran sebagai pembimbing proses belajar, nara sumber, fasilitator dan pengelola kegiatan belajar. Menurut Belawati, hingga tahun 1999 ini, ada enam jenis tutorial, yakni 1) tutorial tatap muka, 2) tutorial tertulis secara surat menyurat, 3) tutorial tertulis melalui media massa -lewat beberapa media lokal-, 4) tutorial tertulis melalui surat elektronik -lewat internet atau fax internet-, 5) tutorial radio siaran dan 6) tutorial radio interaktif – satu tutor di suatu tempat memberikan tutorial kepada sejumlah mahasiswa di lain tempat dengan medium komunikasi radio dua arah.

*d. Pengadaan atau penugasan praktikum*

Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi kerja yang sebenarnya, mereka diberikan praktikum. Untuk mitra UT yang berasal dari BKKBN diberikan pada matakuliah *Komunikasi Penyuluhan, Retorika, Menulis Naskah, Pengembangan Masyarakat, dan Metode Penelitian Komunikasi*. Praktikum ini dilaksanakan di wilayah kerja mahasiswa yang bersangkutan, dikelola oleh satgas-satgas BKKBN Daerah, maupun disupervisi oleh PPLKB yang berjenjang pendidikan lebih atau sama dengan S1. Berdasarkan *Surat Keputusan nomor 01/PT45/Kep/1992 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan UT kerja sama antara UT dengan BKKBN*, maka dibentuk dan dirincilah tugas mahasiswa kerja sama, tugas pengelola dan tugas supervisi.

### **Tugas Mahasiswa**

Tugas mahasiswa dalam melaksanakan praktikum antara lain adalah:

1. menyusun proposal program pengalaman lapangan;
2. mengajukan proposal program pengalaman lapangan;
3. melaksanakan butir-butir kegiatan program pengalaman lapangan;
4. menyusun laporan program pengalaman lapangan sesuai dengan ketentuan;
5. menyampaikan laporan program pengalaman lapangan kepada supervisor.

### **Tugas Pengelola**

Pengelola praktikum adalah satgas – satgas BKKBN Daerah yang bertugas:

1. Memberi kemudahan fasilitas untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan;
2. Menghimpun umpan balik dalam bentuk laporan penilaian dari UPBJJ, sebagai dasar dalam memberikan dorongan semangat belajar kepada para mahasiswa;
3. Mengirimkan tembusan umpan balik dalam bentuk laporan penilaian ke BKKBN propinsi melalui Balai Diklat BKKBN.

## **Tugas Supervisi**

Sedangkan supervisor atau pengawas praktikum bertugas :

1. Membimbing dan mengamati berlangsungnya program pengalaman lapangan;
2. Menilai proses dan hasil program pengalaman lapangan;
3. Mengirimkan laporan hasil penilaian ke UPBJJ dan memberikan tembusan kepada Mitra UT, dalam hal ini Kepala BKKBN kabupaten/kota.

### *e. Pengadaan bahan ujian*

Bahan ujian diadakan oleh staf pengajar UT yang mengampu matakuliah-matakuliah dalam suatu program studi. Soal-soal ujian ditulis di kartu soal yang standar untuk keempat fakultas yang ada di UT.

Setelah ditulis, ditelaah dan kemudian dikirimkan ke unit pengujian untuk diketik, ditelaah, difinalkan dan akhirnya dicetak menjadi naskah ujian -berbentuk buku-. Pengadaan bahan ujian dilakukan sepenchuya oleh UT.

### *f. Evaluasi hasil belajar*

Evaluasi hasil belajar di Universitas Terbuka terdiri dari Tugas Mandiri yang harus dikerjakan di rumah dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bentuk soal umumnya adalah tes objektif dan tes uraian untuk Ujian Komprehensif (UKT).

Mahasiswa yang mendaftar pertama kali (registrasi pertama) dapat langsung mengikuti UAS. Bagi yang mengulang harus mendaftar kembali dengan membeli Formulir Registrasi Matakuliah, dulu bernama Formulir Registrasi Ujian Ulang.

Pelaksanaan ujian dilakukan di tempat yang telah ditunjuk oleh UT atau UPBJJ UT di daerah masing-masing. Evaluasi hasil belajar bagi mahasiswa kerja sama antar UT dengan BKKBN berlaku seperti mahasiswa reguler lainnya, kecuali untuk UKT yang diberlakukan untuk program S1.

## 2. Administrasi

Kegiatan administrasi di UT, antara lain registrasi, pengiriman bahan ajar, pengiriman bahan ujian, dan pengiriman nilai ujian.

### a. *Registrasi*

Prosedur pertama merupakan pencatatan data pribadi mahasiswa beserta matakuliah yang diambilnya. Pencatatan data pribadi hanya dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa UT, yakni pada semester pertama. Pengisian, pengiriman dan penyerahan yang tepat dari Berkas Registrasi Pertama akan mempercepat pula pemrosesan dan perolehan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) serta Kartu Mahasiswa.

Selanjutnya, setiap awal masa registrasi berikutnya mahasiswa melakukan registrasi matakuliah.

**b. Pengiriman Bahan Ajar**

Persiapan pengiriman paket modul dilakukan oleh unit distribusi dengan jalan mengidentifikasi 32 UPBJJ UT dan berbagai instansi yang menjadi mitra UT seperti di kecamatan-kecamatan tempat paket modul itu disampaikan, dengan jumlah dan nama peserta di tiap kecamatan itu.

**c. Pengiriman Bahan Ujian**

Pengadaan bahan ujian dan pengirimannya ke tempat-tempat ujian di setiap UPBJJ merupakan tanggung jawab UT sepenuhnya yang dilakukan oleh unit pusat pengujian UT, tanpa intervensi mitra kerjasamanya, dalam hal ini adalah BKKBN.

**d. Pengiriman Nilai Ujian**

Setelah ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan, naskah ujian kembali ke UT ke unit pengujian untuk dilakukan penilaian dan kemudian hasil akhir dikirimkan ke setiap UPBJJ dan ke kantor-kantor BKKBN kabupaten. Tetapi akhir tahun 1999, nilai UAS langsung dikirimkan ke alamat mahasiswa.

**3. Pelayanan Mahasiswa**

Pelayanan mahasiswa meliputi; pelayanan akademik dan pelayanan administrasi. Pelayanan akademik, antara lain melayani permintaan tutorial, bimbingan akademik tentang strategi pemilihan matakuliah, dan sebagainya.

## H. Tenaga Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Pada saat memasuki orde baru yakni tahun 1966, salah satu kebijaksanaan pemerintah Indonesia yang penting adalah tekad untuk mengendalikan pertambahan penduduk. Untuk itu didirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970 melalui Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 1970.

Struktur organisasi BKKBN sejak awal telah menggambarkan strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan keluarga berencana (KB), (Hermini 1988:199 dalam Faozan, 1993) adalah:

- a. KB bukan masalah klinis dan medis semata, melainkan berkaitan erat dengan masalah perilaku, norma dan pandangan masyarakat;
- b. KB merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan materi KB meliputi berbagai aspek lintas sektoral.

Dengan dibentuknya lembaga BKKBN, maka diangkat pula tenaga Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di tingkat desa dan dikoordinasikan oleh pimpinan Kelompok PLKB yang bertugas di kecamatan.

Tugas utama mereka adalah memberikan penerangan dan motivasi (sebagai motivator) kepada masyarakat agar menerima Nilai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta mengambil tindakan untuk melaksanakan KB. Selain itu, tugas mereka juga mengorganisasikan potensi-potensi masyarakat,

dalam rangka pengembangan gerakan masyarakat yang akan mendorong setiap individu untuk memelihara kesehatan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) yang tertuang dalam Tap MPR/II/1988 GBHN, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Pengelolaan GKBN tersebut, di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh petugas BKKBN, dalam hal ini Pengawas Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) dan Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di tingkat desa, bersama-sama petugas instansi lintas sektoral terkait, seperti bidan/dokter, juru penerang, penilik sosial serta tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal.

Dalam GKBN, pembinaan diartikan sebagai kegiatan, mengarahkan dan mengaktifkan peran peserta pelaksana, pengelola program lintas sektoral, institusi masyarakat bahkan seluruh kelompok akseptor secara berjenjang sampai dengan para kader KB. Dengan demikian peran PKB/PPLKB sangat menentukan dalam keberhasilan program dan sekaligus merupakan ujung tombak dalam pembinaan institusi masyarakat (Faozan, 1987: 4). Oleh karena itu BKKBN ingin meningkatkan kemampuan profesional dari para tenaga PLKB dan para Pengawas PLKB sejalan dengan adanya tentang jenjang jabatan fungsional bagi tenaga penyuluhan KB. Dengan demikian kenaikan jabatan para penyuluhan ditentukan oleh prestasinya yang terdiri dari perolehan pendidikan, hasil karya,

dan kegiatan-kegiatan pengembangan serta bukan semata-mata berdasarkan lamanya bekerja.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3362/PT45.5/T/92 yang ditandatangani oleh Dekan FISIP UT, terlihat jelas alasan mengapa terjadi kerja sama antara UT dengan BKKBN sehingga timbul program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, antara lain:

- a. meningkatkan kemampuan profesional guna meningkatkan kinerja (*performance*) BKKBN sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab di bidang KB;
- b. membantu PLKB dan PPLKB memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan secara mandiri di bidang penyuluhan KB pada khususnya dan penyuluhan pembangunan pada umumnya;
- c. sebagai akibat adanya Surat Keputusan Menpan No.107/MENPAN/1988 tentang Jenjang Jabatan Fungsional bagi Tenaga Penyuluhan KB, BKKBN berusaha merintis adanya program pendidikan berkelanjutan dari para PLKB dan PPLKB;
- d. BKKBN juga menyatakan suatu kebijakan bahwa program pendidikan berkelanjutan ini tidak boleh hanya bersifat sebagai pelayanan pendidikan saja, tetapi juga pelayanan pendidikan yang dikombinasikan dengan pembinaan pengelolaan dalam rangka pengembangan kemampuan BKKBN sebagai suatu organisasi. Artinya komunikasi pendidikan yang terjadi dalam

rangka pendidikan ini, mengandung muatan komunikasi organisasi antara BKKBN dengan para PLKB dan PPLKB.

Perincian tugas tersebut antara lain:

- a. Memberikan penerangan dan motivasi tentang KB kepada peserta KB agar memiliki sikap mandiri, dinamis dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta mampu membangun dirinya sendiri beserta keluarganya sebagai potensi sumber daya pembangunan;
- b. Menerapkan mekanisme sosiokultural melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- c. Bekerja bersama dengan masyarakat dan menyesuaikan tugasnya dengan keadaan serta budaya setempat;
- d. Mengajak dan meningkatkan peranserta masyarakat untuk memperluas gerakan keluarga berencana berdasarkan kesadaran sendiri dan melakukannya secara berkelanjutan;
- e. Menggalakkan partisipasi semua potensi yang ada pada masyarakat untuk menjangkau sasaran KB yakni remaja, pra PUS, PUS muda dan kaum suami;
- f. Menggerakkan secara bersama tokoh formal, informal, motivator dan kader pembangunan dengan pengelola penerangan dan motivasi KB;

- g. Menyampaikan pesan melalui penerangan dan motivasi, tentang kemandirian masyarakat dalam berKB serta proses pelembagaan NKKBS;
- h. Meningkatkan penerangan aspek medis dari KB agar peserta mengetahui kegunaan dan keuntungan masing-masing alat kontrasepsi sehingga memberikan kemantapan kepada mereka dalam memilih jenis kontrasepsi serta memakainya secara berkesinambungan;
- i. Menggunakan pendekatan kultural edukatif serta media penerangan yang beragam yang ada dalam masyarakat dalam melaksanakan penerangan dan memberi motivasi KB;
- j. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan para pengelola KB dalam memberikan kesadaran dalam mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan sehingga KB dapat berhasil;
- k. Menyediakan sarana penerangan dan memberikan motivasi KB, baik berupa perangkat keras, maupun perangkat lunak yang sesuai dengan wilayah setempat.

Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tugas tersebut di atas dapatlah disusun jenis-jenis pengetahuan yang relevan bagi pelaksanaan tugas-tugas itu – sesuai juga dengan kurikulum program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan -. Susunan itu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Distribusi jenis pengetahuan pendukung untuk jenis tugas PLKB dan PPLKB BKKBN**

NO	JENIS TUGAS	JENIS PENGETAHUAN PENDUKUNG
1.	Memberikan penerangan dan motivasi tentang KB kepada peserta KB agar memiliki sikap mandiri, dinamis dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta mampu membangun dirinya sendiri beserta keluarganya sebagai potensi sumber daya pembangunan;	a. Pengantar Ilmu Komunikasi b. Psikologi Sosial c. Pengantar Komunikasi Pembangunan d. Komunikasi Antar Budaya
2.	Menerapkan mekanisme sosiokultural melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);	a. Pengantar Sosiologi; b. Sosiologi Komunikasi Massa c. Demografi d. Statistika e. Komunikasi Antar Budaya
3.	Bekerja bersama dengan masyarakat dan menyesuaikan tugasnya dengan keadaan serta budaya setempat;	a. Pengantar Hubungan Masyarakat b. Komunikasi Antar Budaya c. Konseling Keluarga Sejahtera d. Penggunaan Media Komunikasi e. Asas-asas Manajemen
4.	Mengajak dan meningkatkan peranserta masyarakat untuk memperluas gerakan keluarga berencana berdasarkan kesadaran sendiri dan melakukannya secara berkelanjutan;	a. Pengantar Ilmu Komunikasi b. Komunikasi Inovasi c. Sistem Sosial Indonesia d. Asas-asas Manajemen

*Lanjutan ....*

<b>NO</b>	<b>JENIS TUGAS</b>	<b>JENIS PENGETAHUAN PENDUKUNG</b>
5.	Menggalakkan partisipasi semua potensi yang ada pada masyarakat untuk menjangkau sasaran KB yakni remaja, pra PUS, PUS muda dan kaum suami;	a. Demografi b. Dasar-dasar Komunikasi Penyuluhan c. Komunikasi Tradisional d. Komunikasi dalam CO/CD
6.	Menggalakkan partisipasi semua potensi yang ada pada masyarakat untuk menjangkau sasaran KB yakni remaja, pra PUS, PUS muda dan kaum suami;	a. Sosiologi Komunikasi Massa b. Komunikasi dan Pembangunan Nasional c. Perencanaan Program Penyuluhan d. Komunikasi Antar Pribadi
7.	Menggalakkan partisipasi semua potensi yang ada pada masyarakat untuk menjangkau sasaran KB yakni remaja, pra PUS, PUS muda dan kaum suami;	a. Teori Komunikasi b. Konseling Keluarga Sejahtera c. Pemasaran Sosial
8.	Meningkatkan penerangan aspek medis dari KB agar peserta mengetahui kegunaan dan keuntungan masing-masing alat kontrasepsi sehingga memberikan kemampuan kepada mereka dalam memilih jenis kontrasepsi serta memakainya secara berkesinambungan;	a. Kesehatan Masyarakat b. Pemasaran Sosial c. Metode Penelitian Komunikasi
9.	Menggunakan pendekatan kultural edukatif serta media penerangan yang beragam yang ada dalam masyarakat dalam melaksanakan penerangan dan memberi motivasi KB;	a. Sosiologi Komunikasi Massa b. Komunikasi Tradisional c. Teknik Hubungan Masyarakat d. Komunikasi Antar Budaya e. Komunikasi dalam CO/CD

*Lanjutan ...*

NO	JENIS TUGAS	JENIS PENGETAHUAN PENDUKUNG
10.	Meningkatkan kreativitas dan keterampilan para pengelola KB dalam memberikan kesadaran dalam mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan sehingga KB dapat berhasil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Psikologi Komunikasi</li> <li>b. Demografi</li> <li>c. Berbicara di Depan Publik (retorika)</li> <li>d. Komunikasi Penyuluhan</li> <li>e. Teknik Mencari dan Menulis Berita</li> <li>f. Komunikasi dalam CO/CD</li> </ul>
11.	Menyediakan sarana penerangan dan memberikan motivasi KB, baik berupa perangkat keras, maupun lunak yang sesuai dengan wilayah setempat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pesan dan Media</li> <li>b. Menulis Naskah</li> <li>c. Perencanaan Program Komunikasi</li> <li>d. Penggunaan Media Komunikasi</li> <li>e. Komunikasi Tradisional</li> </ul>

**I. Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur atau mengelola (Hasibuan, 1996).

Pengaturan dilakukan lewat proses berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Proses pengaturan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sering disebut sebagai administrasi atau manajemen (Notoatmodjo, 1993).

Salah satu fungsi dari manajemen adalah pengkoordinasian dan dianggap bahwa pengkoordinasian itu merupakan suatu fungsi manajemen yang terpisah.

Pengkoordinasian sebagai suatu fungsi manajemen yang terpisah (Gie, 1978),

yakni: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan dan penyempurnaan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pengkoordinasian bukan merupakan suatu fungsi yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang penting dari semua fungsi manajemen, artinya tiap fungsi manajemen mengandung kegiatan pengorganisasian (Moekijat, 1994).

Disebutkan juga, bahwa sistem terbentuk dari elemen atau bagian yang saling mempengaruhi. Elemen yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan menjadi *input, process, output, feedback, dan enviroment* (Azwar, 1996).

Donabedian (1980) menyatakan bahwa konsep struktur manajemen terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Elemen *input* menurut Azwar, 1996, adalah perangkat administrasi yang berupa tenaga, dana, sarana dan metode atau dikenal dengan istilah sumber, tata cara dan kesanggupan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses adalah kumpulan elemen yang terdapat dalam sistem dan diperlukan untuk dapat memfungsikan sistem tersebut, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian. Keluaran adalah kumpulan elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem yang akan dimanfaatkan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit (Handoko, 1993).

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yakni untuk...

1. mencapai tujuan;
2. menjaga keseimbangan di antara kesimbangan-keseimbangan yang bertentangan;
3. mencapai efisiensi dan efektifitas.

Pengertian manajemen terus berkembang seiring dengan berjalananya waktu. Beberapa ahli mengemukakan teorinya tentang manajemen sesuai dengan perkembangan zaman dan makin majemuknya tantangan yang dihadapi.

Appley dan Follet (1997) dalam Permana (2001), membatasi pengertian manajemen sebagai seni untuk memperoleh sesuatu atau hasil melalui orang lain, demikian pula Miller mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang diorganisasikan dalam suatu kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Koontz dan O'Donnell (1978) dalam Permana (2001), mengartikan manajemen sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian seorang manajer mengkoordinasikan sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Robbins (1994), menambahkan bahwa dalam pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang lain, tetapi manajernya turut terlibat secara aktif untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, manajemen adalah ilmu dan seni yang merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam kegiatan tersebut, manajer turut terlibat secara aktif untuk melaksanakannya.

Secara operasional manajemen dilaksanakan melalui empat fungsi yakni:

1. Pengkajian;
2. Perencanaan;
3. Penggerakan dan pelaksanaan;
4. Pemantauan dan penilaian.

## J. Organisasi

### 1. Pengertian organisasi

Para pakar telah banyak mengemukakan tentang pengertian organisasi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Azwar (1996) mengemukakan batasan organisasi adalah suatu sistem yang mengatur kerja sama antara dua orang atau lebih, sedemikian rupa

sehingga segala kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Siagian (1989), mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan serta telah ditentukan dalam ikatan yang menunjukkan bahwa seseorang atau beberapa orang disebut sebagai atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Robbins (1994) mendefinisikan bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang selektif, dapat diterapkan dan bekerja secara relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan kelompok. Sedangkan Gibson (1996), menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu unit terorganisasi yang terdiri setidaknya dua orang yang berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran yang telah ditentukan.

Wijono (1977) dalam Permana (2001) mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem usaha bersama sekelompok orang untuk mencapai usaha bersama. Dengan demikian, organisasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi sedemikian rupa yang merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula dalam ikatan mana terdapat seorang atau sekelompok orang sebagai atasan dan seorang atau sekelompok orang sebagai bawahan.

Menurut Mc. Farland dan Dimock yang dikutip oleh Handayaningrat (1989), masing-masing organisasi adalah sekelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Mereka juga menyatakan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang berketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Apabila definisi tersebut disimpulkan, akan diperoleh pandangan pokok tentang organisasi yang menyatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang, proses pembagian kerja dan suatu sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial. Dengan demikian, organisasi adalah sistem saling pengaruh antarorang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Organisasi tidak berwujud, agar organisasi menjadi nyata (konkrit), maka harus ada nama jenis tertentu dan harus membentuk struktur organisasi, sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan tampak jelas apabila telah dituangkan dalam bagan organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan struktur oerganisasi adalah kerangka antarhubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat, berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat

menjalankan perannya dengan tertib dan struktur organisasi efisien berarti untuk menjalankan perannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antarusaha dan hasil kerja.

Struktur organisasi yang sehat dan efisien, dibentuk dengan memperhatikan asas organisasi, agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran para pejabat tentang perlu dan pentingnya menguasai asas organisasinya.

## 2. Asas-asas Organisasi

Suatu organisasi yang baik perlu memperhatikan asas-asas organisasi sebagai berikut:

- a. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas.

Tujuan yang jelas harus dapat dimengerti dan diterima oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi. Tujuan yang tidak jelas akan mengakibatkan organisasi tersebut tidak mempunyai pegangan yang mantap lebih-lebih bagi para anggotanya.

- b. Organisasi harus ada kesatuan komando.

Adanya kesatuan komando akan mengatur arah organisasi (*unity of direction*). Kesatuan komando akan menentukan pula kesatuan tindakan semua unit atau personalia dalam sebuah organisasi.

- c. Organisasi harus melaksanakan pembagian kerja atau pembagian tugas.  
Adanya pembagian tugas yang jelas untuk para anggota, akan membuat tugas dan kewajiban masing-masing, termasuk hak, wewenang dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Harus ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.  
Pelimpahan wewenang berarti menyerahkan sebagian dari wewenang pimpinan kepada bawahan dengan kepercayaan penuh. Hal ini penting agar bawahan dapat bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas yang diberikan. Dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ini, maka pimpinan dapat berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang penting-penting saja seperti: keputusan, kebijaksanaan, rencana strategis dan yang sifatnya rutin yang dapat dikerjakan oleh bawahan. Dapat mendorong bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif dan bertanggung jawab, serta tidak semua tugas harus bergantung kepada pimpinan atau atasan sehingga dapat mencegah budaya mohon petunjuk dan pekerjaan lancar.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana.  
Tersedianya alat-alat dan perlengkapan, merupakan kebutuhan pokok dalam organisasi. Tanpa alat dan perlengkapan yang memadai seringkali menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

## K. Koordinasi

### 1. Pengertian Koordinasi

Dalam suatu organisasi, kegiatan dibagi-bagi dalam unit-unit, kelompok-kelompok ataupun individu-individu. Manajer perlu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan tersebut, sebagian besar tergantung kepada anggota tentang menyadari dan meyujukan komitmennya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Istilah koordinasi merupakan terjemahan dari *coordination* dalam arti “*a making or being coordinate*” yang berarti memiliki kedudukan yang sama pada suatu ruang atau adanya ordinat-ordinat yang bersamaan pada sumbu x dan y dari dua garis yang berpotongan. (Sugandha, 1991).

Menurut Siagian (1978), koordinasi adalah upaya mengatur tata hubungan untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian usaha bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi seefisien mungkin. Sedangkan menurut Koontz (1984), koordinasi adalah pencapaian keselarasan dari usaha individu atau kelompok ke arah tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Stoner & Wankel (1986), mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.

Hasibuan (1984), mengemukakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Handoko (1993), menyatakan bahwa komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, maka semakin membutuhkan informasi. Jadi, pada dasarnya koordinasi merupakan tugas pemrosesan informasi.

Beberapa penulis beranggapan bahwa lebih baik mendefinisikan pengkoordinasian (*coordinating*) daripada koordinasi (*coordination*), oleh karena koordinasi merupakan hasil dari proses pengkoordinasian.

Dengan demikian jelaslah bahwa koordinasi merupakan upaya menciptakan perpaduan gerak organisasi dengan memanfaatkan unsur organisasi ke arah suatu sasaran yang sama dan serasi, agar dapat tercipta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan bersama.

Koordinasi adalah menyeimbangkan dan mengeratkan tim, dengan memberikan alokasi kegiatan bekerja yang sesuai kepada masing-masing

anggotanya, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya antara para anggota itu sendiri. Selanjutnya Terry (1982) mengemukakan koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepastian kuantitas, waktu, dan pengarahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat para pakar di atas tentang koordinasi, maka dapat diintisarikan sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah kesatuan tindakan atau kesatuan usaha;
2. Koordinasi adalah penyesuaian antarbagian;
3. Koordinasi adalah keseimbangan antarsatuan;
4. Koordinasi adalah keselarasan;
5. Koordinasi adalah sinkronisasi;

## 2. Prinsip-prinsip Koordinasi

Menurut Terry (1982), koordinasi itu membantu memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan keseimbangan kegiatan dan menyepakatkan kegiatan dari bagian-bagian yang ada. Tetapi yang penting adalah menganjurkan partisipasi kelompok terhadap awal perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari setiap anggota.

Menurut Hicks dan Gullet (1981), prinsip koordinasi adalah menjelaskan hasil kerja organisasi yang dapat dicapai apabila semua orang dan sumber daya diselaraskan, dikembangkan dan diberikan pengarahan.

Sugandha (1991), menyatakan beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi, yakni harus ada ...

- a. kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama;
- b. kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya;
- c. ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan;
- d. saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing;
- e. koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta menimpa pemecahan masalah secara bersama;
- f. informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak;
- g. saling hormat terhadap wewenang fungsional masing-masing sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

### 3. Jalur Koordinasi

Menurut Wiriadihardja (1991), jalur koordinasi adalah garis usaha atau kegiatan berupa wewenang untuk menyelaraskan, menyerasikan dan mempersatukan para pegawai atau pejabat dan fungsi-fungsinya, mulai dari

tingkat pemikiran (kebijakan termasuk landasan hukum), perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian segala unsur dan sumber atau fasilitas organisasi seperti biaya, tenaga, waktu, ruang, material atau fasilitas lainnya, sedemikian rupa sehingga tercipta kesatuan tindakan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan akhir yang ditentukan sebelumnya. Semangat koordinasi harus menjiwai dan menjelma pada setiap tatalaku aparatur vertikal maupun horizontal yang terkait dalam kerja sama di wilayah atau daerah.

Menurut Terry (1982) jenis-jenis koordinasi ada empat yaitu: koordinasi internal; koordinasi eksternal; koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Sedangkan menurut Kristiadi (1994) yang dikutip oleh Moekijat (1994) dalam Permana (2001), dinyatakan bahwa koordinasi dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi vertikal

Koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi di bawahnya.

b. Koordinasi fungsional

Koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi meliputi:

1) Koordinasi fungsional horizontal

Dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat.

2) Koordinasi fungsional diagonal

Dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat instansi lain yang setingkat lebih rendah.

3) Koordinasi fungsional teritorial

Dilakukan oleh pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam satu wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, misalnya koordinasi bupati dengan para camat.

c. Koordinasi instansional

Koordinasi ini dilakukan terhadap beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu, misalnya Dinas Kesehatan Propinsi dengan Rumah Sakit Umum Propinsi.

#### 4. Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1991), ciri-ciri koordinasi antara lain adalah:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan,
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama dan merupakan syarat mutlak terselenggaranya kegiatan dengan baik.

- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
- e. Konsep kesatuan tindakan.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

## 5. Syarat-syarat Koordinasi

Menurut Moekijat (1994) yang dikutip dari Tripathi dan Reddy (1983), dalam Permana (2001) menyatakan bahwa ada sembilan syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu:

- a. Hubungan langsung;
- b. Kesempatan awal;
- c. Kontinuitas;
- d. Dinamisme;
- e. Tujuan yang jelas;
- f. Organisasi yang sederhana;
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas;
- h. Komunikasi yang efektif;
- i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif.

## 6. Fungsi Koordinasi

Melaksanakan departemenisasi dan pembagian kerja tanpa melaksanakan asas koordinasi akan menumbuhkan peristiwa tiap-tiap satuan

organisasi atau tiap-tiap pejabat berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Thomson berpendapat bahwa dengan adanya spesialisasi menimbulkan ketergantungan, karena itu menimbulkan kebutuhan untuk adanya koordinasi. Sehubungan dengan itu Hudson melukiskan pencapaian tujuan secara keseluruhan organisasi sebagai komunikasi menyilang antar saluran-saluran spesialis akibat usaha-usaha setiap spesialis digabungkan dan dihubungkan, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangannya pada tercapainya tujuan akhir organisasi. Ini adalah fungsi koordinasi (Sutarto, 2000).

## 7. Koordinasi yang Efektif

Stoner dan Freeman (1992) mengemukakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Secara langsung komunikasi dalam koordinasi itu bergantung pada perolehan informasi, transmisi informasi dan pengolahan informasi. Untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif, maka ada tiga pendekatan yaitu:

### a. Menggunakan teknik dasar manajemen

Tuntutan koordinasi yang relatif sederhana sering dicapai melalui mekanisme manajemen dasar. Mekanisme tersebut adalah rantai komando organisasi yang menspesifikasikan hubungan antar anggota serta unit-unitnya, karena memudahkan arus informasi dan kerja di antara unit-unit.

Alat lain yang bermanfaat adalah peraturan dan prosedur yang dirancang untuk memungkinkan para karyawan menangani tugas-tugas rutin secara cepat dan leluasa. Selain itu koordinasi dari rencana strategik dan operasional dapat dicapai dengan menjamin semua unit menggerakkan upaya mereka pada tujuan yang sama yang lebih luas.

*b. Meningkatkan potensi koordinasi*

Apabila berbagai unit organisasi menjadi lebih saling bergantung, ukuran atau fungsinya menjadi lebih luas, maka diperlukan informasi yang lebih besar bagi organisasi untuk mencapai sasarannya, dan karenanya potensi koordinasinya harus ditingkatkan pula. Kalau teknik-teknik dasar manajemen seperti yang diutarakan di atas tidaklah cukup, maka mekanisme tambahan mungkin diperlukan sekali. Potensi koordinasi dapat ditingkatkan dengan dua cara yaitu secara vertikal dan horizontal.

Sistem informasi vertikal mengirim data ke atas dan ke bawah jenjang organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi di dalam atau di luar saluran komando. Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah dikembangkan untuk tiap bagian seperti pemasaran, keuangan, produksi, operasi internasional, dan *database* yang mengumpulkan informasi dari banyak bagian, untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi dan pengendalian.

Hubungan horizontal mengabaikan rantai komando, memungkinkan adanya pertukaran informasi dan keputusan-keputusan diambil pada jenjang di mana informasi yang dibutuhkan benar-benar ada. Ada beberapa jenis hubungan horizontal yang relatif sederhana, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih kompleks yang memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar.

Bentuk hubungan horizontal yang paling sederhana adalah kontak langsung di antara para individu yang harus menghadapi situasi atau masalah yang sama. Hal ini menghindari perlunya perujukan masalah ke atas, kepada manajer divisi untuk penyelesaiannya.

Peran batas jangkauan juga memudahkan hubungan lateral bila banyaknya hubungan di antara organ-unit meningkat secara dramatis, mungkin paling baik adalah menciptakan peran-peran batas jangkauan yang eksplisit dan menunjuk anggota-anggota untuk memegang peran tersebut. Para karyawan yang dipilih untuk memegang peran yang demikian harus betul-betul mengenal bukan saja unitnya sendiri tetapi juga tanggung jawab dan hal-hal yang menyangkut unit-unit tersebut.

Panitia dan satuan tugas dalam banyak hal merupakan sarana yang efektif untuk menghimpun keahlian para anggota yang berbeda-beda dari sebuah organisasi dan menyalurkan usaha-usaha mereka ke arah pencapaian tujuan bersama. Panitia merupakan kelompok yang biasanya diorganisasikan secara formal dengan penunjukkan ketua serta anggota

dan suatu jadwal pertemuan secara teratur. Panitia tersebut umumnya suatu bagian yang abadi atau permanen dari struktur organisasi, menangani masalah serta keputusan yang terjadi berulangkali. Sebaiknya satuan tugas dibentuk sesuai kebutuhan dengan maksud menangani masalah-masalah yang khusus. Bila tugas telah diselesaikan, satgas itu dibubarkan.

Peran pemanduan adalah peran yang dibentuk apabila sebuah produk, jasa, atau proyek yang mengajukan beberapa bagian memerlukan koordinasi dan perhatian yang terus menerus dari seorang individu saja yang bukan berada pada bagian yang berangkutan. Pemandu itu bertindak selaku diplomat, berbicara dalam membahas setiap bagian atau kelompok. Bila kelompok yang saling dipandukan itu saling curiga, pemandu dapat menjaga keneutralan, juga pemandu dapat membuat adanya kekuasaan di antara bagian-bagian, mencegah timbulnya kekuasaan yang lebih besar pada bagian yang satu dan menopang bagian yang kurang kekuasaannya.

Peran penghubung manajerial perlu diadakan kalau peran pemandu tidak berhasil mengkoordinasikan suatu tugas tertentu secara efektif. Manajer penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek. Kerap kali wewenang tersebut dalam bentuk pengendalian atas anggaran semua unit untuk memastikan

bahwa mereka bekerja bersama menuju ke arah tercapainya tujuan organisasi sebagai suatu kesatuan.

Organisasi matriks memiliki karakteristik peran penghubung manajerial dan satuan tugas. Pada sebuah struktur matriks, para manager dari dua bidang menyelia sekelompok karyawan yang bertanggung jawab kepada kedua manajer tersebut. Dengan jalan itu, kebutuhan kedua bidang tersebut diperhitungkan secara rutin. Seperti halnya satuan tugas, satuan struktur matriks tertentu dapat dibubarkan bila suatu proyek telah selesai.

*c. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi*

Bila kebutuhan akan koordinasi itu demikian besar sehingga metoda sebelumnya tidak efektif, pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang ketat. Galbraiggt (1974) dalam Permana (2001), mengemukakan dua cara untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi penciptaan sumber daya tambahan dan penciptaan unit-unit yang mandiri. Disediakannya sumber daya tambahan memberikan peluang atau waktu ekstra kepada unit-unit dalam memenuhi kebutuhan masing-masing unit yang lain.

*d. Masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif*

Lawrance dan Lorsch, mengingatkan bahwa pembagian kerja mencakup lebih dari sekedar tugas kerja individu. Pembagian kerja

mempengaruhi cara karyawan memahami organisasi dan peran mereka di dalamnya, juga mempengaruhi bagaimana cara orang berhubungan dengan yang lain. Perbedaan itu dinamakan diferensiasi yang dapat memperumit tugas pengkoordinasi aktivitas kerja yang efektif.

Mereka mengidentifikasi tiga jenis diferensiasi, sebagai berikut:

- d.1. Unit kerja yang berbeda cenderung mengembangkan pengertian mereka sendiri tentang tujuan organisasi dan bagaimana mengejar tujuan tersebut;
- d.2. Unit kerja sering berbeda dalam orientasi waktu. Unit yang satu menganggap bahwa untuk mencapai tujuan harus dalam waktu yang cepat, sementara unit yang lain memandang tidak membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai tujuan;
- d.3. Timbulnya konflik di antara para individu dan unit-unit organisasi. Hal ini karena ada anggapan oleh sementara individu atau unit kerja bahwa bekerja sama justru akan memperlambat pencapaian tujuan.

## L. Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Robbins (1996), didefinisikan sebagai suatu proses dengan individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Bagaimana

pun apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang obyektif. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

Menurut Kossen (1993), persepsi adalah cara anda memandang suatu situasi tertentu.

Persepsi ini merupakan proses kognitif yang kompleks yang dapat memberikan gambaran yang unik tentang dunia yang sangat berbeda dengan realitasnya. Pengenalan adanya perbedaan antara dunia dalam persepsi dan dunia dalam kenyataan penting, artinya dalam konsep perilaku organisasi (Muchlas, 1994).

Persepsi memainkan peranan yang pelik dalam kehidupan organisasi. Dalam berbagai situasi dalam kehidupan organisasi, senantiasa muncul situasi yang menuntut pengambilan keputusan yang penggarapannya merupakan sebagian besar tugas-tugas seorang dalam setiap tingkat dalam organisasi. Pengambilan keputusan tergantung kepada persepsi dan individu-individu (Anoraga, 1994).

Menurut Robbins (1996) pengambilan keputusan individual merupakan bagian yang penting dalam perilaku organisasi. Perilaku dalam organisasi seseorang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas itu. Oleh karena itu bagaimana individu-individu dalam organisasi mengambil

keputusan, dan kualitas pilihan terakhir mereka, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka.

Dari berbagai definisi di atas, maka definisi persepsi adalah suatu proses mental atau kognitif dan kesadaran yang dialami oleh setiap orang untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan serta memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman yang jika diperluas jangkauan panca indera, maka merupakan suatu unsur yang penting dalam penyesuaian perilaku manusia.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan kadang memutar balikan persepsi, faktor-faktor tersebut di antaranya menurut Robbins, 1996 adalah :

a. *Pelaku persepsi*, bila seorang individu memandang suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari prilaku persepsi individual ini. Di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah :

- 1) Sikap, karena mempunyai sikap yang berbeda terhadap suatu target, maka persepsi akan berlainan;

- 2) Motif, di mana kebutuhan (motif) yang tidak terpuaskan akan merangsang pendapat individu-individu yang berlainan dan dapat berpengaruh kuat terhadap persepsi mereka;
- 3) Kepentingan atau minat, yakni fokus perhatian kita dipengaruhi oleh kepentingan atau minat kita. Karena kepentingan individual berbeda, apa yang menjadi fokus perhatian dapat dipersepsikan berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh orang lain.
- 4) Pengalaman masa lalu, di mana kita akan mempersepsikan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Obyek atau peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya akan lebih menyolok daripada yang pernah dialami di masa lalu.
- 5) Penghargaan, di mana penghargaan ini dapat menyimpangkan persepsi. Kita cenderung akan menilai sesuatu sesuai dengan apa yang ingin kita lihat.

b. *Target*

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersiapkan. Faktor target di antaranya :

- 1) Latar belakang, target tidak dipandang dalam keadaan terpencil, hubungan antara target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokan benda-benda yang berdekatan atau sejenis;

- 2) Hal baru, di mana sesuatu hal yang baru akan lebih menarik perhatian daripada yang lama;
- 3) Kedekatan, obyek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama tidak terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik atau waktu, sering menggabungkan obyek dengan peristiwa yang tidak berkaitan;
- 4) Bunyi, orang dengan suara keras dalam kelompok akan lebih diperhatikan daripada orang yang pendiam;
- 5) Ukuran, yang lebih besar cenderung akan lebih diparhatikan daripada target dengan ukuran yang lebih kecil.

c. *Situasi*

Situasi adalah hal penting dalam konteks ketika melihat obyek atau peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar akan mempengaruhi persepsi kita.



UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH**

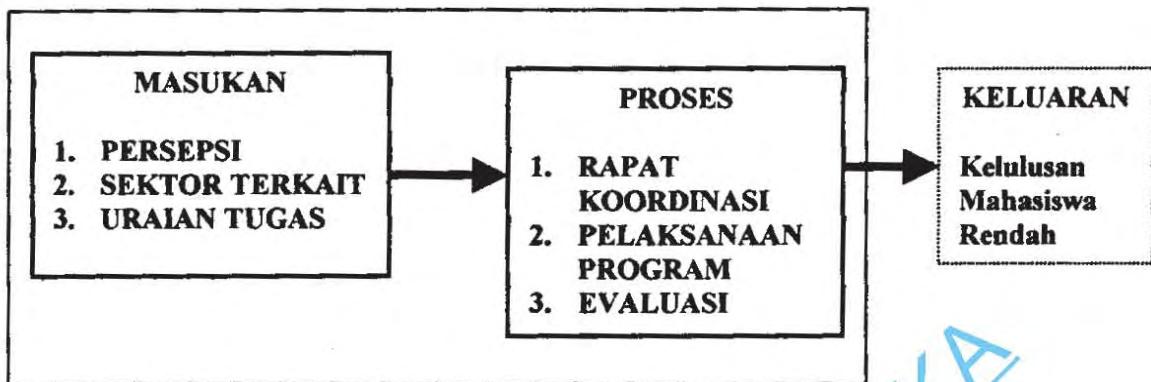
#### **A. Kerangka Pikir**

Rendahnya kelulusan tenaga penyuluhan keluarga berencana yang diberi beasiswa oleh BKKBN untuk mengikuti program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan UT, dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Baik itu faktor internal seperti motivasi belajar, gaya belajar, maupun kebiasaan belajar serta faktor eksternal, seperti lingkungan, fasilitas belajar, maupun kebijakan-kebijakan yang ada.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan kerja sama di bidang PTJJ, yakni Naskah Kerjasama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 – BKKBN No. 267/HK-104/H3/91, tertanggal 30 Oktober 1991. Sejak itu, maka berlakulah seluruh kebijakan kerja sama di bidang PTJJ bagi tenaga PLKB DAN PPLKB, antara BKKBN dengan UT. Hal itu akan berimplikasi terhadap komponen-komponen *input* (masukan) yakni persepsi tentang tujuan kerja sama, sektor terkait, dan uraian tugas masing-masing sektor. Kebijakan tersebut juga berimplikasi terhadap komponen-komponen proses, yakni koordinasi antarsektor terkait, pelaksanaan program dan evaluasi.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dibuat mengacu kepada komponen sistem berdasarkan teori analisis implementasi kebijakan ditunjang dengan teori manajemen dan pengertian koordinasi. Secara skematis kerangka pikir yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

## Kerangka Pikir



Yang diteliti dalam analisis implementasi kebijakan kerja sama di bidang PTJJ

KELUARAN
Kelulusan Mahasiswa Rendah

Tidak diteliti

Analisis implementasi kebijakan kerja sama adalah menganalisis kebijakan yang berlangsung sesudah penandatanganan naskah kerja sama dalam hal ini kerja sama antara BKKBN – UT.

Proses pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi:

1. Koordinasi yang didapat dari suatu pertemuan/rapat koordinasi;
2. Proses pelaksanaan program kerja sama yang berkaitan dengan sistem PTJJ, dalam proses mengajar belajar seperti pemberian tutorial, pengadaan dan

penyampaian bahan ajar ke para mahasiswa hingga pelaksanaan dan pemantauan evaluasi hasil belajar;

3. Evaluasi program kerja sama yang dilakukan per semester sesuai dengan jumlah semester dalam kontrak kerja;

Proses implementasi kebijakan kerja sama ini akan berlangsung jika ditunjang oleh komponen-komponen masukan seperti:

1. Persepsi setiap personel yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja sama tersebut diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap:
  - a. Tujuan kerja sama;
  - b. Struktur organisasi dalam program kerja sama yang melibatkan beberapa sektor;
  - c. Uraian tugas dari masing-masing sektor.
2. Struktur organisasi yang melibatkan sektor terkait dari pusat hingga daerah. Dalam hal ini dari BKKBN Pusat, Balai Diklat BKKBN Propinsi, Kabupaten/kota, UT Pusat dan UPBJJ UT setempat;
3. Setiap sektor terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama UT – BKKBN mempunyai uraian tugas yang jelas dan dijalankan dengan semestinya.

Jika semua komponen-komponen masukan dan proses dilaksanakan dengan semestinya, diharapkan jumlah kelulusan program kerja sama tinggi/meningkat.

## B. Definisi Istilah

### Definisi variabel – variabel penelitian

NO	VARIABEL	DEFINISI	KETERANGAN
	MASUKAN		
1.	PERSEPSI	Adalah proses kognitif setiap informan untuk dapat menerjemahkan dan memahami informasi tim pengelola (BKKBN Pusat, satgas BKKBN Pusat, UT Pusat, dan satgas UT Pusat), tim pembina propinsi/kabupaten/kota yakni (Ka. BKKBN prop./kab./kota, Ka. Balai Diklat BKKBN prop./kabupaten/kota, satgas daerah dan unsur UPBJJ UT setempat) tentang tujuan, sistem PJJ, uraian tugas dari sektor-sektor yang terkait dalam kerja sama ini.	Cara: wawancara mendalam Alat : panduan wawancara Hasil: persepsi terhadap kebijakan dan tujuannya, sistem PJJ, sektor terkait dan uraian tugasnya.
2.	SEKTOR TERKAIT	Adalah unit yang ada di BKKBN Pusat, prop./kabupaten/kota dan UT yang terkait dalam kerja sama UT dan BKKBN.	Cara: wawancara mendalam Alat : panduan wawancara Hasil: jumlah sektor
3.	URAIAN TUGAS	Adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawab mereka yang terkait dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program dan melancarkan tugas bagi staf yang telah ditunjuk dan diberikan beasiswa untuk sekolah. Baik dari BKKBN maupun UT	Cara : wawancara mendalam Alat : panduan wawancara Hasil: keberadaan dokumen uraian tugas sektor terkait.

*Lanjutan ....*

NO	VARIABEL	DEFINISI	KETERANGAN
4.	<b>PROSES</b> <b>RAPAT KOORDINASI</b>	Adalah pertemuan yang diadakan khusus antara UT dengan satgas BKKBN Pusat dan seluruh sektor terkait lainnya setiap semester untuk melihat kemajuan akademik mahasiswa yang diberikan beasiswa.	Cara: wawancara mendalam Alat: panduan wawancara Hasil: frekuensi dan kontinuitas
5.	<b>PELAKSANAAN PROGRAM</b>	Adalah jalannya program kerja sama yang berbentuk program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, berupa penerimaan mahasiswa, penyampaian/pengiriman bahan ajar, pelayanan bantuan belajar, dan penyelenggaraan hasil belajar.	Cara: wawancara mendalam Alat: panduan wawancara Hasil: rangkaian kegiatan PS D-3 Kom. Peny. dan hambatannya.
6.	<b>EVALUASI</b>	Adalah suatu proses komparatif yang bertujuan untuk membandingkan hasil akademik para mahasiswa kerja sama per semester.	Cara: wawancara mendalam Alat: panduan wawancara Hasil: keberadaan dokumen



## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran hasil analisis implementasi kebijakan kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) antara BKKBN dengan UT yang dituangkan dalam naskah kerja sama UT No. 6746/PT45.5/T/1991 – BKKBN No. 287/HK-104/H3/91 tertanggal 30 Oktober 1991.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor BKKBN Pusat, kantor BKKBN propinsi/kabupaten/kota DKI Jakarta dan Bogor, balai diklat BKKBN DKI Jakarta, Kota Bogor, serta Universitas Terouka berikut UPBJJ UT Jakarta dan Bogor.

#### **C. Informan**

Informan untuk penelitian ini ditentukan secara purposif sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yaitu:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan DIKLAT Pegawai BKKBN Pusat
2. Kepala Seksi Perencanaan DIKLAT BKKBN Pusat
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BKKBN
4. Dekan FISIP UT

5. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
6. Satgas BKKBN Pusat
7. Satgas BKKBN Kota Bogor
8. Satgas UT Pusat
9. UPBJJ UT DKI Jakarta
10. UPBJJ UT Bogor
11. Mahasiswa kerja sama BKKBN - UT

#### **D. Instrumen Penelitian**

1. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.
2. Instrumen lainnya adalah pedoman wawancara yang dilengkapi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.
3. Panduan diskusi kelompok terarah .
4. Dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat, maka diperlukan alat perekam suara yang berguna untuk membantu penulisan laporan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan-informan dengan dibantu instrumen pedoman wawancara dan alat perekam;

2. Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dengan menggunakan panduan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) terhadap dua (2) kelompok mahasiswa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, yaitu kelompok mahasiswa yang lulus dengan cepat dan tepat dan yang belum lulus (tahun 2000), masing-masing kelompok berjumlah minimal enam (6) orang.

## F. Jenis Data yang dikumpulkan

### 1. *Data primer yakni data yang terdiri dari:*

#### a. Komponen Masukan

- 1) Persepsi tentang hal-hal yang berhubungan dengan: kebijakan peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB ke jabatan fungsional di BKKBN dan kebijakan instansi (BKKBN) yang ditindaklanjuti dengan mengadakan kerja sama dengan Universitas Terbuka di bidang pendidikan jarak jauh;
- 2) Dampak kebijakan kerja sama BKKBN – UT terhadap kriteria perekrutan PLKB dan PPLKB;
- 3) Dampak kebijakan kerja sama tersebut terhadap sektor-sektor terkait yang ada di BKKBN maupun UT dalam hal membentuk struktur organisasi pengelolaan kerja sama dan merumuskan uraian tugas masing-masing sektor dan pengalokasian dana.

b. Komponen proses

- 1) Koordinasi antarsektor terkait yang mengelola program kerja sama (Pusdiklat BKKBN, balai diklat BKKBN Propinsi/kota, UPBJJ UT dan UT) dalam hal penelitian ini berbentuk program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan;
- 2) Pelaksanaan program kerja sama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT;
- 3) Evaluasi pelaksanaan program kerja sama per semester.

2. *Data sekunder didapat dari dokumen:*

- a. Naskah Kerja Sama antara BKKBN dengan UT
- b. Surat Perjanjian kerja tentang program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan pada Universitas Terbuka
- c. Pedoman Pelayanan Administrasi
- d. Pedoman tutorial
- e. Pedoman pelaksanaan praktikum
- f. Pedoman pemeriksaan praktikum
- g. Laporan evaluasi per tahun
- h. Laporan-laporan pemantauan

## G. Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dengan wawancara mendalam maupun pemeriksaan dokumen (data sekunder) dilakukan secara keseluruhan sebagai data mentah (*raw data*);
2. Berdasarkan data mentah tersebut dibuat transkrip wawancara mendalam;
3. Transkrip wawancara mendalam direduksi ke dalam bentuk matriks;
4. Mengkatagori data yang mempunyai karakter atau pola yang sama;
5. Interpretasi data hasil penelitian;
6. Pembahasan dilakukan terhadap komponen masukan dan proses hasil penelitian dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu dianalisis sesuai topik atau masalah dan setiap wawancara atau FGD dibagi menjadi berbagai katagori topik. Peneliti membaca hasil wawancara dan mengidentifikasi beberapa topik.

## H. Analisis Data

- Analisis data dengan menggunakan analisis isi;
- Data tersebut dikelompokkan per komponen untuk katagori yang sama sesuai dengan topik yang tertuang dalam pertanyaan dan tujuan penelitian;
- Data dilengkapi dengan telaahan dokumen dan dianalisis, sejak selesai dilaksanakan wawancara untuk menghindari kesalahan karena sifat lupa;

- Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan mewawancari informan yang berbeda.
- Triangulasi metode dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah serta melihat/menelaah data sekunder.
- Triangulasi data dengan pengecekan ulang data hasil penelitian dengan meminta konfirmasi dari informan.

UNIVERSITAS TERBUKA



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kerangka Penyajian**

Pada bab ini disajikan hasil penelitian tentang analisis implementasi kebijakan program kerja sama di bidang pendidikan jarak jauh antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Universitas Terbuka (UT).

Penyajian hasil penelitian dalam bentuk narasi hasil dari wawancara mendalam terhadap informasi yang berkaitan dengan subsansi penelitian meliputi komponen masukan (persepsi, sektor terkait dan uraian tugas) dan komponen proses (koordinasi, pelaksanaan program dan evaluasi). Selain itu juga hasil diskusi kelompok terarah dari dua kelompok mahasiswa program studi D-3 komunikasi Penyuluhan yang digunakan untuk mengecek silang tentang pelaksanaan atau implementasi kebijakan program kerja sama BKKN – UT.

#### **B. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Surat Keputusan Bersama antara BKKBN dengan UT Nomor: 6746/PT.455/T/1991 - 287/HK-104/H3/1991.

Implementasi kebijakan kerja sama antara BKKBN dan UT merupakan pelaksanaan dari surat keputusan bersama (naskah kerja sama) nomor 6746/PT.455/T/1991 – 287/HK-104/H3/1991, surat perjanjian/kontrak kerja tentang program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan pada Universitas

Terbuka nomor 4339a/PT45.5/T/1992 – 187/HK-104/H3/1992 dan perangkat pelaksanaan lainnya. naskah kerjasama ini ditandatangani oleh BKKBN dan UT karena mereka mempunyai tujuan umum yang sama yaitu meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan program dan pelayanan pendidikan dari Diklat BKKBN yang meliputi :

- a. Pengembangan program pendidikan bagi tenaga pegawai BKKBN sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.
- b. Pengembangan pelayanan diklat bagi tenaga BKKBN dalam memanfaatkan program pendidikan yang sudah ada di UT.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi program pendidikan, jenjang D-3 yakni program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan. Sedangkan untuk melaksanakan kerja sama ini, baik pihak BKKBN maupun UT, menunjuk para pejabatnya untuk menjabarkan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan bidang dan atau keahliannya.

Seluruh pembiayaan dibebankan pada anggaran BKKBN serta sumber-sumber dana lainnya. Kerja sama ini dilakukan dalam jangka waktu lima tahun atau sepuluh semester dan dievaluasi sekurang-kurangnya satu tahun.

Pelaksanaan program kerja sama ini dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Berdasarkan naskah kerja sama itulah, maka UT berkewajiban menyiapkan dan atau menyediakan fasilitas dan tenaga tutorial untuk terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pegawai BKKBN. Oleh karena itulah, UT melaksanakan segala kegiatan akademik (penyusunan kurikulum, pengadaan bahan ajar, tutorial, pengadaan dan penugasan praktikum), administrasi (registrasi, distribusi bahan ajar, bahan ujian mandiri, bahan ujian akhir semester) dan pelayanan mahasiswa yang diberikan masukan oleh mitra kerjanya, sedangkan BKKBN melakukan perekrutan pegawainya yang berpendidikan SLTA.

### C. Karakteristik Informan

Informan penelitian berasal dari dua instansi yang bekerja sama, yakni:

1. BKKBN:
  - a. Petugas BKKBN yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya;
  - b. Informan yang bertugas sebagai pengelola program kerja sama.
2. UT:
  - a. Petugas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan suatu program pendidikan yang berjenjang;
  - b. Petugas pengelola program kerja sama;

- c. Mahasiswa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan sebagai peserta program kerja sama yang terkena baik langsung maupun tidak langsung dampak kebijakan kerja sama antara BKKBN dan UT.

**Tabel 5.1 Karakteristik informan penelitian implementasi kebijakan program kerja sama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dan Universitas Terbuka**

NO	KARAKTERISTIK	KODE	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	<b>Kabid. Penyelenggaraan DIKLAT Pegawai BKKBN Pusat.</b>	P1	S2
2.	<b>Kasi. Perencanaan DIKLAT BKKBN Pusat</b>	P2	S2
3.	<b>Kapus. DIKLAT (BKKBN Pusat)</b>	P3	S2
4.	<b>Dekan FISIP UT</b>	P4	S2
5.	<b>Kajur. Ilmu Komunikasi</b>	K1	S2
6.	<b>Satgas BKKBN Pusat (DKI Jakarta)</b>	K2	S1
7.	<b>Satgas BKKBN kabupaten Bogor</b>	K3	S1
8.	<b>Satgas UT Pusat</b>	K4	S1
9.	<b>UPBJJ UT DKI Jakarta</b>	K5	S1
10.	<b>UPBJJ UT Bogor</b>	K6	S1
11.	<b>Mahasiswa*</b>	K7	Tamat SLTA

\* Tidak memadai jumlah kelompoknya, hasil DKT menjadi bahan cek silang (*cross check*) dengan WM.

## D. Hasil Wawancara Mendalam

### 1. Komponen Masukan

#### a. Persepsi

Persepsi informan tentang kebijakan peningkatan jabatan tenaga lapangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yakni Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pengawas PLKB (PPLKB) disambut dengan baik. Oleh karena akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas. Berikut ini pernyataan informan tentang persepsi terhadap kebijakan tersebut:

*“Adanya SK. Menpan no. 107/MENPLAN/1988, membuat pimpinan BKKBN merencanakan perkembangan pendidikan PLKB dan PPLKB, khususnya yang masih SLTA” (F1-Y4).*

Namun ada juga yang tidak mengetahui dengan jelas apa yang melatarbelakangi terjadinya pemberian beasiswa untuk mereka yang ikut pendidikan di Universitas Terbuka, seperti pernyataan informan berikut ini:

*“Kami langsung melaksanakan tugas sebagai satgas, mengetahui sesudah hendak mengevaluasi program kerja sama” (K1-K7).*

Kebijakan peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB menjadi jabatan fungsional diikuti oleh kebijakan instansi (BKKBN) dengan membuat suatu kebijakan kerja sama antara BKKBN dengan UT.

Dipilihnya UT sebagai mitra kerja antara lain karena kemampuan UT untuk menjangkau peserta diklat dalam jumlah besar melalui sistem

belajar jarak jauh maupun adanya jurusan komunikasi. Berikut ini petikan pendapat informan hasil dari wawancara mendalam:

*“Adanya dana dari bank dunia dan APBN, maka direncanakan untuk memberikan PLKB dan PPLKB yang berprestasi dengan sistem pembayaran tahunan atau dimasukkan dari DIP Proyek” (P1 – P3).*

*“ ..... , maka ingin memasukkan mereka ke program studi komunikasi penyuluhan” (P3).*

*“Dipilihnya UT, karena dapat mencapai mahasiswa sampai ke seluruh pelosok Indonesia” (P2).*

*“Untuk menyesuaikan dengan pekerjaan mereka dipilihlah perguruan tinggi (PT) yang mempunyai jurusan komunikasi dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti adanya matakuliah Kesehatan Masyarakat dan Konseling Keluarga Sejahtera” (P4).*

Persepsi informan terhadap suatu kerja sama antarinstansi haruslah mempunyai tujuan yang jelas, ada struktur organisasi yang melibatkan sektor-sektor terkait dari kedua pihak untuk mengelola program kerja sama, berikut uraian tugas untuk masing-masing sektor terkait.

Kebijakan kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak berupa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, terwujud dalam surat keputusan bersama nomor 6746/PT45.5/T/1991 – 287/HK-104/H3/1991 berisi tujuan yang jelas yakni untuk mengembangkan program dan pelayanan Diklat yang meliputi: a) pengembangan program pendidikan bagi tenaga pegawai BKKBN sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan dan 2) pengembangan pelayanan Diklat bagi tenaga pegawai BKKBN dalam memanfaatkan program pendidikan yang sudah ada di Universitas Terbuka. Sedangkan sektor terkait untuk mengelola program berserta

uraian tugasnya tertuang dalam surat keputusan Dekan FISIP UT nomor 01/PT45/KEP/1993 dan surat keputusan intern masing-masing Kantor BKKBN propinsi/kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan di bawah ini:

***“BKKBN Pusat tentunya tidak bisa bergerak sendiri, harus ada jaringan kerjanya yang akan melibatkan bagian-bagian di BKKBN Daerah yang biasa berhubungan tugas secara langsung dengan PLKB dan PPLKB (KTU dan Bag. Kepegawaian)”(P3).***

***“BKKBN Pusat akan berkoordinasi dengan Balai Diklat Propinsi/kabupaten maupun Kanwil BKKBN. Terwonya juga dengan UPBJJ UT (lewat UT sebagai pimpinannya). Selain itu, “Uraian tugasnya tentu telah dijabarkan walaupun untuk melalui juklak dan juknis tetapi lewat adanya panduan-panduan seperti panduan tutorial, panduan belajar efektif di UT atau panduan pemeriksaan praktikum”.(P2).***

Oleh karena uraian tugas tidak diberikan secara utuh dalam suatu juklak atau juknis, maka ada sebagian informan yang merasa kurang jelas, antara lain dikutip seperti berikut ini:

***“Uraian tugas biasanya tertuang dalam petunjuk pelaksana dan teknis. Namun sejauh ini tidak ada transparansi petunjuk pelaksanaan tentang rekrutmen peserta, metode belajar dengan SBJJ, pembagian keuangan, dan sebagainya”(K1).***

#### b. Sektor Terkait

Untuk melancarkan pelayanan pendidikan baik secara administrasi maupun akademik dibentuklah **tim satgas pelayanan administrasi pendidikan** yang diputuskan oleh Dekan FISIP dengan SK no. 01/PT45/KEP/1993 dan disebarluaskan bersama surat edaran dari BKKBN

Pusat ke balai diklat Propinsi/kabupaten, seperti pernyataan beberapa informan yang mengetahui dengan pasti kebijakan ini yakni ...

***“Sektor terkaitnya diatur oleh surat edaran dari BKKBN dan UT, bukan berupa juklak dan teknis, tetapi berupa pembentukan satuan tugas yang diwakilkan oleh KTU atau Kabag Kepagawaian dari Balai Diklat Propinsi/Kkabupaten, sedangkan dari UT dengan UPBJJ UT setempat”.(P3)***

***“Biasanya Pusdiklat mengirimkan surat edaran ke Balai Diklat BKKBN Propinsi, Kanwil BKKBN, penunjukan orang ybs, tergantung SK pimpinan mereka”.(K3)***

Hasil wawancara mendalam dari informan yang melaksanakan program kerja sama ini dari salah satu informan (K2) menyatakan bahwa ia baru mengetahui ada atau tidaknya satgas daerah bila sektor terkait daerah yang bersangkutan memberikan tembusan surat penunjukkan mereka ke UT. Kegiatan mereka diketahui dari penandatanganan sebagai pemeriksa praktikum maupun daftar hadir pemantauan ujian akhir di unit pengujian UT.

### c. Uraian Tugas

Fungsi dan tugas tim pengelola program kerja sama adalah **menyelenggarakan kelancaran** program kerja sama yang berupa program pendidikan dan **mengkoordinasikan** kegiatan program pendidikan tersebut (D3 Komunikasi Penyuluhan), dengan unit-unit terkait baik dari BKKBN sendiri maupun dari UT.

Pemantauan pelaksanaan program kerja sama meliputi: kegiatan belajar mandiri, belajar berkelompok, tutorial, praktikum dan ujian akhir semester maupun penilaian praktikum. Adapun pernyataan informan tentang hal tersebut di atas ialah:

*“Surat edaran pembentukan tim pengelola program kerja sama dikirimkan bersama SK Dekan FISIP UT no. 01/PT45/KEP 1993 telah mencantumkan fungsi dan tugasnya, seperti mengkoordinasi kegiatan program kerja sama guna kelancaran kerja dan memantau pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan belajar mandiri, tutorial, praktikum, penilaian praktikum, dan sebagainya” (P1 – P4).*

Bagi Universitas Terbuka, tugas pelayanan bantuan belajar merupakan tugas yang rutin, dan mungkin merupakan tugas tambahan bagi tim pembina di kantor-kantor BKKBN propinsi/kabupaten/kota dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program studi D3 Komunikasi Penyuluhan, seperti yang dinyatakan oleh informan:

*“Tanpa juklak pun sudah mengetahui tugas pelayanan pendidikan di UT (rutin), hanya tugas untuk sektor terkait dari BKKBN mengetahuinya lewat SK bukan juklak” (K1).*

*“.....paling tidak mengadakan tutorial sesuai dengan dana yang tersedia hingga 8 semester ( $\pm$  1 tahun sekali bukan 1 kali per semester). Evaluasi program berjenjang dari Kabupaten/Kota – Propinsi – Pusat”(K4).*

## 2. Komponen Proses

### a. Koordinasi

Koordinasi dalam suatu organisasi umumnya dilakukan dengan mengadakan rapat atau pertemuan antara pimpinan dengan bawahan

**atau staf pelaksana.** Hal ini dilakukan guna melancarkan jalannya suatu kebijakan atau tugas organisasi tersebut. Hasil rapat tersebut berupa notulen rapat yang sesudahnya (dengan diketahui oleh pimpinan rapat) diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh peserta rapat. Begitu juga halnya dengan kerja sama BKKBN – UT di bidang pendidikan jarak jauh.

Berikut ini pernyataan informan:

*“Koordinasi dilaksanakan dari PUSDIKLAT BKKBN – BKKBN Propinsi/ Kabupaten – Kanwil BKKBN lewat satgas-satgas daerah dan UT Pusat Ke UPBJJ hanya pemberitahuan saja. Direncanakan mengadakan pertemuan koordinasi per semester dengan BKKBN Pusat dan satgas UT Pusat. Koordinasi dengan peserta didik setiap akhir pertemuan mingguan ataupun bulanan”(P1)*

Walaupun koordinasi berjalan lancar sesuai dengan mekanisme koordinasi pertemuan yang ada di Kantor BKKBN propinsi/kabupaten/kota, seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan yaitu ..

*“Koordinasi berjalan lancar walaupun tidak ada pertemuan atau rapat koordinasi secara rutin dengan satgas-satgas daerah”(P2).*

Tetapi bagi informan yang berhadapan langsung dengan peserta didik merasa tidak pernah menerima umpan balik setelah dievaluasi per semesternya. Ada juga yang menyatakan bahwa ...

*“Rapat koordinasi BKKBN Pusat – UT ada, tetapi pertemuan dengan satgas diklat seluruh Indonesia hanya sekali, pada saat mereka rakor di Jakarta. Sedangkan rapat koordinasi UT Pusat – UPBJJ UT tidak pernah ada, karena merasa bahwa UPBJJ tinggal melaksanakan tugas saja dalam pelayanan pendidikan. Kadang surat untuk perlakuan khusus mahasiswa program kerja sama datang terlambat dibandingkan surat dari UT ke Mahasiswa (K2).”*

Hasil wawancara mendalam tentang koordinasi, selain pertemuan berdasarkan mekanisme kerja kantor BKKBN di propinsi, kabupaten ataupun kota, juga bila ada masalah dengan peserta didik seperti yang dinyatakan oleh beberapa informan yakni ...

*“Jika ada masalah dengan pelayanan pendidikan, maka dilakukan rapat tim terpadu BKKBN – UT untuk mengatasi permasalahan, antara lain penyelenggaraan ujian, pengiriman hasil ujian, pembuatan praktikum, pengiriman laporan praktikum, dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan tentang pendanaa”(K3).*

*“Belum pernah ada rapat khusus yang membicarakan koordinasi, antara satgas BKKBN dengan UPBJJ Untuk memberikan informasi tentang pelayanan pendidikan/kesulitan kepada mahasiswa di setiap akhir pertemuan mingguan/bulanan BKKBN Kabupaten. Pertemuan dengan UPBJJ Bogor pada saat pengajuan tutorial 1 semester 2 x”(K4).*

*“Koordinasi dengan satgas BKKBN Pusat – UT Pusat ada (laporan rutin), sedangkan dengan UPBJJ UT Jakarta kadang-kadang”(K5)*

*“Kurangnya komunikasi antara UT Pusat dengan UPBJJ ataupun Diklat BKKBN dengan UPBJJ. Selama kerja sama tidak pernah ada rapat koordinasi baik dari pihak BKKBN maupun dari UT”(K6 –K7).*

Sebagian besar informan menyatakan bahwa ...

*“Pencairan dan pelaporan ada dan biasanya dilampirkan pada saat ada evaluasi per tahunnya, namun kami tidak pernah mendapat laporan terkaitnya” (K1 – K4).*

#### b. Pelaksanaan program kerja sama

Program kerja sama BKKBN – UT berupa program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan sehingga yang dimaksud dengan pelaksanaan program kerja sama adalah pelaksanaan pelayanan pendidikan program kerja sama, seperti:

- 1) Registrasi I dilakukan secara kolektif, yakni memberikan berkas pendaftaran dari balai diklat daerah ke pusat atau kolektif di balai diklat masing-masing, kemudian baru diberikan ke pusat. Mahasiswa tidak aktif sama sekali datang ke UPBJJ setempat. Sedangkan registrasi ulang baru dilakukan oleh mahasiswa secara aktif, mencari tahu ke UPBJJ setempat sebagaimana yang dinyatakan informan di bawah ini

*“Registrasi pertama kolektif selanjutnya melalui satgas daerah....”(P2).*

*“Karena registrasi secara kolektif, maka terjadi salah ketik ataupun kesalahan dalam pengisian agam....”(K1).*

*“Pengisian registrasi I (data pribadi) dilakukan tanpa adanya bimbingan. Pengisian dilakukan secara kolektif....” (DKT DKI Jakarta).*

*“Pengisian registrasi I dilakukan tanpa bimbingan, hanya berpatokan pada katalog sehingga banyak muncul kesalahan karena tidak mengerti cara pengisiannya. Pada saat ujian I, banyak yang terlupakan menulis NIM (Nomor Induk Mahasiswa), karena hanya berpikiran pada modul. Untuk registrasi selanjutnya dilakukan secara kolektif di UPBJJ Bogor....” (DKT Bogor).*

- 2) Pengadaan dan pengiriman modul

Bahan ajar untuk matakuliah baru, harus dibuat dan biasanya ditulis oleh pakar yang bukan berasal dari UT. Hal inilah yang menyebabkan penyusunan modul tertunda sehingga pengiriman bahan ajar terlambat sampai ke mahasiswa, apalagi bahan ajar tersebut tidak

langsung dikirim ke alamat mahasiswa. Beberapa pernyataan informan tentang hal tersebut:

*“..... Pembuatan bahan ajar terlambat mengakibatkan pengiriman bahan ajar terlambat sehingga mahasiswa baru membaca beberapa saat mau ujian. Itu untuk semester pertama semester selanjutnya sudah dapat diatas” (P2).*

*“Pada saat pelaksanaan pertama kali sesudah paket ajaran I, UT tidak siap dalam memenuhi bahan ajar, karena terlambatnya penyelesaian penulisan, belum lagi hambatan pengiriman bahan ajar sehingga mahasiswa maju ujian tanpa belajar.....” (P1).*

*“Pendistribusian modul pada awalnya kacau, karena alamat pengiriman berubah, pertama dikirim ke BKKBN Propinsi, ternyata jumlahnya tidak utuh, dari propinsi ke BKKBN kabupaten baru sampai ke mahasiswa.....”(K2).*

### 3) Pengadaan bantuan belajar

Sistem belajar jarak jauh memungkinkan mahasiswa meminta dan mendapatkan bantuan belajar, dapat berupa tutorial tatap muka atau tertulis, suplemen bahan ajar (berupa pengayaan) ataupun bimbingan akademik lainnya sesuai dengan panduan-panduan yang ada.

*“..... Tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai dengan panduan-panduannya” (P2).*

Tutor biasanya disediakan dari UPBJJ, tetapi jika tidak ada, maka dapat diganti dengan penyuluhan KB yang berpendidikan sarjana, tenaga-tenaga BKKBN di tingkat kabupaten yang berijazah S1 atau tenaga lain yang berpotensi yang terdapat di dalam masyarakat setempat (SK. Dekan FISIP UT no. 01/PT45/Kep/1993).

*“Pada saat pelaksanaan tutorial, satgas selain mengawasi ikut juga memberikannya jika tidak ada yang menutorkan. Tutor biasanya eselon IV dan minimal S1” (K4).*

Ada banyak hambatan yang dapat meniadakan pelaksanaan tutorial, antara lain kondisi geografi, kesibukan kerja ataupun tutor belum memiliki bahan ajar yang akan ditutorialkan.

*“Hanya saja hambatannya adalah pada saat tutorial mahasiswa sulit untuk berkumpul (kondisi dan kesibukan). Tutor tidak mendapat modul hanya ringkasan modul yang dibuat oleh satgas BKKBN Pusat” (P3 dan P4).*

- 4) Evaluasi hasil belajar di UT dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS) dan mengisi tugas mandiri (TM). Nilai TM akan membantu nilai akhir, tetapi banyak mahasiswa yang tidak mengerjakannya seperti pernyataan beberapa informan di bawah ini:

*“TM dikerjakan secara bersama-sama tanpa ada pembimbingan dalam mengerjakannya. Kurang penjelasan, menyebabkan 80% tugas mandiri tidak dikirim. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mahasiswa bahwa TM tersebut berpengaruh pada nilai akhir mereka” (DKT Bogor).*

Tetapi ada juga mereka yang mengerjakan TM seperti berikut ini:

*“Evaluasi belajar terdiri dari tugas mandiri (TM) dan UAS. Kami selalu mengisi TM karena dirasakan sangat bermanfaat untuk menguasai modul” (DKT DKI Jakarta).*

Pelayanan administrasi dari evaluasi hasil belajar adalah pengiriman nilai ujian yang sering tidak tepat waktu.

*“DNU diterima mahasiswa 2-3 bulan setelah ujian (tergantung wilayah), karena DNU tersebut tidak langsung ke alamat mahasiswa*

*per bundel ke BKKBN Pusat, Propinsi, Kabupaten dan akhirnya mahasiswa” (K2).*

*“Nilai ujian sering terlambat, kadang mendekati batas registrasi sehingga terkadang matakuliah yang telah lulus diregistrasi kembali.”(DKT Bogor)*

### c. Evaluasi program kerja sama

Setiap pelaksanaan suatu program kerja sama sebaiknya dilakukan evaluasi program untuk mengetahui efisiensi program, hambatan-hambatannya dan kebijakan apa yang akan dikeluarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Program kerja sama BKKBN – UT dievaluasi setiap semester, hanya laporannya ditulis per tahun. Hasil laporan dikirimkan ke BKKBN Pusat untuk dideseminaskan ke sektor terkait dalam kerja sama ini. Salah satu cara untuk mengevaluasi program kerja sama ini adalah dengan memantau pelaksanaan UAS setiap semester seperti pendapat informan ....

*“Kami merencanakan evaluasi per semester sesudah pemantauan UAS karena menerima data langsung dari lapangan, tetapi karena beberapa hal laporan evaluasi dibuat per tahun Isi laporan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan seperti registrasi, pengiriman modul, tutorial, UAS; hasil ujian semester I; penyempurnaan pelayanan pendidikan untuk semester II melalui pembinaan kembali dan pemberian tutorial, hasil semester II, pandangan peserta terhadap program studi, intervensi apa yang akan diberikan lebih lanjut agar mahasiswa termotivasi untuk menempuh UAS.*

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan-informan satgas pusat (BKKBN dan UT) dan daerah (DKI Jakarta dan Bogor) menyatakan sebagai berikut:

*“Dilakukan per tahun atau 2 semester. Pertama dengan menyebar angket, kemudian observasi langsung ke mahasiswa. Satgas ditanya-kan juga tentang pelayanan pendidikan, kemudian membuat laporan. Solusi yang dilakukan biasanya hanya yang terlihat, misalnya nilai ujian kurang memuaskan, diberikanlah tutorial. DNU terlambat, dikirim lagi langsung ke mahasiswa. Tetapi tidak ada suatu kebijakan untuk memotivasi peserta untuk giat belajar (misalnya diberikan ijin untuk meninggalkan tugas pada saat atau menjelang UAS) memberikan tip-tip belajar efisien di UT sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh UT” (K1).*

*“Laporan evaluasi I dibuat pada saat selesai semester 1 dan 2. Laporan evaluasi II, untuk semester 3, 4, 5, dan 6. Selain laporan evaluasi, juga dilakukan penelitian tentang cara belajar mereka dan hambatan-hambatan yang ada di mahasiswa, kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut, tidak alanya motivasi pada diri mahasiswa karena proses rekrutmenya ditentukan berdasarkan kemauannya sendiri, tidak memahami/marpu jika belajar sendiri” (K2).*

*“Evaluasi mahasiswa setiap saat dan berjenjang dari kabupaten – propinsi – provinsi. Tidak pernah ada evaluasi penyelenggaraan tutorial seperti PGSD”(X4).*

*“Secara instansi yaitu UPBJJ tidak pernah mengevaluasi program kerja sama yang ada di UT, hanya satgas dari pusat dari program kerja sama yg yang melakukannya dan tidak pernah mendapat laporan evaluasi terulis dari program-program yang merupakan suatu kerja sama” (K7).*



## BAB VI

### PEMBAHASAN

#### A. Kerangka Penyajian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada bab ini akan dibahas tentang implementasi kebijakan pendidikan di bidang perguruan tinggi jarak jauh antara BKKBN – UT yang ditinjau dari pendekatan sistem yang meliputi aspek masukan, proses dan keluaran, di mana aspek keluarannya adalah rendahnya jumlah kelulusan mahasiswa program kerja sama tersebut.

Kemudian, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program kerja sama di bidang pendidikan jarak jauh dilakukan analisis isi (*content analysis*) dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pemeriksaan dokumen. Diskusi Kelompok Terarah (DKT) peserta program studi D3 Komunikasi Penyuluhan dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan dengan lancar dan benar.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan teori - teori pada tinjauan pustaka serta hasil penelitian dengan topik serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Pada bab pembahasan ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan penelitian yakni bagaimana suatu kebijakan menjalankan sistem yang terdiri dari komponen masukan dan proses sehingga menghasilkan keluaran yang maksimal. Bagaimana suatu kebijakan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses sehingga menghasilkan jumlah lulusan yang maksimal.

## A. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Informasi yang digali oleh peneliti hasilnya sangat dipengaruhi oleh persepsi informan terhadap substansi pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada saat dilakukan wawancara mendalam;
2. Peserta diskusi kelompok terarah tidak mencukupi jumlahnya untuk dibagi dua, karena yang hadir kebanyakan yang lulus dalam satu penelitian sehingga hasil diskusi tersebut hanya dijadikan pengcekl (cross check) dari wawancara mendalam terhadap tim pengelola program kerja sama;
3. Pada saat penelitian, masa kerja sama BKVBN – UT telah lewat, karena terjadi antara tahun 1991 – 2000 (lebih dari 8 semester) sehingga ada beberapa data sekunder yang tidak dapat dilacak lagi.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Komponen masukan

#### a. Persepsi

Persepsi menurut Robbins (1996), didefinisikan sebagai suatu proses dengan individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Bagaimana pun apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang obyektif. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap,

motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi, karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas itu, bukan mengenai realitas itu sendiri;

Persepsi ini merupakan proses kognitif yang kompleks yang dapat memberikan gambaran yang unik tentang dunia yang sangat berbeda dengan realitasnya. Pengenalan adanya perbedaan antara dunia dalam persepsi dan dunia dalam kenyataan penting, artinya dalam konsep perilaku organisasi (Muchlas, 1994).

Tujuan adanya kebijakan kerja sama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dan UT adalah untuk mengembangkan program dan pelayanan pendidikan meliputi: 1) pengembangan program pendidikan bagi tenaga pengawas BKKBN sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan dan 2) pengembangan pelayanan diklat bagi tenaga pengawas BKKBN dalam memanfaatkan program pendidikan yang sudah ada di Universitas Terbuka (Naskah Kerja sama antara BKKBN – UT nomor:6746/PT.455/T/1991 – 287/HK-104/H3/1991).

Sebagian besar pelaku (*stake holder*) kebijakan tersebut mempunyai persepsi yang sama yaitu ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan PLKB dan PPLKB melalui UT, karena: 1) sistem jarak jauh yang dimiliki UT untuk menjangkau peserta diklat dalam jumlah besar; 2)

pemberian gelar formal yang melekat pada kedudukan UT sebagai universitas negeri dan adanya jurusan komunikasi.

Persamaan persepsi ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain pelaku persepsi, target dan situasi (Robbins,1996). Pelaku persepsi yang dimaksud adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh informan sudah mempunyai **persepsi yang sama** -walaupun waktu untuk mengetahui adanya kebijakan kerja sama tidak bersamaan-, tentang adanya **kebijakan kerja sama antara BKKBN – UT**, karena adanya kebijakan dalam institusi BKKBN untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan penyuluhan lapangannya (PLKB dan PPLKB). Hal tersebut terkait dengan adanya kebijakan MENPAN untuk meningkatkan profesi PLKB dan PPLKB melalui ijenjang jabatan fungsional (Suyono, Naskah Pidato Pembukaan Program Kerja sama, Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, 30 Oktober 1991).

Menurut pendapat peneliti, sumber daya manusia adalah asset yang terpenting dalam suatu organisasi. Agar organisasi mencapai tujuannya, salah satu cara adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilannya. Adanya surat keputusan MENPAN, merupakan rangsangan untuk lebih memotivasi mereka mengikuti program pendidikan jarak jauh.

Seluruh informan yang telah diwawancara secara mendalam, sudah mengetahui **sektor-sektor yang terkait**, yang tergabung dalam pelaksanaan program kerjasama BKKBN – UT yang berupa program studi D3 Komunikasi Penyuluhan. Mereka **berpersepsi sama** dan **memahami** bahwa keberadaan sektor-sektor tersebut sangat penting, karena dua organisasi yang bekerja sama, tidak bisa bekerja bila tanpa dibantu oleh sektor atau unit lain.

Menurut pendapat peneliti, suatu organisasi yang telah membentuk suatu jaringan kerja memang harus memiliki suatu tim kerja yang terkoordinasi. Dan tim kerja yang terbentuk ini harus dievaluasi untuk mengetahui pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

#### Persepsi atas uraian tugas

Berdasarkan hasil wawancara mendalam sebagian besar informan menyatakan bahwa uraian tugas masing-masing sektor terkait jelas, walaupun tidak tertuang dalam petunjuk pelaksanaan secara utuh, tetapi berupa pedoman atau panduan yang terpisah – pisah seperti: Panduan Pelayanan Administrasi, Buku Panduan Tutorial dan Pengalaman Lapangan Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan maupun Panduan Praktikum (baik untuk mahasiswa maupun instruktur).

Menurut peneliti, uraian tugas yang rinci tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik

pula. Oleh karena, uraian tugas tersebut hanya merupakan pikiran di atas kertas kerja sampai saat tim pengelola, tim pembina dan satgas menerapkannya melalui komunikasi.

*b. Sektor Terkait*

Berdasarkan telaah dokumen, diketahui adanya pembentukan tim pembina di kantor BKKBN seluruh propinsi, kabupaten maupun kota. Tim ini terdiri dari unsur BKKBN dan UPBJJ UT setempat. Hal tersebut tercantum dalam surat keputusan nomor 01/PT/45/KEP/1993 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Studi D3 Komunikasi Penyuluhan Universitas Terbuka yang menetapkan pembentukan tim pengelola dan tim pembina propinsi serta kabupaten/kota.

Tim pengelola terdiri dari pihak BKKBN (PUSDIKLAT BKKBN) dan UT. Sedangkan tim pembina propinsi dan kabupaten terdiri dari:

- 1) tim pembina di tingkat propinsi dipimpin oleh Kepala BKKBN propinsi dibantu oleh unsur operasional, unsur diklat BKKBN dan unsur UPBJJ UT setempat;
- 2) tim pembina di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala BKKBN kabupaten/kota dibantu oleh unsur operasional, unsur penunjang dan tutor.

Walaupun struktur organisasi tim pengelola dan pembina ini jelas, banyak peserta didik yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsinya

untuk membantu mereka dalam mengikuti program pendidikan kerja sama ini (hasil DKT DKI Jakarta dan Bogor).

Menurut peneliti, struktur tim pembina di propinsi maupun kabupaten/kota cukup jelas dan tidak terlalu panjang. Penyusunan tim pembina tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keputusan intern mereka (BKKBN propinsi/kabupaten/kota). Susunan ini memang dilaporkan ke tim pengelola (BKKBN dan UT Pusat), namun tidak diinformasikan kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui dan jika ada permasalahan dapat menghubungi langsung untuk memperoleh pemecahannya.

#### c. *Uraian Tugas*

Berdasarkan hasil pencarianan dokumen yaitu naskah kerjasama BKKBN – UT pasal 4 tercantum kewajiban pihak UT dan BKKBN. BKKBN berkewajiban menyiapkan peserta didik dan membantu menyiapkan fasilitas lain yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan UT wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik yang berasal dari BKKBN sebanyak 3000 PLKB dan 650 tenaga perencana di tingkat kabupaten serta menyiapkan fasilitas dan tenaga tutorial.

Peneliti berpendapat bahwa kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada instansi yang bekerja sama (BKKBN

menyediakan peserta didik dan UT menyiapkan seluruh fasilitas proses pemebelajaran), walaupun jumlah peserta didik yang mengikuti ujian akhir semester kurang dari 3650 orang.

Menurut data dari pusat komputer UT, peserta didik yang meregristrasi pada tahun 1992 semester kedua (92.2) adalah 1.475 orang dan pada masa registrasi 93.1 sebanyak 1.507 orang.

Adapun fungsi dan tugas tim pengelola program antara lain mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kerja sama dan tutorial serta memberikan umpan balik hasil pemantauan tersebut kepada tutor. Dengan demikian tutor dapat mengetahui baik buruk cara dan hasil dari pemberian tutorialnya.

Peneliti nerpendapat bahwa fungsi dan tugas tim pengelola program kerja sama sudah cukup jelas, karena hal ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada, namun semua hasil rapat koordinasi dan pemantauan tidak dikomunikasikan kembali ke tim pembina atau satgas BKKBN propinsi/kabupaten/kota sehingga mereka mengetahui kinerja dan kelemahannya yang berasal dari pendapat para peserta didik.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada table 6.1.

**Tabel 6.1 Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program kerja sama BKKBN – UT (Program Studi D-3 Komunikasi Penyaluhan)**

NO	KEGIATAN	BKKBN	UT	INSTANSI LAIN
1.	Penyelenggaraan peserta didik	✓	-	-
2.	Penyelenggaraan akademik	-	✓	-
3.	Penyusunan kurikulum	✓	✓	✓
4.	GBPP Buku Materi Pokok (BMP)	✓	✓	✓
5.	Penulisan modul-modul	✓	✓	✓
6.	Penelaahan modul-modul	✓	✓	-
7.	Penerbitan modul-modul	-	✓	-
8.	Pendistribusian BMP	-	✓	-
9.	Registrasi	-	✓	-
10.	Penyiapan tutor	✓	✓	✓
11.	Tutorial	✓	✓	-
12.	Praktikum	✓	-	-
13.	Pembinaan kelompok belajar	✓	✓	-
14.	Penilaian Tugas Mandiri	-	✓	-
15.	Penulisan soal ujian	✓	✓	✓
16.	Penyelenggaraan ujian	-	✓	-
17.	Penilaian ujian	-	✓	-
18.	Pemberian nilai akhir	-	✓	-
19.	Pemberian ijazah	-	✓	-

Kegiatan-kegiatan tersebut akan berjalan efektif jika dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan efektif pula. Koordinasi menurut Stoner & Wankel (1986), adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien. Koordinasi juga menyeimbangkan dan mengeratkan tim, dengan memberikan alokasi kegiatan bekerja yang sesuai kepada masing-masing anggotanya, serta

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya antara para anggota itu sendiri. Sedangkan komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi dalam beberapa cara. Jika peserta didik diminta untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sama BKKBN – UT, maka hal tersebut merupakan contoh salah satu fungsi komunikasi yang sedang menjalankan fungsi kontrol.

Scott dan T.R. Mitchell dalam Ibrahim, 2001 menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi, yakni **fungsi kendali** (kontrol atau pengawasan), **motivasi**, **pengungkapan emosional** dan **informasi**.

## 2. Komponen proses

### a. Koordinasi

Koordinasi merupakan upaya menciptakan perpaduan gerak organisasi ke arah suatu sasaran yang sama agar dapat tercipta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan bersama.

Atmosudirjo (1979) berpendapat bahwa peluang koordinasi adalah membuat segala sesuatu, terutama sektor-sektor terkait berjalan secara serempak, terpadu dan sinkron (serasi). Untuk itu diperlukan rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berkala. Rapat koordinasi

merupakan suatu wadah agar para anggota dari suatu organisasi dapat berhubungan satu sama lain untuk berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa informan menyatakan bahwa ada rapat koordinasi satu tahun dua kali, bisa lebih jika ada kasus seperti pergantian mahasiswa yang diberi beasiswa ataupun penggantian tutor. Informan lain berpendapat bahwa ada rapat koordinasi antara BKKBN Pusat dengan UT, tetapi rapat dengan satgas diklat di seluruh Indonesia hanya satu kali. Ada pula informan yang mengatakan bahwa ada rapat koordinasi dalam satgas BKKBN pusat dengan UT, tetapi hanya kadang-kadang saja rapat dengan UPBJJ, bahkan ada juga informan yang berpendapat lebih ekstrim ialah bahwa selama kerja sama ini berlangsung belum sekalipun ada rapat koordinasi, hanya ada instruksi-instruksi secara langsung atau lisan.

Dari hasil diskusi kelompok terarah (DKT Bogor), informan mengatakan bahwa pengkoordinasian antara satgas dengan UPBJJ tidak lancar, hanya satu kali dalam delapan semester, sedangkan dari UT Pusat sebanyak dua kali untuk mengevaluasi proses belajar.

Peneliti berpendapat bahwa rapat koordinasi sebenarnya cukup per semester (dua kali dalam satu tahun), kecuali ada kasus-kasus yang harus segera diselesaikan. Koordinasi yang terpenting adalah koordinasi antara tim pembina propinsi/kabupaten/kota dengan peserta didik dan UPBJJ.

Pertemuan koordinasi tim pengelola dengan peserta didik sudah dilakukan melalui mekanisme kerja yang sudah ada yaitu pertemuan-pertemuan ...

- 1) mingguan di tingkat desa bagi PLKB'
- 2) bulanan pada tingkat kecamatan bagi para PLKB;
- 3) bulanan pada tingkat kawedanaan bagi PLKB dan PPLKB;
- 4) konsultasi tiap bulan pada tingkat kabupaten bagi para pengawas yang datang dari kecamatan (Suyono, 1991)

Namun demikian, pembicaraan tentang pendidikan jarak jauh selalu diagendakan terakhir sehingga kondisi peserta didik dalam kondisi "lelah pikiran". Akibatnya, baik bagi pemberi informasi maupun penerimanya hanya mengeluarkan masalah secara garis besar, tidak rinci sehingga tidak dapat diselesaikan pada saat itu juga. Dengan perkataan lain sering tertunda dan tidak tuntas (hasil DKT Bogor).

Diharapkan dalam pertemuan tersebut tim pembina memfasilitasi kendala yang dihadapi oleh para peserta didik seperti:

- 1) tutor yang tidak menguasai bahan ajar;
- 2) peserta yang berbeda persepsi tentang fungsi tutorial;
- 3) kesulitan dalam memahami panduan praktikum;
- 4) kesulitan mendapatkan orang yang dapat membimbing dalam pembuatan praktikum;
- 5) tidak diterimanya modul dan panduan praktikum;

6) keterbatasan waktu untuk membuat tugas praktikum

Hasil pertemuan dengan peserta didik tersebut, setelah dicatat dan dilaporkan ke pusat (pusdiklat BKKBN dan UT) dan UPBJJ UT setempat agar dicarikan pemecahan masalahnya hendaknya setelah itu dikomunikasikan kembali ke peserta didik.

*b. Pelaksanaan Program.*

Setelah ditandatangani surat keputusan bersama nomor: 6746/PT,455/T/1991 – 287/HK – 104/H3/1991, maka masing – masing instansi memulai kewajibanya seperti pada tabel 6.1.

Program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan berjalan seperti layaknya program studi – program studi lainnya, yang membedakannya adalah peserta didik yang khusus untuk PLKB dan PPLKB (tidak untuk umum) dan muatan kurikulum. Program ini telah berakhir pada tahun 2002 dengan masih menyisakan peserta didik PLKB dan PPLKB. 1043 orang yang belum lulus.

Selain itu yang berbeda dalam penanganannya adalah: proses rekrutmen peserta didik, registrasi pertama, pemberian bantuan belajar, praktikum dan pembinaan untuk meningkatkan motivasi belajar PLKB dan PPLKB.

1) Rekrutmen peserta didik

Berdasarkan data sekunder yang ada (laporan penyelenggaraan program kerja sama D-3 Komunikasi Penyuluhan tahun 1995), pengiriman peserta didik ke UT berdasarkan tahun anggaran seperti yang terlihat pada tabel 6,2 di bawah ini.

**Tabel 6.2 Distribusi peserta didik program kerja sama BKKBN – UT**

NO	TAHUN ANGGARAN	PESERTA	VOLUME
1.	1992 - 1993	1.500	1.500
2.	1993 – 1994	1.500	3.000
3.	1994 - 1995	-	3.000
4.	1995 - 1996		3.000

Berdasarkan telaah dokumen, seluruh PLKB dan PPLKB yang belum sarjana diwajibkan untuk ikut program kerja sama BKKBN – UT. Hal itu diketahui oleh semua PLKB dan PPLKB dengan adanya surat edaran ke propinsi dan kemudian dari propinsi ke kabupaten/kota. Pemilihannya didasarkan pada kebijakan masing - masing daerah.

Hasil DKT Bogor menyatakan bahwa peserta didik ditunjuk oleh atasan mereka sehingga mereka pun tidak mengetahui bagaimana proses penyeleksianya.

Tetapi hasil DKT Jakarta menyatakan bahwa peserta didik diseleksi berdasarkan prestasi kerja yaitu dengan melihat DP3 dan

jumlah akseptor yang dihasilkan. Tidak diadakan ujian khusus tertulis untuk pemilihan peserta didik.

Menurut pendapat peneliti, program kerja sama BKBN – UT yang berbentuk program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, sudah melalui analisis kebutuhan untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas PLKB dan PPLKB, karena adanya muatan kurikulum yang disesuaikan dengan pengalaman dan keterampilan mereka, juga sikap dan motivasi pribadi mereka.

Oleh karena itu, perekutan harus terbuka, antara lain dengan cara menjelaskan tentang ..

- a) peningkatan jabatan fungsional PLKB dan PPLKB dengan jenjang pendidikan minimal D3 di BKBN;
- b) pemberian beasiswa bagi mereka yang belajar di UT;
- c) kemudahan dan kesulitan belajar di UT sebagai salah satu perguruan tinggi negeri seperti penjelasan tentang:
  - c.1. Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) yaitu: suatu sistem belajar di mana siswa dan pengajar terpisah dalam ruang dan waktu, memanfaatkan bahan belajar yang dirancang dan diproduksi secara sistematis, adanya komunikasi yang tidak terus menerus antara siswa dengan pengajar, tutor, dan program pendidikan melalui beragam media serta adanya penyeliaan dan pemantauan yang intensif dari suatu program pendidikan.

c.2. Belajar mandiri bukanlah belajar sendiri yang tidak memerlukan interaksi/komunikasi dua arah di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena dalam SBJJ ada:

- Komunikasi satu arah yang harus dimanfaatkan secara maksimal yaitu bahan ajar baik dalam bentuk tercetak, terekam maupun tersiar ;
- Komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan institusi termasuk tutor atau dosen maupun antarsiswa .

c.3. Keberhasilan proses belajar mengajar pada pendidikan jarak jauh adalah dengan berkomunikasi secara efektif bagi semua pihak yang terlibat, baik itu siswa, pengajar/tutor, pihak-pihak lain yang menunjang terlaksananya program kerja sama itu

c.4. Pembagian waktu belajar atau membuat strategi belajar dengan pekerjaan mereka.

## 2) Registrasi

Registrasi adalah pendaftaran data pribadi dan matakuliah yang diambil pada suatu masa registrasi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, registrasi pertama dilakukan secara kolektif, selanjutnya diserahkan kepada satgas daerah untuk dikirimkan ke BKBN pusat dan selanjutnya ke UT.

Hasil DKT Bogor juga menyatakan hal yang sama yaitu pengisian registrasi pertama dilakukan tanpa pembimbingan, hanya berpatokan pada katalog, sehingga banyak muncul kesalahan karena ketidakmengertian cara pengisian.

Hasil DKT Jakarta juga menyatakan bahwa registrasi pertama dilakukan tanpa adanya bimbingan pengisian. Pengisian dilakukan secara kolektif.

Berdasarkan telaah dokumen, yaitu Panduan Pelayanan Administrasi untuk registrasi, pengiriman modul, tutorial, dan ujian semester:

“Registrasi pertama dilakukan oleh BKKBN pada saat menyerahkan daftar calon peserta didik dalam bentuk keputusan Kepala BKKBN nomor 165/HK-010/H3/92, tertanggal 24 Juni 1992 (untuk memperoleh amplop/berkas formulir pendaftaran I). Kemudian pengisian formulir registrasi pertama (data pribadi) dilakukan oleh PLKB dan PPLKB sesuai dengan dokumen Petunjuk Khusus Pengisian Berkas Registrasi Pertama Calon Mahasiswa D-3 Komunikasi Penyuluhan yang telah disampaikan kepada setiap PLKB dan PPLKB bersamaan dengan pengiriman paket modul untuk semester I”.

Pada kenyataannya banyak data pribadi mereka yang salah dan diketahui ketika mereka hendak yudisium. Kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan agama (Kristen Protestan dengan Katolik) atau berganti agama, penulisan nama, tempat dan tanggal lahir.

Menurut peneliti, jika kesalahan tersebut diketahui sejak awal, misalnya pada saat ujian tidak ada naskah atau kehabisan naskah soal ujian untuk agama yang bersangkutan, langsung melapor kepada pengawas ujian, dan kemudian dikomunikasikan dengan cepat ke UT pusat, maka hal tersebut tidak akan terjadi, seperti yang telah disarankan dalam buku panduan:

“.... Jika terjadi kesalahan dalam pengisian registrasi, PLKB dan PPLKB harus segera menyampaikan susulan koreksi kepada Dekan FISIP UT, jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, Kotak Pos 23/CPAPC, Ciputat, 15418”

### 3) Bantuan belajar

Salah satu bentuk layanan bantuan mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah layanan akademik berupa tutorial. Tutorial dilakukan baik secara tatap muka maupun secara tertulis.

Tutorial tatap muka dilakukan oleh BKKBN bekerja sama dengan (Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh/UPBJJ) yang berada di setiap propinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan telaah dokumen, pelaksanaan tutorial di setiap daerah berbeda tergantung pada karakteristik daerah masing-masing. Ada daerah-daerah tertentu yang melakukannya dengan cara mengumpulkan mahasiswa di propinsi dua hari menjelang ujian akhir semester dan ada daerah yang melakukan secara rutin di tingkat kecamatan atau kabupaten. Hal ini terjadi karena lokasi pekerjaan mereka saling berjauhan sehingga sulit

mengumpulkan mereka di tempat (hasil wawancara mendalam). Sedangkan hasil DKT Bogor menyatakan bahwa tutorial dilakukan di kecamatan atau kabupaten adalah untuk mengatasi hambatan transportasi, atau diadakan di tempat peserta didik yang terdekat, untuk itu peserta didik mengadakan iuran untuk tranportasi tutor.

Peneliti berpendapat bahwa agar para PLKB dan PPLKB yang pada hari-hari biasa bekerja di sore dan pada malam harinya harus belajar di rumah/tempat lain, maka agar proses belajar tetap berjalan, mereka perlu dibantu oleh tutor.

Tutorial tertulis telah dilakukan beberapa kali dengan jenis penyajian yang berbeda-beda yakni berupa rangkuman modul, kumpulan latihan soal-soal dan pengayaan modul. Media yang dipakai dalam kegiatan tutorial tertulis pun ada dua macam, yang pertama disajikan melalui media massa seperti tabloid “Kiat Sehat” (tabloid yang diterbitkan atas kerja sama dengan pihak BKKBN), Mitra Desa (untuk mahasiswa Jawa Barat) dan yang kedua dengan mengirimkan tutorial tertulis langsung ke mahasiswa melalui kecamatan di mana mereka berdinas.

Hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa tutorial melalui media massa, sering terlambat dan isinya sering berbeda dengan apa yang terdapat di dalam modul.

Mahasiswa dapat merespon atau mengeluhkan permasalahannya melalui surat, telepon atau datang ke kantor UT Pusat atau UPBJJ. Pemanfaatan media ini pun dapat digunakan oleh mahasiswa tidak hanya untuk mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan materi perkuliahan, tetapi juga masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam proses belajar dan yang bersifat administratif.

Berdasarkan hasil DKT diketahui bahwa tutorial pernah dilakukan dengan permintaan untuk dicarikan tutor, tetapi hasilnya tutor terlihat kurang menguasai bahan dan tidak membantu pemahaman terhadap modulnya. Akhirnya, pemahaman terhadap modul dilakukan secara berdiskusi sesama mahasiswa, di mana salah satu bertindak sebagai pengajar.

Tutorial tidak sama dengan kuliah tatap muka, karena tujuannya adalah untuk elaborasi konsep-konsep esensial yang sulit dipahami dalam proses belajar sendiri. Oleh karena tutorial mengacu pada materi ajar, maka tutorial harus dilakukan oleh tutor yang ahli di bidang ilmu yang sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan. Selain tutorial dianjurkan juga membentuk kelompok belajar sesuai dengan keperluan.

#### 4) Praktikum

Berdasarkan Kepmen Dikbud nomor 056/U/1964, menyatakan:

“ .... Menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun tidak rutin secara mandiri, mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan serta mempunyai keterampilan manajerial”..

maka isi program D3 harus dapat mencerminkan keragaan hasil didik sehingga dapat menyeimbangkan secara proposisional antara penguasaan nilai kognitif, afektif dan psikomotorik.

Begitu pula dengan program studi D3 Komunikasi Penyuluhan untuk memanfaatkan penguasaan materi suatu matakuliah, para peserta didik diharuskan melaksanakan praktikum.

Telaah dokumen menyatakan bahwa kegiatan praktikum dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tutorial tatap muka di bawah bimbingan dan pengawasan para tutor ataupun PLKB dan PPLKR yang berpendidikan S1.

Berdasarkan hasil DKT, praktikum dikerjakan sendiri tanpa adanya pembimbing. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa pembimbingan pembuatan praktikum diambil dari rekan-rekan yang berpendidikan S1 di BKKBN propinsi/kabupaten/kota berikut pula pembuatan makalah atau laporannya.

Praktikum (sesuai dengan matakuliah yang dipraktikumkan) dilakukan sesuai dengan panduan praktikum yang diperuntukan bagi mahasiswa dan instruktur. Setelah itu mereka membuat laporan praktikum ke UT Pusat untuk dinilai sesuai dengan rambu-rambu penilaian yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak mengirimkan laporan praktikum, maka nilai UAS tidak dapat dikeluarkan.

### 5) Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat belajar dengan baik sambil bekerja. Berdasarkan telaah laporan evaluasi program studi D3 Komunikasi Penyuluhan semester I dan II, pembinaan ini dilakukan selama delapan semester, terlebih pada semester awal (semester 1 dan 2).

Pembinaan tersebut antara lain:

- a) Memantau mahasiswa agar dapat mempelajari modul dengan efektif, dengan beberapa cara sebagai berikut :
  - a.1. memberi petunjuk tentang cara-cara belajar;
  - a.2. memberikan bimbingan agar mahasiswa dapat membentuk kelompok-kelompok belajar dan melaksanakan tutorial;
  - a.3. membuat prosedur komunikasi antara mahasiswa dengan tenaga akademik FISIP UT pusat, baik secara langsung maupun melalui surat atau telepon;
  - a.4. memberikan pengertian bahwa mereka akan memperoleh ilmu baru tentang komunikasi penyuluhan;
  - a.5. memberikan pengertian bahwa mereka dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi kelancaran tugas.

- b) membantu kelancaran proses belajar mahasiswa dengan:
- b.1. mendorong agar mahasiswa dapat belajar mandiri dengan memanfaatkan potensi intelektual atau sumber belajar yang terdapat di dalam masyarakat sekitarnya;
  - b.2. merencanakan penyelenggaraan tutorial;
  - b.3. menyelenggarakan tutorial tertulis melalui tabloid “Mitra Desa” dan “Kiat Sehat” dan memberi ringkasan modul kepada mahasiswa;
  - b.4. menyelenggarakan tutorial melalui RRI;
  - b.5. menyelenggarakan tutorial, pada tingkat propinsi dan kabupaten;

c. *Evaluasi program kerja sama*

Evaluasi program adalah alat penting yang digunakan dalam analisis kebijakan, manajemen program dan aksi politik. Menurut Brophy Grotchescher dan Gooler (dalam Winthen & Sanders 1987) ada tiga alasan diadakannya evaluasi yakni: perencanaan prosedur, program dan atau produk; perbaikan prosedur program dan atau produk yang sudah ada; serta untuk membuat penilaian justifikasi prosedur, program dan atau produk yang sedang direncanakan atau yang sudah ada.

Evaluasi pengelolaan suatu program diperlukan untuk memantau agar sarana, prasarana dan prosedur digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan program, misalnya, apakah sistem pengelolaannya menegaskan penggunaan yang efektif dari sarana dan prasarana suatu

program, apakah pengelolan prosedur-prosedur yang digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pegembang program dan sebagainya.

Evaluasi pada program kerja sama ini telah dilakukan sebanyak dua kali per semester.

Perolehan data evaluasi didapat pada saat:

- 1) Pemantauan ujian akhir semester (selama delapan semester) untuk memperoleh data tentang perolehan bahan ajar yang terlambat, pelaksanaan tutorial, pengisian tugas mandiri, dan lokasi ujian;
- 2) Pengisian kuisioner evaluasi;
- 3) Pengisian kuisioner tentang kebijakan dan hasil ujian;
- 4) Pengiriman kuisioner tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian studi.

Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian menyatakan, bahwa secara **segi relevansi**, program kerja sama BKKBN – UT di bidang pendidikan jarak jauh **sangat relevan** dengan kebutuhan para peserta didik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai tenaga penyuluhan lapangan.

Dari **segi efektivitas**, secara keseluruhan program ini **kurang berjalan seperti yang diharapkan**, baik dilihat dari jumlah kelulusan peserta didik maupun dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Kekurang berhasilan dari program ini bukan terletak pada program kerja

sama itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya, terutama yang berkenaan dengan:

- 1) kekurangtepatan waktu pengadaan materi (bahan ajar);
- 2) kekurangjelasan petunjuk pelaksanaan dan teknis bagi para pelaksana program dilapangan;
- 3) kekurangsiapan peserta dalam mengikuti program pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh;
- 4) kekurangtahuan sebagian pengelola dan peserta didik tentang sistem belajar jarak jauh;
- 5) kekuranglancaran komunikasi antara pengelola pusat dengan daerah serta antara pengelola dengan peserta didik
- 6) kesibukan peserta didik dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sehari hari sebagai PLKB dan PPLKB;

Dari segi efisiensi, program kerja sama ini dirasakan masih kurang memuaskan, karena pelaksanaan dan pemberdayaan sumber daya yang ada belum dikelola secara optimal, khususnya oleh pengelola daerah, baik dari pihak BKKBN propinsi/kabupaten/kota maupun dari pihak UPBJJ UT setempat. Begitu pula dengan peserta didik, mereka belum memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan hasil belajar.

Dari segi keterlangsungan, dirasakan relatif cukup, khususnya untuk tingkat pusat. Hal ini dapat dilihat dengan telah dilakukannya berbagai usaha dalam meningkatkan kelulusan program, seperti pembuatan rangkuman modul, pembuatan makalah, contoh-contoh soal, tutorial melalui media massa cetak maupun elektronik yang membutuhkan waktu, dana dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, usaha untuk memonitor pelaksanaan program demi keterlangsungan program kerja sama ini juga telah banyak dilakukan antara lain dengan mengunjungi daerah-daerah bermasalah meskipun dengan dana yang terbatas.

Program kerja sama ini telah memperlihatkan kemanfaatannya, ditinjau dari peran alumni di lingkungan kerjanya. Hasil ini telah meningkatkan karier dan kualitas diri para PLKB dan PPLKB. Program ini juga telah dirasakan manfaatnya oleh para pengelola BKKBN, baik dalam upaya pengembangan staf maupun kemungkinan dampaknya bagi peningkatan kinerja BKKBN secara keseluruhan di masyarakat.



## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil analisis isi terhadap komponen masukan, proses dan keluaran pada implementasi kebijakan kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh bagi penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas PLKB (PPLKB) pada tahun 2000, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan kerja sama antara BKKBN dan UT merupakan pelaksanaan dari surat keputusan bersama (naskah kerja sama) nomor 6746/PT.455/T/1991 – 287/HK-104/H3/1991, surat perjanjian/kontrak kerja tentang program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan pada Universitas Terbuka nomor 4339a/PT45.5/T/1992 – 187/HK-104/H3/1992 dan perangkat pelaksanaan lainnya.

Secara umum implementasi kebijakan kerja sama berjalan sesuai dengan ketentuan naskah kerjasamanya. Program kerja sama BKKBN – UT di bidang pendidikan tinggi jarak jauh sangat relevan dengan kebutuhan para peserta program dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai penyuluhan lapangan keluarga berencana.

Adapun hambatan-hambatan terjadi pada proses pelaksanaannya, antara lain kekurangcermatan dalam perencanaan khususnya dalam perekrutan dan

pengadaan bahan ajar, kurangnya persiapan untuk membuka suatu program studi, kekurangjelasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi para pelaksana program di lapangan, kekurangsiapan peserta dalam mengikuti program pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh, kekurangtahuan sebagian pengelola dan peserta program tentang sistem belajar jarak jauh, kurangnya koordinasi, keterbukaan, dan kekuranglancaran komunikasi antara pengelola BKKBN Pusat dengan BKKBN Daerah, antara UT Pusat dengan UPBJJ UT di daerah serta antara pengelola dengan peserta didik (antarsektor terkait). Kurangnya sosialisasi tentang adanya program kerja sama BKKBN – UT pada sektor-sektor terkait di lingkungan BKKBN maupun UT, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hambatan dari peserta didik adalah kesibukan peserta program dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya sehari-hari sebagai PLKB dan PPLKB yang harus selalu berada di lapangan.

Sedangkan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan antara lain adalah melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan ujian akhir semester program kerja sama dan diselesaikan kasus per kasus.

Secara lebih sistematis kesimpulan dari penelitian ini menurut komponen masukan dan proses adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen masukan

##### a. Persepsi

Persepsi tentang kebijakan kerja sama di bidang pendidikan tinggi jarak jauh antara BKKBN – UT oleh sebagian besar anggota tim pengelola, tim

pembina, satgas-satgas baik pusat dan daerah termasuk UPBJJ UT sama yaitu ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan PLKB dan PPLKB melalui UT dengan sistem belajar jarak jauhnya (SBJJ) untuk menjangkau peserta diklat dalam jumlah besar, pemberian gelar formal yang melekat pada kedudukan UT sebagai universitas negeri dan adanya jurusan komunikasi.

- b. Sektor terkait pelaksanaan program kerja sama ini melibatkan kantor BKKBN propinsi, kabupaten ataupun kota. Sedangkan penetapan diserahkan sepenuhnya kepada keputusan instansi mereka. Keputusan ini sebagian besar dilaporkan ke BKKBN Pusat dan UT Pusat tanpa rincian tugas dari tim pembina (satgas BKKBN pusat dan daerah).
- c. Uraian tugas yang tercantum dalam naskah kerjasama BKKBN – UT pasal 4 tercantum ke wajiban pihak BKKBN dan UT. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada instansi yang bekerja sama. Sedangkan fungsi dan tugas tim pengelola program belum dibuat uraian tertulisnya secara khusus sehingga masih kurang memahami tugas dan perannya secara aktif atau kekurangjelasan petunjuk pelaksanaan dan teknis bagi pelaksana program di lapangan, misalnya memberikan umpan balik hasil pemantauan kepada tutor.

## 2. Komponen proses

- a. Koordinasi yang diukur dengan frekuensi rapat koordinasi cukup per semester (dua kali dalam satu tahun), kecuali ada kasus-kasus yang harus segera diselesaikan. Kurangnya koordinasi pada pelaksanaan program kerja sama antara unsur yang terdapat dalam satgas BKKBN propinsi/kabupaten/kota, yaitu dengan unsur unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) UT, misalnya keharusan peserta didik mengisi tugas mandiri per matakuliah, pemberitahuan tentang waktu, tempat dan pelaksana ujian akhir semester maupun keterlambatan pengiriman nilai UAS. Diharapkan koordinasi antara tim pembina propinsi/kabupaten/kota dengan peserta didik dan UPBJJ dapat memfasilitasi kendala yang dihadapi oleh para peserta didik.

### b. Pelaksanaan program

Pada awalnya (semester 1 dan 2) proses pembelajaran tidak lancar, karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian, pencetakan, pengiriman dan penerimaan bahan ajar sehingga mereka ada yang maju ujian akhir semester tanpa mempelajari bahan ajar.

Layanan bantuan belajar berjalan hanya sampai semester 8, ini pun tidak lancar karena keterbatasan tutor yang sesuai atau yang menguasai matakuliah yang ditutorialkan.

Kurangnya penjelasan tentang sistem belajar jarak jauh mengakibatkan banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas mandiri, pada hal nilai tersebut berpengaruh terhadap nilai akhir mereka.

- c. Evaluasi program kerja sama dilakukan setiap semester dan pencatatan dan pelaporannya dikirimkan ke BKKBN dan UT Pusat, namun tidak diinformasikan kembali ke UPBJJ UT, satgas BKKBN propinsi/kabupaten/kota bahkan ke mahasiswa.

#### B. Saran

1. Mensosialisasikan kebijakan pimpinan kepada sektor-sektor terkait, baik vertikal maupun horizontal mengenai dibukanya suatu program kerja sama antarinstansi, agar mereka merasa dilibatkan dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program.
2. Mengupayakan persamaan persepsi tentang dibukanya suatu program kerja sama BKKBN – UT ini pada pimpinan semua sektor terkait, khususnya unsur operasional. Juga persamaan persepsi seluruh peserta didik tentang sistem belajar jarak jauh.
3. Perlu diadakan pertemuan rutin, terutama pada awal dan akhir semester untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi antara pengelola, satgas dan tutor.



UNIVERSITAS TERBUKA

4. Perlu diupayakan sistem tutorial yang memperhatikan perbedaan wilayah. Di wilayah tertentu diupayakan tutorial tatap muka, tetapi di wilayah lain perlu diupayakan tutorial tertulis, terutama demi kemudahan peserta didik yang mempunyai tempat tinggal relatif berjauhan.
5. Perekutan peserta didik hendaknya tidak saja berdasarkan prestasi tetapi juga berdasarkan keinginan untuk sekolah dengan cara menyebarkan angket. Jelaskan bahwa dana terbatas sehingga mereka memiliki rasa berkompetisi positif;
6. Dalam setiap pertemuan dengan peserta didik, informasi tentang proses pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh harus dalam waktu yang khusus/luang/tepat, karena informasi akan lebih dapat dimengerti apabila informasi tidak bersaing dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan sehari-hari).
7. Perlu adanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan antarsektor terkait dari kedua belah pihak yang bekerja sama, agar pelaksanaan program kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8. Pedoman pelaksanaan praktikum baik untuk peserta didik maupun instruktur lebih menggunakan bahasa sederhana (lugas dan jelas) agar lebih mudah dipahami baik oleh tutor maupun peserta didik.

9. Memanfaatkan hasil evaluasi program kerja sama sebagai balikan (*utilizing feedback*) sehingga dapat mengetahui apakah informasi sudah diterima /belum dan menghasilkan tanggapan yang diinginkan/tidak, seperti menanggapi atau menindaklanjuti keluhan dan hambatan yang dilaporkan secara lisan maupun tertulis.
10. Dalam pembuatan naskah kerja sama harus disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan jelas, baik penjelasan tentang penyelenggaraan kegiatan (administrasi akademik, proses belajar, uraian tugas sektor terkait, jasa dan pelayanan lain), zinsian biaya (biaya tetap pengembangan, biaya *variable*, *institutional fee* dan *management fee*), monitoring dan evaluasi program, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfikri, Faozan, , *Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja dan Bimbingan Teknis terhadap Kinerja Ajun Penyuluhan Keluarga Berencana Madya di DKI Jakarta*, 1993.

Azwar Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Cetakan ketiga, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996.

Belawati, Tian, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Pusat Antar Universitas , Universitas Terbuka, Jakarta, 2000.

Danim, Sudarman, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Darmayanti Tri, Belajar Mandiri: Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologis, Universitas Terbuka, Jakarta, 1997.

Dunn N. William., *Pengantar Analisis Kegiatan Publik*, Gadjah Mada University Press, 2000.

Gibson, Donnelly, *Organisasi dan Manajemen*, (terjemahan), edisi keempat.

Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nurcahaya, Yogyakarta, 1978.

Greenwood Ernest dan Mayer R. Robert., *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, 1984.

Handayaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1989.

Handayaningrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 1991.

Handoko, T. Hani., *Manajemen*, edisi II, BPFE, Yogyakarta, 1992.

Hasibuan, SP. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Ibrahim, Syafei. *Komunikasi Sebagai Faktor Determinan dalam Organisasi*. Majalah MediaTor. Vol.2. No. 2. Fakultas Ilmu Komunikasi. Unisba Bandung, 2001.

Ilyas Yalis., *Perencanaan SDM Rumah Sakit, Teori, Metode dan Formula*, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI, Depok, 2000.

Islamy, M. Irfan. Buku Materi Pokok ADNE 4410 *Kebijakan Publik*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang, 1994.

J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Lubis Firman, *Masalah Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat*, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan FK UI, Jakarta, 1982.

Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Muchlas, Makmuri., *Perilaku Organisasi* (Jilid 1), PT. Karipta, Yogyakarta, 1994.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2001

Partowidagdo Widjajono, *Memahami Analisis Kebijakan, Kasus Reformasi Indonesia*, Seri Studi Pembangunan 1, Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana ITB, Bandung, 1999.

Permana Oki, *Analisis Koordinasi Tim Pangan dan Gizi Dalam Pelaksanaan Gerakan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Jambi Tahun 2001.*

Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi*. Jilid 1, PT. Prenhallindo Jakarta, 1996.

Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Edisi 2, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Sriati, Ace, dkk. *Faktor-faktor yang Menghambat Proses Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Studi D3 Komunikasi Penyuluhan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001

Stoner James A.F and Wankel, Charles, 1986 *Management*, 3<sup>RD</sup> ed., Prentice Hall International Inc., Engelword Cliffs, New Jersey

Stoner James A.F.,dkk., *Manajemen Jilid 1*, PT Prehallindo, Jakarta, 1996.

Sudarti, *Penelitian Kualitatif*, FKM UI, Depok, 1995.

Sudarti, *Wawancara Mendalam*, FKM UI, Depok, 1995.

Suganda, Dann, *Manajemen Administrasi*, Sinar Baru, Bandung, 1982.

Suryadi Ace dan H.A.R Tilaar., *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

Suyono Haryono, Naskah Pidato Pembukaan Program Kerjasama, Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan, 30 Oktober 1991, Pondok Cabe

Terry, George R., *The Principles of Management*, Richard D. Irwin Inc. Home Wood, Illinois, 1982.

Yogaswara Kusdinar, Materi Pokok IKOM3220 *Kesatuan Masyarakat*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1993.

Wibawa Samodra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta, 1994.

Wijono, Djoko, *Manajemen*, Airlangga, University Press, Surabaya, 1997.



**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM  
BAGI KABID. PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI  
BKKBN PUSAT, KASI PERENCANAAN PROGRAM BKKBN  
PUSAT, KAPUSDIKLAT BKKBN, DAN DEKAN FISIP UT**

---

**I. IDENTITAS LOKASI**

1. Nama instansi : .....
2. Alamat instansi:.....

**II. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Jabatan : .....
6. Lama bekerja di instansi : .....

**III. KETERANGAN WAKTU WAWANCARA**

1. Tanggal hari wawancara : .....
2. Jam mulai - jam selesai : .....

**IV. KETERANGAN PEWAWANCARA**

1. Nama pewawancara : .....

# PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

## Komponen masukan

### 1. *Persepsi*

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kebijakan (SK. Menpan dan instansi) yang mendahului kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dan UT?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tujuan, sektor-sektor yang terkait dan uraian tugasnya dalam kerjasama ini yang berbentuk program studi D-3 Komunikasi

### 2. *Sektor Terkait*

Bagaimana keterlibatan sektor terkait dalam program kerja sama ini?

### 3. *Uraian Tugas*

Apa yang mendasari perincian tugas satgas BKKBN Pusat dan Daerah.serta pelaksana PPL?

## Komponen proses

### 1. *Koordinasi*

- a. Sejauhmana pelaksanaan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka menjalin kerja sama untuk melayani mahasiswa?
- b. Bagaimana pengkoordinasian pencatatan dan pelaporan agar mudah diketahui merata untuk semua sektor yang terkait?
- c. Bagaimana pemberian umpan balik kepada para pelaksana di lapangan seperti satgas BKKBN pusat dan Daerah. UPBJJ UT, baik dari BKKBN Pusat maupun UT Pusat?
- d. Bagaimana pemberian umpan balik dari BKKBN ke UT?

### 2. *Pelaksanaan program*

Bagaimana pelaksanaan program kerja sama tentang:

- 1) Perekruit peserta didik
- 2) Pengadaan bahan ajar

- 3) Penyampaian bahan ajar ke mahasiswa
- 4) Registrasi
- 5) Penyampaian bantuan belajar
- 6) Suplemen bahan ajar
- 7) Tutorial, baik tutorial tertulis, tatap muka maupun elektronik
- 8) Evaluasi hasil belajar
- 9) Jenis soal
- 10) Nilai hasil evaluasi
- 11) Pemberian waktu untuk belajar menjelang ujian
- 12) Pengurangan beban kerja

3. *Evaluasi program*

Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama di bidang PJU?

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM  
KAJUR ILMU KOMUNIKASI FISIP UT, SATGAS UT PUSAT,  
SATGAS BKKBN PUSAT DAN SATGAS BKKBN KABUPATEN  
BOGOR,**

---

**I. IDENTITAS LOKASI**

1. Nama instansi : .....
2. Alamat instansi:.....

**II. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Jabatan : .....
6. Lama bekerja di instansi : .....

**III. KETERANGAN WAKTU WAWANCARA**

1. Tanggal hari wawancara : .....
2. Jam mulai - jam selesai : .....

**IV. KETERANGAN PEWAWANCARA**

1. Nama pewawancara : .....

# PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

## Komponen masukan

### 1. *Persepsi*

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kebijakan (SK. Menpan dan instansi) yang mendahului kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dan UT?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tujuan, sektor-sektor yang terkait dan uraian tugasnya dalam kerjasama ini yang berbentuk program studi D-3 Komunikasi

### 2. *Sektor Terkait*

Bagaimana keterlibatan sektor terkait dalam program kerja sama ini?

### 3. *Uraian Tugas*

Apa yang mendasari perincian tugas satgas BKKBN Pusat dan Daerah serta pelaksana PPL?

## Komponen proses

### 1. *Koordinasi*

- a. Sejauhmana pelaksanaan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka menjalin kerja sama untuk melayani mahasiswa?
- b. Bagaimana pengkoordinasian pencatatan dan pelaporan agar mudah diketahui merata untuk semua sektor yang terkait?
- c. Bagaimana pemberian umpan balik kepada para pelaksana di lapangan seperti satgas BKKBN pusat dan Daerah, UPBJJ UT, baik dari BKKBN Pusat maupun UT Pusat?
- d. Bagaimana pemberian umpan balik dari BKKBN ke UT?

### 2. *Pelaksanaan program*

Bagaimana pelaksanaan program kerja sama tentang:

- 1) Perekruit peserta didik
- 2) Pengadaan bahan ajar

- 3) Penyampaian bahan ajar ke mahasiswa
- 4) Registrasi
- 5) Penyampaian bantuan belajar
- 6) Suplemen bahan ajar
- 7) Tutorial, baik tutorial tertulis, tatap muka maupun elektronik
- 8) Evaluasi hasil belajar
- 9) Jenis soal
- 10) Nilai hasil evaluasi
- 11) Pemberian waktu untuk belajar menjelang ujian
- 12) Pengurangan beban kerja

3. *Evaluasi program*

Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama di bidang PJJ?

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM  
SATGAS BKKBN DKI JAKARTA, UPBJJ UT JAKARTA  
DAN UPBJJ BOGOR**

---

---

**I. IDENTITAS LOKASI**

2. Nama instansi : .....
3. Alamat instansi:.....

**V. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Jabatan : .....
6. Lama bekerja di instansi : .....

**VI. KETERANGAN WAKTU WAWANCARA**

1. Tanggal hari wawancara : .....
2. Jam mulai - jam selesai : .....

**VII. KETERANGAN PEWAWANCARA**

1. Nama pewawancara : .....

# PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

## Komponen masukan

### 1. *Persepsi*

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kebijakan (SK. Menpan dan instansi) yang mendahului kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dan UT?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tujuan, sektor-sektor yang terkait dan uraian tugasnya dalam kerjasama ini yang berbentuk program studi D-3 Komunikasi

### 2. *Sektor Terkait*

Bagaimana keterlibatan sektor terkait dalam program kerja sama ini?

### 3. *Uraian Tugas*

Apa yang mendasari perincian tugas satgas BKKBN Pusat dan Daerah,serta pelaksana PPL?

## Komponen proses

### 1. *Koordinasi*

- a. Sejauhmana pelaksanaan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka menjalin kerja sama untuk melayani mahasiswa?
- b. Bagaimana pengkoordinasian pencatatan dan pelaporan agar mudah diketahui merata untuk semua sektor yang terkait?
- c. Bagaimana pemberian umpan balik kepada para pelaksana di lapangan seperti satgas BKKBN pusat dan Daerah, UPBJJ UT, baik dari BKKBN Pusat maupun UT Pusat?
- d. Bagaimana pemberian umpan balik dari BKKBN ke UT?

### 2. *Pelaksanaan program*

Bagaimana pelaksanaan program kerja sama tentang:

- 1) Perekruit peserta didik
- 2) Pengadaan bahan ajar

- 3) Penyampaian bahan ajar ke mahasiswa
- 4) Registrasi
- 5) Penyampaian bantuan belajar
- 6) Suplemen bahan ajar
- 7) Tutorial, baik tutorial tertulis, tatap muka maupun elektronik
- 8) Evaluasi hasil belajar
- 9) Jenis soal
- 10) Nilai hasil evaluasi
- 11) Pemberian waktu untuk belajar menjelang ujian
- 12) Pengurangan beban kerja

*3. Evaluasi program*

Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama di bidang PJJ?

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK TERARAH  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-3 KOMUNIKASI  
PENYULUHAN UNIVERSITAS TERBUKA**

---

**VIII. IDENTITAS LOKASI**

1. Nama instansi : .....
2. Alamat instansi:.....

**IX. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Jabatan : .....
6. Lama bekerja di instansi : .....

**X. KETERANGAN WAKTU WAWANCARA**

1. Tanggal hari wawancara : .....
2. Jam mulai - jam selesai : .....

**XI. KETERANGAN PEWAWANCARA**

1. Nama pewawancara : .....

**PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK TERARAH (DKT)  
MAHASISWA ASAL BKKBN TERHADAP PELAKSANAAN  
PROGRAM STUDI D-3 KOMUNIKASI PENYULUHAN**

- Jelaskan maksud dan tujuan pertemuan ini
- Bertukar pengalaman tentang pelaksanaan program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan (Kerja sama UT – BKKBN)

---

**Komponen Masukan**

**1. *Persepsi***

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang adanya kerja sama BKKBN – UT di bidang PJJ?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tujuan kerja sama?
- c. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai UT dengan sistem PJJnya ?
- d. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perekrutan peserta didik kerja sama ini?

**2. *Sektor terkait***

Bagaimana keterlibatan sektor terkait dalam program kerja sama ini?

**3. *Uraian tugas***

Bagaimana tugas satgas (sektor terkait) selama proses pembelajaran?

**Komponen Proses**

**1. *Koordinasi***

Bagaimana pengkoordinasian program kerja sama ini?

**2. *Pelaksanaan program kerja sama***

- a. Bagaimana pelaksanaan program kerja sama ini tentang
  - 1) Perekrutan saudara menjadi peserta didik program kerja sama ini? Apakah Saudara menyukai tugas belajar ini? Jelaskan alasannya!
  - 2) Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pengisian registrasi pertama dan ulang?
  - 3) Bagaimana menurut Saudara, penyampaian bahan ajar? Apakah bahan belajar tersebut tepat waktu sampai ke tangan Saudara?
  - 4) Penyampaian bantuan belajar
    - Suplemen bahan ajar
    - Tutorial, baik tutorial tertulis, tatap muka maupun elektronik

- 3) Evaluasi hasil belajar
- Tugas mandiri dan UAS
  - Nilai hasil evaluasi

b. Bagaimana pemberian waktu untuk belajar menjelang ujian

**3. *Evaluasi program kerja sama***

Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa program kerja sama ini dievaluasi.  
Jelaskan!

UNIVERSITAS TERBUKA

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
KABID. PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI BKKBN PUSAT, KASI PERENCANAAN PROGRAM BKKBN PUSAT,  
KAPUS DIKLAT BKKBN, DAN DEKAN FISIP UT**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		P1	P2	P3	P4
1.	<b>Input Persepsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB</li> </ul>	<p>Adanya SK Menpan 107/MENPAN/1988, membuat pimpinan BKKBN merencanakan perencangan karier PLKB dan PP.K3.</p> <p>Untuk meningkatkan karier PLKB dan PPLKB masih berpendidikan SLTA, maka pimpinan menghendaki mereka mengambil pendidikan lanjut.</p>	<p>Dalam rapat pimpinan, BKKBN ingin meningkatkan <i>performance</i> pegawainya, khususnya yang berpendidikan karier, khususnya PLKB dan PPLKB yang masih berjasaah SLTA.</p>	<p>Dilatarbelakangi oleh SK Menpan, pimpinan merencakan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan karier, khususnya PLKB dan PPLKB yang masih berjasaah SLTA.</p>	
	<b>b. Kebijakan instansi BKKBN</b>	<p>Karena ada dana dari bank dunia, maka direncanakan untuk memberikan beasiswa kepada mereka.</p>	<p>Ada jauanya, maka mereka yang berprestasi akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.</p>	<p>Masih adanya bantuan dana dari bank dunia, maka BKKBN memberikan beasiswa untuk PLKB dan PPLKB yang berprestasi.</p>	<p>Dana sepenuhnya dari BKKBN yang berasal dari bank dunia. Dana itu digunakan seoptimal mungkin untuk penyelenggaraan pendidikan. Peserta pendidikan direkrut oleh BKKBN kabupaten masing-masing.</p>
	<b>c. Kebijakan kerja sama BKKBN - UT</b>	<p>Untuk itu dicarilah universitas yang dapat memberikan pendidikan tanpa PLKB dan PPLKB meninggalkan tempat kerja. Pilihan jatuh ke UT.</p>	<p>Kemudian mencari PT yang dapat menjangkau PLKB dan PPLKB di seluruh pelosok Indonesia.</p>	<p>Untuk menyesuaikan tugas mereka sehari-hari (menyuluhan), maka ingin memasukan mereka ke program studi komunikasi penyuluhan</p>	<p>Untuk menyesuaikan dengan pekerjaan mereka dipilihlah PT. yang mempunyai jurusan komunikasi dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti adanya matkulah Kesehatan Masyarakat dan Konseiling Keluarga Sejahtera.</p>

*Lanjutan.....*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		P1	P2	P3	P4
d. Tujuan, sektor terkait dan uraian tugas dari kebijakan kerja sama tentunya untuk memajukan rakyat Indonesia, khususnya pegawai BKBN (PLKB dan PPLKB).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan umum kebijakan kerja sama tentunya untuk memajukan rakyat Indonesia, khususnya pegawai BKBN (PLKB dan PPLKB).</li> </ul>	<p>Tujuannya bagus sesuai dengan UUD'45 yakni turut mencerdaskan bangsa, untuk melancarkan PLKB dan PPLKB.</p>	<p>Tujuannya jelas untuk melancarkan peningkatan profesionalisme jabatan PLKB dan PPLKB sebagai ujung tombak BKBN di seluruh pelosok Indonesia, tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari.</p>	<p>Tujuannya jelas untuk melancarkan peningkatan profesionalisme jabatan PLKB dan PPLKB sebagai ujung tombak BKBN di seluruh pelosok Indonesia, tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari.</p>	<p>Setiap tujuan bekerja sama di bidang pendidikan itu baik, tetapi kita mengemasnya dengan baik pula yakni dengan membentuk sektor-sektor terkait untuk mengejola program kerja sama yang akan memudahkan peserta program kerja sama menyelesaikan pendidikannya.</p>

*Lanjutan....*

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
	e. Kesiapan dalam membuka kerjasama: - Naskah MoU	Dilakukan bersama dan dilaksanakan berandalannya di UT.	Direncanakan dan dirumuskan bersama yang ditandatangani oleh Kepala BKBN Pusat dan Dekan FISIP UT di Pondok Cabe.	Dirumuskan di BKBN dengan meminta masukan UT, setelah sejak baru ditandatangani oleh kedua pimpinan instansi di UT Pondok Cabe.	Dirumuskan oleh kedua belah pihak, dan ditandatangi di UT Pondok Cabe sekaligus pembukaan program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan yang ada di bawah jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UT.

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
	e. Kesiapan dalam membuka kerjasama: - Naskah MoU	Dilakukan bersama dan dilaksanakan berandalannya di UT.	Direncanakan dan dirumuskan bersama yang ditandatangani oleh Kepala BKBN Pusat dan Dekan FISIP UT di Pondok Cabe.	Dirumuskan di BKBN dengan meminta masukan UT, setelah sejak baru ditandatangani oleh kedua pimpinan instansi di UT Pondok Cabe.	Dirumuskan oleh kedua belah pihak, dan ditandatangi di UT Pondok Cabe sekaligus pembukaan program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan yang ada di bawah jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UT.

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
	e. Kesiapan dalam membuka kerjasama: - Naskah MoU	Dilakukan bersama dan dilaksanakan berandalannya di UT.	Direncanakan dan dirumuskan bersama yang ditandatangani oleh Kepala BKBN Pusat dan Dekan FISIP UT di Pondok Cabe.	Dirumuskan di BKBN dengan meminta masukan UT, setelah sejak baru ditandatangani oleh kedua pimpinan instansi di UT Pondok Cabe.	Dirumuskan oleh kedua belah pihak, dan ditandatangi di UT Pondok Cabe sekaligus pembukaan program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan yang ada di bawah jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UT.

*Lanjutan....*

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
-	Pengembangan kurikulum	Kami meminta agar matakuliah tidak jauh berbeda dengan pekerjaan mereka sehari-hari.	Sepakat untuk membuka program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan karena sebagian besar tugas PLKB dan PPLKB adalah penyuluhan sehingga kurikulumnya pun ada beberapa yang disesuaikan dengan tugas mereka.	Diserahkan sepenuhnya ke Universitas Terbuka, karena merupakan tanggung jawab perguruan tinggi	Dilakukan dengan persetujuan Dikti dan mengacu pada perguruan tinggi lainnya yang memiliki program studi yang sama dan sedikit penyesuaian yang ditinggikan oleh mitra kerja.
-	Pengembangan bahan ajar dan penyelenggaraan bahan ajar		Sepenuhnya wewenang UT, hanya memberi rekomendasi bagi mereka yang dapat menulis materi Kesehatan Masyarakat atau Konseling Keluarga Sejahtera.	Dilakukan oleh UT pihak ketiga fasilitator kerja sama.	Tidak ada kesulitan dan baik untuk variasi kurikulum

*Lanjutan ...*

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
2.	Sektor Terkait	<p>Sebelum ditandatanganiya SK kerja sama BKKBN dan UT, telah diedarkan surat ke BKKBN Propinsi/Kabupaten untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merekrut PLKP dan PPLKB terutama yang SI TA, kemandian mengirimkan je a tersebut ke BKKBN Puse ...</li> <li>b. Membentuk tim penelitian program kerja sana dan melaksanakan tugas yang mereka yang merekrutnya, mengurus telah ditetapkan bersama dan berdasarkan SK dekan FISIP no. 01/PT45?KEP/1993.</li> </ul>	<p>Sebelum ada MoU, BKKBN telah merencanakan pengelola program pendidikan dengan mengirimkan surat edaran ke Balai Diklat BKKBN Propinsi/Kabupaten, Kanwil BKKBN. Oleh karena mereka yang mengetahui kondisi PLKB dan PPLKBnya, maka mereka telah dikenakan tugas yang merekrutnya, mengurus berdasarkan SK dekan FISIP no. 01/PT45?KEP/1993.</p>	<p>BKKBN Pusat memberikan surat edaran ke daerah tingkat II dan pemilikannya tergantung satuan tugas atau masing-masing kabupaten</p>	<p>Untuk melancarkan pelayanan program pendidikan kerja sama (administratifnya), maka dibentuk satuan tugas atau satgas, baik dari pihak BKKBN maupun pembentukan tim pengelola program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan UT kerja sama UT BKKBN diretakpan oleh surat keputusan Dekan FISIP No. 01/PT45?Kep/1993 bersama edaran dari BKKBN Pusat untuk Balai Diklat BKKBN Propinsi/ Kabupaten.</p>

*Lanjutan ....*

JAWABAN INFORMAN						
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4	
3.	Uraian Tugas	Surat edaran pembentukan tim pengelola program kerja sama dikirimkan bersama SK Dekan FISIP UT no. 01/PT45/KEP/1993 telah mencantumkan fungsi dan tugasnya, seperti mengkoordinasi kegiatan program kerja tugasnya dibuat berdasarkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh untuk melancarkan masa pendidikan peserta.	Pembuatan SK FISIP no. 01/PT45/ KEP /1993 tentang pembentukan tim pengelola program kerja sama dilakukan setelah berkoordinasi dengan PUSDIKLAT BKKBN. Adapun uraian mengkoordinasi kegiatan program kerja sama guna kelancaran kerja dan memantau pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan belajar mandiri, tutorial, praktikum, penilaian praktikum, dll.	Adapun pembentukan tim pengelola program kerja sama melibatkan Kepala BKKBN Propinsi /Kabupaten, Balai Diklat BKKBN dan UPBJI UT, dengan uraian tugasnya cukup jelas dan dapat dijalankan dengan baik.	Uraian tugas tim pengelola program kerja sama telah disesuaikan dengan pelayanan pendidikan baik secara akademik (bantuan belajar) dan administrasi pendidikan jarak jauh, misalnya proses registrasi mahasiswa, pengiriman modul, tutorial, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PS D-3 Komunikasi Penyuluhan, serta memberi umpan balik hasil monitoring kepada tutor	

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM**  
**KABID. PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI BKKBPN PUSAT, KASI PERENCANAAN PROGRAM BKKBPN**  
**PUSAT, KAPUS DIKLAT BKKBPN, DAN DEKAN FISIP UT**

		JAWABAN INFORMAN			
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
1.	<i>Proses Koordinasi</i>	<p>diplikanakan dari PUSDIKLAT BKBN Propinsi - BKKBPN Kabupaten - Kanyir satgas diin de-ngan satgas daerah dan UT Pusat sang<sup>as</sup> dae-rah (pernah waktu rakor BKKBPN di Ciloto?) maupun UPBJJ</p> <p>Ke pemberita-hu-an saja. saja. UPBJJ</p> <p>Direncanakan mengadakan pertemuan koordinasi per semester dengan BKKBPN Pusat dan satgas UT Pusat. Koordinasi dengan peserta didik setiap akhir pertemuan mingguan ataupun bulanan.</p>	<p>Koordinasi berjalan lan-car walaupun tidak ada pertemuan atau rapat ko-ordinasi secara lewat satgas diin de-ngan satgas daerah dan UT Pusat sang<sup>as</sup> dae-rah (pernah waktu rakor BKKBPN di Ciloto?) maupun UPBJJ</p>	<p>Ada dan berjalan lancar. Mengadakan pemantauan bersama dengan UPBJJ UT. Laporan koordinasi langsung ke pusat. Pemberian umpan balik kepada pelaksana lapangan lewat laporan evaluasi.</p>	<p>Rapat koordinasi di pusat sering diadakan apalagi jika ada kasus, seperti pergantian mahasiswa yang diberi beasiswa, bahan ajar yang belum sampai padahal sudah dikirim ke kecamatan, akreditasi tutor dan sebagainya.</p>

*Lanjutan ...*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		P1	P2	P3	P4
2.	<b>Pelaksanaan Program Kerja sama</b>	Pada saat pelaksanaan pertama kali sesudah paket ajaran I UT tidak siap dalam menemui bahan ajar, karena terlambatnya penyelesaian penulisar belum lagi hambat pengiriman bahan ajar sehingga mahasiswa baru membaca beberapa saat mau ujian. Mahasiswa maju ujian tanpa belajar. Pengumuman nilai ujinya pun lambat. Pelaksanaan tutorial 2 x per semester	Registrasi pertama kollektif selanjutnya melalui satgas daerah. Pembuatan bahan ajar terlambat mengakibatkan pengiriman bahan ajar terlambat sehingga mahasiswa baru membaca beberapa saat mau ujian. Tu untuk semester pertama semester selanjutnya sudah dapat diatasi Tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai dengan panduan	Sesuai dengan surat keputusan bersama, bahwa pelaksanaan program dilakukan oleh UT. Hanya saja hambatannya adalah pada saat tutorial mahasiswa sulit untuk berkumpul (kondisi dan kesibukan). Tutor tidak mendapat modul hanya ringkasan modul yang dibuat oleh satgas BKKBN Pusat.	Pelaksanaan program itu terbagi menjadi 2 yakni administrasi-registrasi, akademik seperti pelaksanaan tutorial, bahan tutorial yang belum sampai, tidak ada tutor yang sesuai dengan matkul lainnya, pelaksanaan dan penilaian praktikum. Penyelenggaraan UAS, melakukan pemeriksaan ke lokasi ujian, untuk mengetahui apakah mahasiswa mengikuti ujian, dapat mengerjakan (tidak kerja sama), naskah ujian cukup, dll.

JAWABAN INFORMAN					
NO	POKOK BAHASAN	P1	P2	P3	P4
3.	Evaluasi Program Kerja sama	<p>Evaluasi direncanakan per semester, tetapi karena kesibukan, akhirnya evaluasi dilakukan per tahun. Adapun isinya tentang rep'srasi ulang, tutorial, ujian. Ilizi ujian yang terlambat ke luar, hambatan-hambatannya dihadapi oleh mahasiswa, seperti tidak bisa belajar untuk ujian karena bersamaan dengan penulisan laporan, dlt.</p>	<p>Evaluasi perlu untuk mengetahui bagaimana efisiensi program tersebut dijalankan (sebagai laporan untuk penyandang dana dalam hal ini bank dunia), hambatan-hambatannya ditat dari jumlah kelulusan per semesternya.</p>	<p>Layaknya suatu program kerja sama, maka harus diadakan evaluasi untuk mengetahui hal-hal apa yang menghambat kelancaran program khususnya mahasiswa, dan hasil ini digunakan untuk memperbaiki kerja sektor terkait, misalnya satgas harus lebih aktif memfasilitasi agar proses pembelajaran lancar, memberikan tutorial tertulis, menyarankan mereka untuk mengisi lembar jawaban Tugas Mandiri untuk perbaikan nilai ujian, dan sebagainya.</p>	<p>Kami merencanakan evaluasi per semester sesudah peman-tauan UAS karena mendapat data langsung dari lapangan, tetapi karena beberapa hal laporan evaluasi dibuat per tahun. Isi laporan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan seperti registrasi, pengiriman modul, tutorial, UAS; hasil ujian semester I; penyempurnaan pelayanan pendidikan untuk semester II melalui pembinaan kembali dan pemberian tu-torial, hasil semester II, pan-dangan peserta terhadap program studi, intervensi apa yang akan diberikan lebih lanjut agar mahasiswa termotivasi untuk menempuh UAS.</p>

**KAJUR ILMU KOMUNIKASI FISIP UT, SATGAS UT PUSAT, SATGAS BKKBPN PUSAT DAN SATGAS BKKBPN KABUPATEN  
BOGOR,**

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
KABUPATEN**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		K1	K2	K3	K4
1.	<p><i>Input Perspsi</i></p> <p>a. Kebijakan peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB</p>	<p>Tidak mengetahui siapa pencetus ide untuk mengadakan suatu kerja sama. Yang jelas, ada pertemuan antara Dekan FISIP dengan salah satu deputi di BKKBPN.</p>	<p>Tidak mengetahui dari pertama adanya kebijakan Menpan, tanpa sesudah program kerja sama berjalan pada saat hendak menyusun evaluasi program dan data sekunder.</p>	<p>Gagasan pertama datang dari deputi atau kapusdiklat BKKBPN yang mungkin didasari oleh adanya SK Menpan.</p>	<p>Tidak mengetahui dengan jelas apa yang melatarbelakangi, pimpinan merencanakan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan karier khususnya PLKB dan PPLKB yang masih berjasaah SLTA.</p>
	<p>b. Kebijakan instansi BKKBPN</p>	<p>Karena ada bantuan dari bank dunia, maka mereka merencakan untuk memberikan beasiswa.</p>	<p>Langsung saja gas mengetahui sebagai sesudah mereka merencanakan kegiatan program kerja sama.</p>	<p>Adanya bantuan dana dari bank dunia dan APBN, maka BKKBPN memberikan beasiswa untuk PLKB dan PPLKB yang berprestasi dengan sistem pembayaran tahanan atau dimasukkan dari DIP Proyek.</p>	<p>Hanya mengetahui bahwa dana beasiswa berasal dari BKKBPN Pusat.</p>

JAWABAN INFORMAN					
NO	POKOK BAHASAN	K1	K2	K3	K4
c.	Kebijakan kerja sama BKBN - UT	Untuk itu dicarilah universitas yang dapat memberikan PLKB dan PPLKB meninggalkan tempat kerja, karena kesibukan mereka, susah menuju ke tempat kuliah. Filiran jauh ke UT karena sistem belajar jarak jauhnya	Mungkin UT dengan proses belajar jarak jauhnya (registrasi, pengadaan bahan ajar, pendistribusian bahan ajar dan tutorial) yang dapat dilaksanakan di tempat, yang membuat BKBN mau bekerja sama.	BKKBN memiliki UT karena sistem belajarnya, besarannya (tidak seperti swasta) sebagai statusnya pergunuan tinggi negeri.	Kejaya sama ini bagus untuk menambah wawasan PLKB di bidang komunikasi sesuaikan dengan pekerjaan mereka, maka dipilihlah PTN yang mempunyai jurusan komunikasi dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
d.	Tujuan, sektor terkait uraian tugas dan kebijakan kerjasama BKBN - UT	Tujuan umum kebijakan kerja sama untuk memberdayakan PLKB dan PPLKB, minimal S1.	Baik, karena untuk mengembangkan sumber daya manusia.	Tujuannya jelas, untuk peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB.	Penunjukkan satgas BKBN bersama dari pusdiklat BKBN dan ditunjuk langsung oleh pimpinan melalui SK. Nomor ...?

*Lanjutan....*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		K1	K2	K3	K4
	<p>e. Kesiapan dalam membuka kerja sama:</p> <p>- Naskah MoU</p> <p>Dilakukan oleh kedua pihak dan ditandatanganan di UT bersamaan dengan pembukaan program studi D-3 Komunikasi Penyiaran. MoU tersebut bertemor 6746/PT45.5/T/ 1991 no.287/HK – 104/ H3/91.</p> <p>- Sumber daya manusia (baik peserta didik maupun tim pengelola)</p>	<p>Direncanakan dan dirumuskan di bersama yang ditandatangani oleh Kepala BKBN Pusat dan Dekan FISIP UT di Pondok Cabe</p> <p>Menurut rencana, 25.000 yang akan disekolahkan di UT, dengan tahap I sebanyak 1.500 orang dan tahap II, 1.500 orang lagi.</p> <p>Sedangkan jumlah staf pengajar baik di UT Pusat maupun di UPBII cukup untuk menjalankan program kerja sama tersebut.</p>	<p>Biasanya dirumuskan di BKBN dengan meminta masukan dari mitra kerja, dalam hal ini UT, setelah sepakat baru ditangani oleh kedua pimpinan instansi di UT Pondok Cabe.</p> <p>Marin banyak petugas berjazah lapanan yang berjajah selain SLTA selera jajah D-3.</p> <p>Untuk tim pengelola atau satgas dapat ditunjuk.</p>	<p>Tidak mengetahui dengan jelas, tetapi biasanya ada persiapan untuk membuat kesepakatan (peraturan mainnya).</p> <p>Jumlah staf masih cukup untuk mengelola pembela-jaran di program studi ini.</p> <p>Setelah mengkonfirmasi jumlah PLKB dan PPLKB yang berhak memperoleh beasiswa, jumlahnya lebih dari 25.000 orang dan sdm. untuk mengelolanya pun cukup.</p>	<p>Jumlah staf masih cukup untuk mengelola pembela-jaran di program studi ini.</p>

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
KAJUR ILMU KOMUNIKASI FISIP UT, SATGAS UT PUSAT, SATGAS BKKBN PUSAT DAN  
SATGAS BKKBN KABUPATEN BOGOR,**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		K1	K2	K3	K4
2.	Sektor Terkait	<p>Mengetahui sektor apa saja yang terkait dalam kerjasama ini pada saat dimulainya registrasi pertama mahasiswa secara kolektif yang ditetapkan dengan acanya SK tentang mahasiswa yang diberi tugas belajar dan dibayari.</p> <p>Pada SK no. 01/PT45/KEP/1993 tentang tim pengelola program kerja sama, satgas BKKBN Daerah itu terdiri dari unsur Balai Diklat BKKBN Daerah dan staf UPBJJ.</p>	<p>Mengetahui ada tidaknya nya satgas daerah apabila satgas BKKBN Daerah tersebut memberikan tembusan surat penunjukkannya ke UT, Bandung, Yogyakarta, Padang dan Lampung). Tidak semua ada tembusan suratnya. Kegiatan mereka dapat diketahui dari penandatanganan praktekun, depar hadir pemerintahan ujian di unit pengujian UT, dll.</p>	<p>Biasanya Pusdiklat mengirimkan surat edaran ke Balai Diklat BKKBIN Propinsi, Kanwil BKKBIN, penunjukan orang ybs, tergantung SK pimpinan mereka. Keterlibatan mereka dalam mendata PLKB dan PPLKB yang akan menjadi peserta beasiswa, adanya laporan pelaksanaan tutorial dan evaluasi belajar ke pusat.</p>	<p>Kanwil BKKBIN Propinsi mengeluarkan SK. yang menunjuk KTU dan bagian kepegawaian menjadi satgas BKKBIN Daerah, tetapi tidak mencantumkan keterlibatan pihak UPBJJ UT setempat.</p>
3.	Uraian Tugas	<p>Tanpa juklak pun sudah mengetahui tugas pelajaran pendidikan di UT (rutin), hanya tugas untuk sektor terkait dari BKKBN mengetahuinya lewat SK bukan juklak,</p>	<p>Uraian tugas seperti di SK Dekan FISIP no. 01/PT45/KEP/1993 seperti rekrutmen peserta program kerja sama lewat memonitor kegiatan pelayanan yang ada di bawah satgas BKKBIN DKI Jakarta di 5 wilayah (kanwil)</p>	<p>Adapun uraian tugas satgas BKKBIN pusat antara lain memonitor kegiatan pelayanan yang tersedia hingga 8 semester (+ 1 tahun sekali bukan 1 kali per semester).</p>	<p>Paling tidak mengadakan tutorial sesuai dengan dana yang tersedia hingga 8 semester dari Kabupaten/ Kota – Propinsi – Pusat.</p>

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
KAJUR ILMU KOMUNIKASI FISIP UT, SATGAS UT PUSAT, SATGAS BKKBN PUSAT DAN  
SATGAS BKKBN KABUPATEN BOGOR,**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		K1	K2	K3	K4
1.	<i>Proses Koordinasi</i>	<p>Awalnya ada koordinasi, tetapi kemudian tidak terpelihara atau minim, karena komunikasi BKKBN kurang konseptual, terlebih sesudah habis masa beasiswanya selama 8 semester.</p> <p>Tidak ada pencatatan dan pelaporan koordinasi secara khusus antara mahasiswa dengan satgas BKKBN Daerah, karena pertemuan yang dilakukan di akhir pertemuan mingguan atau bulanan.</p>	<p>Rapat koordinasi BKKBN Pusat – UT ada, tetapi pertemuan dengan satgas diklat seluruh Indonesia hanya sekali, pada saat mereka rakor di Jakarta. Sedangkan rapat koordinasi UT Pusat – UPBII UT tidak pernah ada, karena merasa bahwa UPBII tinggal melaksanakan tugas saja dalam pelayanan pendidikan. Kadang surat untuk perlakuan khusus mahasiswa program kerja sama datang terlambat dibandingkan surat dari UT ke Mahasiswa.</p>	<p>Jika ada masalah dengan pelayanan pendidikan, maka dilakukan rapat tim terpadu BKKBN – UT untuk mengatasi permasalahan, pada penyelenggaraan ujian, pengiriman hasil ujian, pembiayaan praktikum, pengiriman laporan praktikum, dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan tentang pendanaan.</p>	<p>Belum pernah ada rapat koordinasi, antara satgas BKKBN dengan UPBII Untuk memberikan informasi tentang pelayanan pendidikan/kesulitan kepada mahasiswa di setiap akhir pertemuan mingguan/bulanan BKKBN Kabupaten. Pertemuan dengan UPBII Bogor pada saat pengadaan tutorial 1 semester 2 x.</p>

*Lanjutan .....*

JAWABAN INFORMAN							
NO	POKOK BAHASAN	K1	K2	K3	K4		
2.	Proses Pelaksanaan Program	Karena registrasi secara kolektif, maka terjadi salah ketik, salah per isian agama. Kenyataannya, tercipta tidak disosialisasikan tentang cara belajar mandiri, yang mereka tahu adalah belajar seorang diri, tanpa bimbingan yang maha iswa. DNU diterima berupa tutorial atau lewat media pembelajaran lain.	Pendistribusian modul pada awalnya kacau, karena alamat pengiriman berubah, pertama dikirim ke BKKBIN Propinsi, ternyata jumlahnya tidak utuh, dari propinsi ke BKKBIN kabupaten baru sampai ke ujian (enjantung wilayah), karena DNU tersebut tidak langsung ke arah ai mahasiswa per bundel ke BKKBIN Propinsi, Kabupaten dan akhirnya mahasiswa.	Pada pelaksanaan UAS, hanya diberikan waktu khusus untuk mengikuti tutorial tatap muka maupun tertulis.	Pada saat pelaksanaan UAS, hanya diberikan waktu khusus untuk mengikuti tutorial tatap muka maupun tertulis.	Pada saat pelaksanaan UAS, hanya diberikan waktu khusus untuk mengikuti tutorial tatap muka maupun tertulis.	S1. Memonitor UAS. Menilai beberapa point praktikum, memecahkan masalah mahasiswa dengan menghubungi UPBJJ. Kadang kala motivasi mahasiswa yang mendapat nilai D atau E.

*Lanjutan ...*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN			
		K1	K2	K3	K4
3.	<i>Proses Evaluasi Program Kerja sama</i>	Dilakukan per tahun atau 2 semester. Pertama dengan menyebar angket, kemudian observasi langsung ke mahasiswa. Satgas ditanyakan juga tentang pekerjaan pendidikan, kerjadian membuat laporan. Solusi yang dilakukan biasanya yang terlihat, misalnya nilai ujian kurang memuaskan, diberikanlah tutorial. DNU terlambat, dikirim lagi langsung ke mahasiswa. Tetapi tidak ada suatu kebijakan untuk memotivasi peserta untuk giat belajar (misalnya diberikan ijin untuk meninggal tugas pada saat atau menjelang UAS) memberikan tip-tip belajar efisien di UT sesuai dengan panduan yang diberikan oleh UT.	Laporan evaluasi 1 dibuat pada saat selesai semester 1 dan 2. Laporan evaluasi II, untuk semester 3, 4, 5, dan 6. Selain laporan evaluasi, juga dilakukan penelitian tentang cara belajar mereka dan hambatan-hambatan yang ada di mahasiswa, kasimpulan dari penelitian tersebut, tidak adanya inovasi pada diri mahasiswa karena proses rekrutmennya ditunjuk hanya berdasarkan kemauannya sendiri, tidak memahami nampu jika belajar sendiri.	Dari program yang diberikan oleh UT, terlihat jumlah kelulusan yang relatif rendah, setelah dicek ke lapangan mengatakan bahwa soal-soal UAS cukup sulit, belajar mandiri atau untuk belajar lagi sangat sulit dan butuh waktu lama.	Evaluasi dilakukan setiap ada pertemuan kerja atau per semester dan berjenjang dari kabupaten – propinsi – pusat.

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
SATGAS BKKBN DKI JAKARTA, UPBJJ UT JAKARTA DAN UPBJJ UT BOGOR**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN		
		K5	K6	K7
1.	<b>Input</b> a. Kebijakan peningkatan jabatan PLKB dan PPLKB	Mengetahui pada saat BKKBN Pusat mengirimkan surat pemberitahuan bahwa kerja sama dengan UT dibentuklah satgas wilayah DKI Jakarta. Tidak juga mendapat informasi dengan pasti rekrutmen peserta.	Tidak tahu	Tidak tahu
	<b>b. Kebijakan instansi BKKBN</b>	Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, khususnya PLKB dan PPLKB di lapangan.	Tidak tahu	Tidak tahu
	<b>c. Kebijakan kerja sama BKKBN – UT</b>	Mungkin dikarenakan PLKB dan PPLKB bertugas menggalang masyarakat untuk berperilaku sehat atau bekerja di bidang penyuluhan, maka bersama UT membentuk program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan yang dapat menjangkau sampai ke pelosok.	Tidak tahu	Tidak tahu

*Lanjutan ...*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN		
		K5	K6	K7
d. Tujuan, sektor terkait dan uraian tugas dari kebijakan kerjasama BKKBN - UT	<p>Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tenaga BKKBN yang ada di lapangan</p> <p>Sektor terkait yang ditunjuk dalam surat edaran adalah KTU dan bagian kepegawaian yang ada di balai diklat atau loka diklat.</p>	<p>Setiap ada instansi yang bekerja sama dengan UT pasti bertujuan untuk memajukan stafnya agar produktivitas kerja instansi membaik.</p>	<p>Hanya diinstruksikan oleh Kepala UPBJJ yang menerima surat dari DIKLAT BKKBN DKI Jakarta, bahwa ada kerja sama antara UT dengan BKKBN sebanyak sekian (lupa) untuk DKI, mereka ingin koordinasi tentang pemberian tutorial untuk mata ajaran tertentu.</p>	<p>Tujuan yang tepatnya tidak tahu persis, tetapi karena UT dapat menjangkau mahasiswa yang tinggal di pelosok Indonesia sehingga BKKBN memilihnya.</p> <p>Kami menerima surat penunjukan hanya sebagai satgas, tidak ditunjuk dengan jelas siapa menangani apa. Dalam surat edaran tersebut tercantum satu nama dari BKKBN Propinsi.</p>

Informasi kerja sama kurang jelas, bertugas secara rutin saja. Hanya jika ada pemberitahuan dari mahasiswa bahwa ia mahasiswa program kerja sama BKKBN

*Lanjutan ...*

NO		POKOK BAHASAN			JAWABAN INFORMAN		
		K5		K6		K7	
2.	Sektor Terkait	Sektor yang terkait dalam pelaksanaan program kerja sama ini adalah Pusdiklat BKBN – Balai diklat BKBN Propinsi – Balai diklat Kabupaten dan berkoordinasi dengan UPBJJ UT. Hal ini kami ketahui setelah dua berjalan.	Yang diketahui adalah diklat berhubungan dengan diklat BKBN saja informasi tahuanya dari UT.	Dari BKBN Daerah tidak ada surat penunjukkan satgas program studi D-3 Komunikasi Penyuluhan (surat tembusan) hanya disampaikan secara lisan.			
3.	Uraian tugas	Karena pertemuan memberitahukan tentang tutorial tatap muka, tutorial tertulis, adanya rangkuman bahan ajar, praktikum di akhir jam pertemuan mingguan/bulanan, maka komunikasi tidak sampai, karena pada saat itu ada juga yang tidak hadir yang kebetulan juga lokasi jauh dari diklat sekali.	Uraian tugas tidak jelas, tidak seperti PGSD, apakah kami hanya melaksanakan tutorial saja, merekomendasi pelaksanaan praktikum, menilai praktikum atau hanya mengirimkan laporan praktikum ke UT untuk dinilai lebih lanjut.	Kami tugas secara profesional yang memang merupakan tugas UPBJJ sebagai unit pelaksana jarak jauh UT Pusat. Melakukan tugas pelayanan pendidikan administratif dan akademik.			

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
SATGAS BKKBN DKI JAKARTA, UPBJJ UT JAKARTA DAN UPBJJ UT BOGOR**

		JAWABAN INFORMAN				
NO	POKOK BAHASAN	K5	K6	K7		
1.	<i>Proses Koordinasi</i>	<p>Koordinasi dengan satgas BKKBN Pusat UT Pusat ada (laporan rutin), sedangkan dengan UPBJJ UT Jalur kadang-kadang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya komunikasi antara UT Pusat dengan UPBJJ ataupun Diklat BKKBN dengan UPBJJ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama kerja sama tidak pernah ada rapat koordinasi baik dari pihak BKKBN maupun dari UT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi jarang hampir dikatakan tidak ada. Baru ke UPBJJ bila ada masalah (inisiatif mahasiswa sendiri)</li> </ul>	
2.	<i>Pelaksanaan program kerja sama</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan pelaksanaan ujian dengan UPBJJ kemudian laporan ke BKKBN Pusat</li> <li>- Pembinaan administrasi ujian (mengecek pesertanya)</li> <li>- Nilai UAS diterima secara berjenjang, yakni: dikirim dari UT ke propinsi – kabupaten – mahasiswa.</li> <li>- Pelaksanaan tutorial berjalan lancar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa tidak berkomsunikasi dengan UPBJJ hanya dijalur ini terjadi karena merasa ujian dibeasiswaikan sehingga tidak mempedulikan apakah mereka masih bernilai E;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada masalah, ada kelompok beberapa kelompok belajar mahasiswa berinisiatif ke UPBBJJ;</li> <li>- Pelaksanaan pelayanan pendidikan dari registrasi hingga pelaksanaan dan pemantauan ujian berjalan lancar.</li> </ul>	<p style="color: red; font-size: 2em; opacity: 0.5;">UNIVERSITAS DEBUTA</p>

**MATRIKS WAWANCARA MENDALAM  
SATGAS BKKBN DKI JAKARTA, UPBJJ UT JAKARTA DAN UPBJJ UT BOGOR**

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN					
		K5	K6	K7	K8	K9	
3.	Evaluasi Program	<p>Evaluasi dilakukan setiap semester dan (sampai 8 semester) dilakukan oleh satgas BKKBN Pusat – UT Pusat, tetapi tidak menerima laporan tertulis yang lengkapnya.</p> <p>UNIVERSITAS TERBUKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah menerima laporan evaluasi tertulis dari UT;</li> <li>- Tidak pernah ada evaluasi penyelenggaraan tutorial seperti PGSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara instansi yaitu UPBJJ tidak pernah mengevaluasi program kerja sama yang ada di UT, hanya satgas dari pusat dari program kerja sama yang melakukannya;</li> <li>- Tidak pernah mendapat laporan evaluasi tertulis dari program-program yang merupakan suatu kerja sama.</li> </ul>			

**MATRIKS DISKUSI KELOMPOK TERARAH  
MAHASISWA PROGRAM KERJASAMA BKKBN – UT DKI JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>POKOK BAHASAN</b>	<b>JAWABAN INFORMAN</b>
1.	<p><i>Input</i> <b>Persepsi</b></p> <p>a. Kebijakan kerja sama dibidang PJJ antara BKKBN - UT</p>	Kerja sama BKKBN dengan UT sangat positif dalam peningkatan kemampuan, karena materi perkuliahan cukup relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Kerja sama ini diharapkan tidak terbatas hanya pada jenjang D3 tetapi juga S1
	<p>b. Tujuan, kebijakan kerjasama BKKBN – UT</p>	Tujuan kerja sama dapat dikatakan tercapai karena materi perkuliahan dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja.
	<p>c. UT dengan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ)</p>	Pada awalnya kami sama sekali tidak ada gambaran mengenai kegiatan perkuliahan di UT dan hal itu cukup mengejutkan kami.
	<p>d. Perekruit peserta didik</p>	Peserta program diseleksi berdasarkan usia, ijazah SMA, dan prestasi kerja (dilihat dari DP3). Di kabupaten jumlah akseptor diperhitungkan dan program ini lebih diutamakan untuk petugas lapangan. Tidak diadakan ujian khusus. Jadi penilaian murni penilaian atasan.
2.	<b>Sektor terkait</b>	Satgas (pokja) tidak berjalan -membantu pelaksanaan program kerja sama-. Mungkin dikarenakan juga oleh ketidakpahaman satgas mengenai sistem belajar di UT. Jadi jika ada kesulitan langsung dating ke UPBJJ UT Jakarta
3.	<b>Uraian tugas</b>	Pada registrasi I, satgas tidak membimbing mengisikan formulir, kemudian menjadi panitia pelaksana tutorial. Jika kami ada kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar, satgas tidak dapat mencarikan dan memberikan jalan ke luar, jadi satgas lebih berfungsi terutama dalam pemberian informasi saja.

*Lanjutan ...*

NO	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN
1.	<i>Proses Koordinasi</i>	Pengkoordinasian antara satgas baik dengan UPBJJ maupun UT pusat tidak berjalan lancar. Hubungan dengan UPBJJ lebih banyak dilakukan sendiri oleh mahasiswa.
2.	<i>Pelaksanaan program kerja sama</i>	<p>a. Pengisian registrasi I (data pribadi) dilakukan tanpa adanya bimbingan pengisian. Pengisian dilakukan secara kolektif.</p> <p>b. Perolehan bahan ajar sering terlambat sehingga waktu belajar paling lama hanya sekitar 2 bulan. Jika belum ada langsung ke UT Pusat. Materi modul 80% mudah dipahami, beberapa materi memerlukan bahan referensi lain seperti Bahasa Indonesia;</p> <p>c. Tutorial pernah dilakukan dengan meminta penutor, tetapi hasilnya sang tutor kurang menguasai bahan dan tidak membantu pemahaman terhadap materi. Berdasarkan pengalaman ini, maka lebih banyak berdiskusi sesama mahasiswa. Selain tutorial, pemberian suplemen bahan ajar sangat bermanfaat dalam memahami materi modul.</p> <p>d. Penasihat akademik tidak dirasakan. Praktikum dibuat sendiri tanpa ada pembimbing, jadi hanya mengacu pada panduan praktikum.</p> <p>e. Evaluasi belajar terdiri dari tugas mandiri (TM) dan UAS. Kami selalu mengisi TM karena dirasakan sangat bermanfaat untuk menguasai modul.</p> <p>f. Cakupan soal hanya sedikit yang berasal dari modul. Nilai UAS lebih cepat jika langsung meminta ke UT daripada di BKBN.</p> <p>g. Tidak ada pemberian waktu belajar maupun pengurangan beban kerja meskipun menjelang ujian. Toleransi kerja biasanya didapat dari rekan kerja, bukan dari atasan.</p>
3.	<i>Evaluasi program kerja sama</i>	Seharusnya ada evaluasi program karena banyaknya hambatan pada kami dalam proses pembelajaran. Seingat kami pernah diberikan kuesiner untuk evaluasi program dan penelitian tentang motivasi kami mengikuti program kerja sama ini sebagai mahasiswa PS. D-3 Komunikasi Penyuluhan.

**MATRIKS DISKUSI KELOMPOK TERARAH  
MAHASISWA PROGRAM KERJASAMA BKKBN – UT BOGOR**

<b>NO</b>	<b>POKOK BAHASAN</b>	<b>JAWABAN INFORMAN</b>
	<p><i>Input</i> <b>Persepsi</b></p> <p>a. Kebijakan kerjasama di bidang PJJ antara BKKBN - UT</p>	Senang dengan adanya kerja sama namun kecewa setelah bantuan belajar tidak ada yang berjalan.
	<p>b. Tujuan, kebijakan kerjasama BKKBN – UT</p>	Tujuan kerja sama dijelaskan, namun tidak secara menyeluruh mengenai pengertian kegiatan belajar.
	<p>c. UT dengan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ)</p>	Kami sama sekali tidak mendapat penjelasan tentang sistem belajar jarak jauh baik dari pihak UT maupun BKKBN, tetapi hanya penjelasan mengenai pelaksanaan ujian.
	<p>d. Perekututan peserta didik</p>	Mereka terpilih berdasarkan pilihan langsung dari atasan, tanpa ditanyakan keinginan mereka. Proses berjenjang dari daerah ke pusat, hasilnya diketahui dalam jangka waktu setahun. Jadi mereka tidak mengetahui bagaimana proses proses penyelesaiannya.
1.	<p><i>Proses</i> <b>Koordinasi</b></p>	<p>Permasalahan yang ada, penyelesaiannya harus ke UT Pusat. Masalah itu tidak dapat diselesaikan di UPB JJ setempat atau berkoordinasi dengan BKKBN melalui satgas. Satgas berperan, namun mahasiswa tidak paham jika satgas bertugas membantu mereka dalam mengikuti program pendidikan kerja sama ini. Diklat BKKBN Pusat pernah sekali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa. Sedangkan dari UT Pusat dua kali, untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.</p> <p>Pertemuan secara mekanisme kerja, pembicaraan tentang pendidikan jarak jauh selalu diagendakan terakhir sehingga hanya mengeluarkan masalah secara garis besar, tidak rinci sehingga tidak dapat diselesaikan pada saat itu juga.</p>

*Lanjutan ...*

NO.	POKOK BAHASAN	JAWABAN INFORMAN
2.	Pelaksanaan program kerja sama	<p>a. Pengisian registrasi I dilakukan tanpa bimbingan, hanya berpatokan pada katalog sehingga banyak muncul kesalahan karena tidak mengerti cara pengisiannya. Pada saat ujian I, banyak yang terlupakan menulis NIM (Nomor Induk Mahasiswa), karena hanya berpikiran pada modul. Untuk registrasi selanjutnya dilakukan secara kolektif di UPBJJ Bogor.</p> <p>b. Perolehan bahan ajar lancar, diberikan lewat BKKBN, namun perolehannya mendekati waktu ujian sekitar 1 – 2 bulan. Datangnya bersamaan dengan uang transport. Keterbacaan modul sangat baik (mudah dibaca).</p> <p>Tutorial baru dilaksanakan setelah semester 7, padahal tutorial sangat dibutuhkan mahasiswa terutama untuk dapat memahami modul, sedangkan tutorial tertulis diikuti dari Koran Kiat Sehat. Tutorial dilakukan di kecamatan atau kabupaten adalah untuk mengatasi hambatan transportasi, atau diadakan di tempat peserta didik yang terdekat, untuk itu mereka mengadakan iuran untuk transportasi tutor.</p> <p>c. Tidak ada bimbingan akademik terutama untuk permasalahan nilai-nilai yang tidak ke luar. Para mahasiswa secara perorangan tidak pernah berkonsultasi ke UT.</p> <p>d. Dalam mengerjakan praktikum ada pembimbingan dari rekan di daerah, menyampaikan materi dan mengevaluasi pembuatan praktikum.</p> <p>e. Evaluasi belajar terdiri dari TM dan UAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TM dijalankan secara bersama-sama tanpa ada pembimbingan dalam mengerjakannya. Kurang penjelasan, menyebabkan 80% tugas mandiri tidak dikirim. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mahasiswa bahwa TM tersebut berpengaruh pana nilai akhir mereka</li> <li>- Informasi UAS didapatkan dari BKKBN, yang terkadang diberikan setelah melakukan kontak dengan UPBJJ atau UT pusat, biasanya didapat pada saat registrasi</li> </ul> <p>f. Soal cukup mudah dipahami dan memang berasal dari modul</p> <p>g. Nilai ujian sering terlambat, kadang mendekati batas registrasi sehingga terkadang matakuliah yang telah lulus diregistrasi kembali.</p> <p>h. Terjadi pelimpahan tugas kepada rekan sekerja menjelang ujian. Karena lokasi lapangan cukup berjauhan, maka para mahasiswa ini belajar sendiri dan sangat sulit untuk berkelompok.</p>
3.	Evaluasi program kerja sama	Mereka tahu jika program pendidikan jarak jauh yang mereka ikuti ini dievaluasi, karena pernah menjawab kuesioner yang dikirimkan lewat pos dan diwawancara oleh satgas UT sebanyak 2 kali.